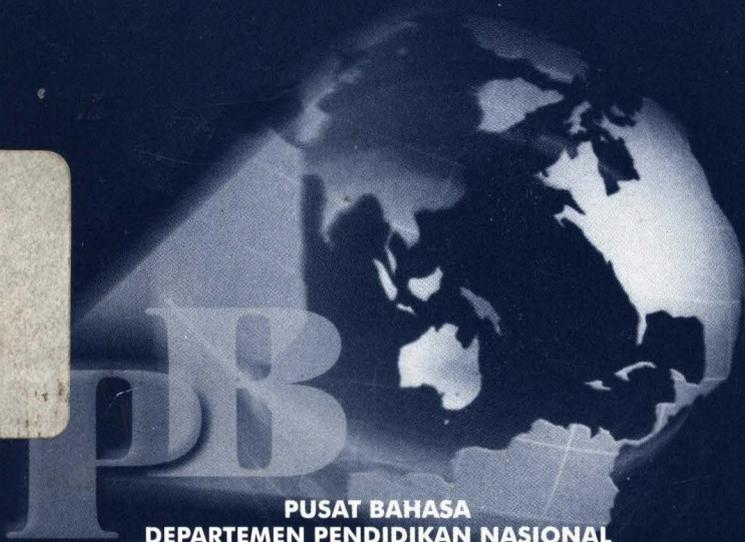


**SETENGAH ABAD
KIPRAH KEBAHASAAN
DAN
KESASTRAAN
INDONESIA: 1947—1997**

4



**PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**SETENGAH ABAD
KIPRAH KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
INDONESIA
1947--1997**



**SETENGAH ABAD
KIPRAH KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
INDONESIA
1947--1997**

Editor

Dendy Sugono
Nafron Hasjim
Hasjmi Dini
Jumariam



**PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA
2002**

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
Klasifikasi PB 353.844 SET	No. Induk : 326 14/2003 Tgl. : 3 Ttd. : _____

s

ISBN 979 685 250 0

Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta 13220

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog dalam Terbitan (KDT)

499.21

SUG

s

SUGONO, Dendy (ed.)

Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia: 1947--1997 (Edisi Revisi).-- Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.

ISBN 979 685 250 0

1. BAHASA INDONESIA
2. KESUSASTRAAN INDONESIA
3. PUSAT BAHASA

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA KEPALA PUSAT BAHASA

Masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan teknologi informasi yang amat pesat. Kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Gerakan reformasi yang bergulir sejak 1998 telah mengubah paradigma tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah berubah ke desentralistik, masyarakat bawah yang menjadi sasaran (objek) kini didorong menjadi pelaku (subjek) dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mengubah orientasi kiprahnya. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi tersebut, Pusat Bahasa berupaya meningkatkan mutu pelayanan kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Salah satu upaya peningkatan pelayanan itu ialah penyediaan bahan bacaan. Penyediaan kebutuhan bacaan ini merupakan salah satu upaya peningkatan minat baca menuju perubahan orientasi dari budaya dengar-bicara ke budaya baca-tulis.

Dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, Presiden telah mencanangkan "Gerakan Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan" pada tanggal 2 Mei 2002 dan disertai dengan gerakan "Pengembangan Perpustakaan" oleh Menteri Pendidikan Nasional serta disambut oleh Ikatan Penerbit Indonesia dengan "Hari Buku Nasional" pada tanggal 17 Mei 2002. Untuk menindaklanjuti berbagai kebijakan tersebut, Pusat Bahasa berupaya menerbitkan hasil pengembangan bahasa dan sastra untuk menyediakan bahan bacaan dalam rangka pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat.

Dalam upaya penyediaan bahan bacaan di tingkat pendidikan tinggi dan masyarakat pada umumnya, Pusat Bahasa menerbitkan kembali buku *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia* yang memuat sejarah perkembangan kelembagaan yang menangani masalah bahasa, sastra, dan pengajarannya selama lima puluh tahun

(1947—1997). Penerbitan kembali buku ini juga atas permintaan sejumlah kalangan yang melihat manfaat isi buku ini untuk mengetahui berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan masa lalu guna perencanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra secara menyeluruh pada masa yang akan datang.

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dengan pihak lain. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada kepada Dr. Nafron Hasjim, Drs. Hasjmi Dini, dan Dra. Jumariam, M.Ed. selaku anggota editor buku ini serta Sdr. Djamari dan Sdr. Dede Supriadi yang telah mempersiapkan penerbitan ini saya sampaikan ucapan terima kasih.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan mutu pembinaan dan pengembangan bahasa ke depan dan bermanfaat bagi peningkatan minat baca dalam memasuki kehidupan global.

Jakarta, September 2002

Dr. Dendy Sugono

KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

Lembaga yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia telah genap berusia setengah abad sejak dibentuk tahun 1947 yang bernama *Institut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO). Dalam perjalanan yang panjang itu banyak hal yang telah dilakukan oleh lembaga itu. Bahkan, kegiatan kebahasaan dan kesastraan telah dimulai jauh sebelum lembaga itu dibentuk, terutama setelah pernyataan sikap politik tentang bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 1928.

Perkembangan jumlah dan mutu kegiatan kebahasaan dan kesastraan itu berjalan seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia.

Buku *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia* ini berupaya memberikan gambaran tentang kiprah dan gerak langkah lembaga yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan ini selama setengah abad, mulai ITCO (1947) hingga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa).

Data yang termuat dalam buku ini terbagi dalam tiga bagian. Setelah pendahuluan, Bagian Pertama memuat informasi tentang kelembagaan dari ITCO hingga Lembaga Bahasa Nasional (LBN). Bagian ini memanfaatkan buku *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* yang disusun oleh *Maman Sumantri et al.* (1978). Bagian Kedua memuat kelembagaan dan gerak langkah Pusat Bahasa. Bagian Ketiga memuat pandangan tokoh ilmuwan, budayawan, sastrawan, dan tokoh organisasi profesi bahasa dan sastra tentang upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra.

Pengemasan bahan informasi dalam bentuk ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan. Secara khusus, peng-

hargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada para editor Sdr. Dendy Sugono, Sdr. Nafron Hasjim, Sdr. Hasjmi Dini, dan Sdr. Jumariam, serta Sdr. Dede Supriadi sebagai pembantu teknis.

Jakarta, Juli 1998

Kepala Pusat Bahasa

Hasan Alwi

PRAKATA

Penyebarluasan informasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya peningkatan sikap positif terhadap bahasa dan apresiasi sastra. Untuk itu, Kepala Pusat Bahasa menugasi Tim Penyunting untuk mengolah dan menyusun berbagai informasi kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang telah dilakukan oleh lembaga kebahasaan dan kesastraan sejak ITCO hingga Pusat Bahasa. Penyusunan informasi dalam bentuk buku seperti ini akan memudahkan pemanfaatannya, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan perencanaan bahasa di Indonesia karena bahan informasi ini dilengkapi dengan pandangan tokoh terhadap usaha pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia.

Penyunting menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran pembaca akan diterima dengan senang hati.

Jakarta, Juli 1998

Penyunting

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
PENDAHULUAN	1

BAGIAN PERTAMA

ITCO hingga LBN	3
1. Institut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO)	5
2. Panitia Pekerja	7
3. Balai Bahasa	8
4. Lembaga Bahasa dan Budaya	10
5. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan	13
6. Direktorat Bahasa dan Kesusastraan	16
7. Lembaga Bahasa Nasional	19

BAGIAN KEDUA

PUSAT BAHASA	25
1. Gerak dan Langkah Pusat Bahasa	27
a. Kebijakan Bahasa Nasional	28
b. Sarana dan Tenaga Kebahasaan	32
c. Kebijakan Sastra	36
d. Pemasyarakatan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar	41
2. Organisasi Pusat Bahasa	45
a. Kedudukan	45
b. Tugas dan Fungsi	45
c. Susunan Organisasi	45
d. Pengembangan Organisasi	55
e. Pengembangan Ketenagaan	56
3. Kegiatan Kebahasaan dan Kesastraan	61
a. Penelitian	61

b. Penyusunan dan Pembakuan	62
c. Penerjemahan	63
d. Pertemuan	64
e. Pemasarakatan/Penyuluhan	73
f. Penerbitan	77
g. Bulan Bahasa dan Sastra	78
h. Pemberian Penghargaan	79
4. Kerja Sama	82
a. Kerja Sama Dalam Negeri	82
b. Kerja Sama Luar Negeri	88

BAGIAN KETIGA

PANDANGAN TOKOH	93
1. Pelestarian Bahasa Daerah	95
2. Visi Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) terhadap Pembinaan Bahasa Indonesia	99
3. Tuntutan Kesetaraan	102
4. Pusat Bahasa di Mata Hiski	105
5. Peran Pusat Bahasa dalam Pembinaan Peristilahan Ilmu dan Teknologi Indonesia	108
6. Pusat Bahasa: Kenangan dan Harapan	112
7. Pusat Bahasa: Penilaian dan Harapan	117
8. Pusat Bahasa di Sela-Sela Belantara Masalah Sastra Indonesia	120

PENDAHULUAN

Bahasa dan sastra sebagai unsur kebudayaan nasional dan sarana budaya bangsa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan berdasarkan kebijakan nasional tentang bahasa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 dan penjelasannya, yaitu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, dan bahwa bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan dan dipelihara oleh masyarakat pemakainya dilindungi dan dibina juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup.

Pemakaian dan pengajaran bahasa asing yang lazim dipakai dalam hubungan antarbangsa pada umumnya, terutama dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam lingkungan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, serta dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi modern perlu diarahkan untuk kepentingan nasional dan dimanfaatkan sebagai satu sumber untuk pengembangan bahasa nasional.

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang bahasa tersebut, pada tahun 1947 Pemerintah telah membentuk lembaga resmi yang menangani permasalahan bahasa. Lembaga tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa yang akhirnya pada tahun 1975 menjadi "Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa". Hal itu didorong oleh suatu kenyataan bahwa seluruh permasalahan bahasa di Indonesia yang mencakup (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pengajaran bahasa asing merupakan masalah nasional yang perlu diolah dan digarap secara teliti, menyeluruh, berkesinambungan.

Semua usaha penggarapan masalah (1) bahasa nasional, (2) bahasa daerah, dan (3) pengajaran bahasa asing tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia luar pada umumnya. Di samping itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai lembaga resmi yang menangani permasalahan bahasa belum begitu dikenal oleh masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sehubungan dengan hal di atas, disusunlah buku *Setengah Abad Kiprah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* ini untuk memberikan gambaran tentang lembaga resmi yang menangani permasalahan bahasa pada masa lampau, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, serta visi tokoh tentang upaya pembinaan dan pengembangan bahasa.

**BAGIAN PERTAMA
ITCO HINGGA LBN**

INSTITUT VOORTAAL EN CULTUUR ONDERZOEK (ITCO)

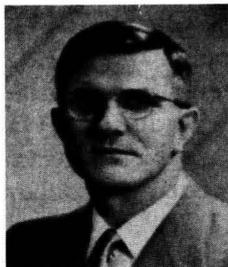
Sumpah Pemuda, yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika bangsa Indonesia masih dalam cengkeraman penjajah Belanda, membuktikan bahwa masalah kebahasaan telah menjadi perhatian tokoh-tokoh jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Hal itu merupakan satu tanda bahwa bahasa Indonesia sebagai sarana persatuan sudah sejak lama mempunyai kedudukan penting di dalam masyarakat Indonesia.

Bagi bangsa asing, bahasa Indonesia merupakan sarana yang sangat penting untuk mengenal bangsa dan budaya Indonesia. Hal itu terlihat dari usaha penelitian dalam bidang bahasa dan budaya yang dilakukan oleh para sarjana Belanda, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta.

Sejarah telah mencatat bahwa di sekitar tahun 1930-an pemerintah kolonial Belanda sudah mulai mengadakan penelitian tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Penelitian itu disalurkan melalui Lembaga Pendidikan Universitas, *Kantoor voor Inlandsche Zaken, en Oudheidkundige Dienst*. Sementara itu, usaha swasta sejak tahun 1930 diwakili oleh Yayasan Matthes, yang pada tahun 1955 namanya berubah menjadi Yayasan Sulawesi Selatan Tenggara yang berkedudukan di Makassar (sekarang Ujung Pandang). Yayasan itu bertujuan mengadakan penelitian bahasa dan kebudayaan daerah Makassar. Selain Yayasan Matthes, ada yayasan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu Yayasan Kirtya Lienfrinck van der Tuuk yang berkedudukan di Singaraja, Bali, di bawah pimpinan Dr. R. Goris. Kedua yayasan itu akhirnya bekerja sama dengan cabang lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari masa ke masa, peristiwa bahasa dan kebudayaan Indonesia itu menarik perhatian para sarjana. Pada tahun 1947 Fakultas Sastra dan Filsafat-- yang pada saat itu berada di bawah naungan *Departemen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen* (Kementerian Pengajaran, Kesenian dan Ilmu

Pengetahuan)--meresmikan pembentukan suatu lembaga yang disebut *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO) yang bertujuan menampung kegiatan ilmiah universitas, terutama dalam bidang bahasa dan kebudayaan. Lembaga ini dipimpin oleh Prof. Dr. G.J. Held yang kemudian menjadi pemimpin umum.



Prof. Dr. G.J. Held

ITCO mempunyai tiga bagian, yaitu (1) Bagian Ilmu Kebudayaan, dipimpin oleh Prof. Dr. G.J. Held, (2) Bagian Ilmu Bahasa dan Kesusastraan, dipimpin oleh Prof. Dr. C. Hooykaas, dan (3) Bagian Leksikografi, dipimpin oleh W.J.S. Poerwadarminta.

Pada Bagian Ilmu Kebudayaan tercatat Mr. H. Th. Chabot yang bertugas menyelidiki adat dan Dr. F.A.E. van Wouden sebagai petugas bahasa. Pada Bagian Ilmu Bahasa dan Kesusastraan tercatat Dr. R. Goris yang terus menyumbangkan tenaganya sampai masa pensiun. Petugas lain yang cukup besar sumbangannya dalam dunia bahasa dan sastra Indonesia ialah Prof. Dr. A. Teeuw, Prof. Dr. P. Voorhoeve, dan Prof. Dr. R. Roolvink. Pada Bagian Leksikografi diperbantukan para ahli penyelidik, seperti Prof. Dr. P. Voorhoeve, Dr. R. Goris, Dr. F.A.E. van Wouden, Mr. H. Th. Chabot, Prof. Dr. H. Uhlenbeck, Prof. Dr. A. Teeuw, dan Prof. Dr. R. Roolvink.

Kegiatan yang dilakukan ITCO, selain penelitian bahasa dan kebudayaan, ialah penyalinan kembali naskah yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari Yayasan Kirtya Liefrinck van der Tuuk, naskah yang berasal dari Sono Budoyo, Yogyakarta, dan naskah-naskah dari Yayasan Matthes, Makassar. Di samping itu, ITCO membuat film tentang tulisan-tulisan sastra daerah, seperti tulisan Aceh, Batak Simalungun, Melayu, Makassar, dan Bugis. ITCO juga melakukan tukar-menukar film dengan beberapa lembaga ilmiah di luar negeri, seperti lembaga ilmiah di Leiden, Pretoria, Kairo, dan New York. Kegiatan lain yang dilakukan ITCO ialah berusaha menarik perhatian para sarjana luar negeri untuk mengadakan penelitian ilmiah dan penerbitan tentang bahasa dan kebudayaan. Kegiatan-kegiatan itulah sebenarnya yang mengawali kegiatan kebahasaan dan kesusastraan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bahasa yang tumbuh kemudian.

Pada tahun 1952 ITCO digabung dengan Bagian Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa Yogyakarta, menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya.

PANITIA PEKERJA

Pada tahun 1947 Mr. Suwandi selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan suatu lembaga negara yang menangani masalah pemeliharaan dan pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Namun, pembentukan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pada saat itu para ahli dan sarjana bahasa banyak yang mengungsi ke luar kota Jakarta. Persiapan yang telah dilakukan baru sampai pada pembentukan Panitia Pekerja berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan 1947 No. 700/Bhg.A. tanggal 18 Juni. Panitia Pekerja itu merupakan satu unit yang dikepalai oleh Mr.



Mr. St. T. Alisjahbana

St. Takdir Alisjahbana dengan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo sebagai sekretaris, dan dibantu oleh lima orang anggota, yaitu Adinegoro, W.J.S. Poerwadarminta, Ks. St. Pamuntjak, R. Satjadibrata, dan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo.

Panitia Pekerja telah menyusun rencana kerja, yaitu (1) menetapkan istilah ilmu pengetahuan dan istilah bahasa yang digunakan masyarakat umum; (2) menetapkan tata bahasa, terutama untuk pelajaran sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas; (3) menyusun kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada untuk keperluan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Akan tetapi, Panitia Pekerja belum dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut karena pada tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda menduduki dan merampas gedung-gedung Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Pada saat itu Panitia Pekerja baru dapat melaksanakan rapat satu kali.

BALAI BAHASA

Ketika terjadi pendudukan tentara Belanda, Panitia Pekerja di Jakarta belum berhasil membentuk suatu lembaga penelitian bahasa seperti yang diharapkan. Baru beberapa bulan setelah Pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Santoso, menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan lembaga bahasa secara lengkap. Beberapa bulan setelah itu, dibentuklah suatu lembaga otonom yang berada langsung di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.



Amin Dahlan

Lembaga tersebut bernama Balai Bahasa, yang diresmikan pada bulan Maret 1948 di Yogyakarta atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Ali Sastroamidjojo, No. 1532/A tanggal 26 Februari 1948. Pemimpin umum Balai Bahasa ini mula-mula adalah P.F. Dahler alias Amin Dahlan kemudian R.T. Amin Singgih Tjitrosomo sebagai pejabat sementara. Karena P.F. Dahler meninggal dunia, selanjutnya pemimpin umum dipegang oleh Prof. Dr. Prijana. Adapun sekretaris Balai Bahasa tersebut adalah I.P. Simandjuntak. Balai Bahasa ini mempunyai empat seksi, yaitu (1) Seksi Bahasa Indonesia, dipimpin oleh St. Moh. Zain, (2) Seksi Bahasa Jawa, dipimpin oleh Tardjan Hadidjaja, (3) Seksi Bahasa Sunda, dipimpin oleh R. Iskak Adiwidjaja, dan (4) Seksi Bahasa Madura, dipimpin oleh Suro Widjojo. Pada saat itu Balai Bahasa sudah mempunyai kantor cabang yang berkedudukan di Bukittinggi.

Tugas dan kegiatan Balai Bahasa ialah (1) meneliti bahasa Indonesia dan bahasa daerah, baik lisan maupun tulis, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak digunakan lagi, (2) memberi petunjuk dan pertimbangan tentang bahasa kepada masyarakat, dan (3) membina bahasa. Kegiatan lain yang



R.T. Amin Singgih T.

perlu dicatat ialah penerbitan majalah yang berjudul *Medan Bahasa* yang memuat hal-hal tentang bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua tanggal 28 Oktober 1954 di Medan, Prof. Dr. Prijana selaku pemimpin umum Balai Bahasa memberikan prasaran tentang rencana perubahan ejaan bahasa Indonesia, yang menghasilkan kesimpulan bahwa "perlu dibentuk oleh pemerintah suatu panitia ejaan yang akan menyusun ejaan bahasa Indonesia".

LEMBAGA BAHASA DAN BUDAYA

Seperti telah disebutkan di muka, Balai Bahasa adalah salah satu bagian Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Namun, atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Agustus 1952, Balai Bahasa itu menjadi bagian Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Tugas Balai Bahasa itu dilaksanakan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya, yang merupakan gabungan dari Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan (ITCO) dan Bagian Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa, dan Jawatan Kebudayaan.



Prof. Dr. Prijana

Pimpinan Lembaga Bahasa dan Budaya ialah Prof. Dr. Prijana yang merangkap sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sejak tanggal 1 Mei 1957--karena beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan--jabatan pimpinan Lembaga dipegang oleh Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat yang juga merangkap sebagai guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jabatan sekretaris umum dipegang oleh Darsan Martadarsana dan pada tahun 1956 digantikan oleh Sjair. Pada tahun 1958 Sjair, karena pensiun, diganti oleh Dra. Lukijati Gandasubrata.

Lembaga Bahasa dan Budaya mempunyai struktur organisasi yang lebih baik daripada Balai Bahasa. Lembaga Bahasa dan Budaya mempunyai tujuh bagian dengan tiga cabang. Bagian-bagian tersebut ialah (1) Bagian Penyelidikan Bahasa dan Penyusunan Tata Bahasa, dipimpin oleh Prof. Dr. Prijatna, (2) Bagian Leksikografi, dipimpin oleh W.J.S. Poerwadarminta, (3) Bagian Penyelidikan Kebudayaan, dipimpin oleh Prof. Dr. G.J. Held, (4) Bagian Komisi Istilah, dipimpin oleh Prof. Dr. Prijana dengan wakil Nur Sutan Iskandar, (5) Bagian Penyelidikan Kesusastraan, dipimpin oleh Drs. H.B. Jassin, (6) Bagian Perpustakaan, dipimpin oleh Dr. E.M.A.A.J.A Allard, dan (7) Bagian Terjemahan, dipimpin oleh M. Rasjad St. Suleman, S.H. yang bertindak sebagai koordinator. Cabang Lembaga Bahasa dan Budaya berkedu-

dukan di tiga kota, yaitu (1) Cabang Yogyakarta, yang dipimpin oleh Tardjan Hadidjaja, (2) Cabang Singaraja, dipimpin oleh Dr. R. Goris (yang sudah menjadi pemimpin penelitian bahasa dan kebudayaan di Bali sejak tahun 1947, ketika instansi itu masih merupakan cabang (ITCO), dan (3) Cabang Makassar dipimpin oleh Abdurrachim yang bertindak sebagai koordinator.

Tugas Lembaga Bahasa dan Budaya meliputi (1) penyelidikan dan penelitian bahasa persatuan, bahasa daerah, dan kebudayaan di Indonesia, (2) penyusunan tata bahasa, (3) penyusunan kamus bahasa Indonesia dan daerah, (4) pengumpulan dan penetapan istilah berbagai ilmu pengetahuan; (5) penyelenggaraan terjemahan buku untuk perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan umum, serta (6) penyebaran hasil penelitian.

Di samping kegiatan penelitian dan pengembangan, Lembaga Bahasa dan Budaya juga menerbitkan majalah dua bulanan yang berjudul *Bahasa dan Budaya*. Dewan redaksinya terdiri atas sebelas orang yang dipimpin oleh Prof. Dr. Prijana. Majalah itu terbit atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 49032/Kab, tanggal 27 Desember 1952. Isinya bersifat ilmiah populer tentang hasil penelitian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta kebudayaan Indonesia, baik yang dihasilkan oleh pusat maupun oleh cabang. Di samping itu, majalah itu juga memuat istilah-istilah yang telah disahkan oleh Komisi Istilah. Adapun tujuan lembaga menerbitkan majalah itu ialah (1) mewujudkan hubungan nyata antara Universitas Indonesia dan masyarakat, (2) menanamkan rasa cinta dan minat terhadap bahasa persatuan dan kebudayaan Indonesia, (3) membantu para peminat bahasa dan kebudayaan mendapatkan bacaan ilmiah populer tentang bahasa dan kebudayaan, (4) merangsang masyarakat peminat bahasa dan kebudayaan untuk menulis dan mengisi majalah tersebut, baik tulisan asli, saduran maupun terjemahan, (5) memberi kesempatan tanya jawab mengenai masalah kebudayaan dan kebahasaan, dan (6) menyebarkan hasil penelitian.

Penerbitan hasil kegiatan kebahasaan meliputi: *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W.J.S. Poerwadarminta (cetakan I 1952 dan cetakan II 1954), majalah dua bulanan *Bahasa dan Budaya* (1952); *Prasasti Bali I dan II* oleh Dr. R. Goris (1954), *Kamus Istilah Kedokteran* oleh Komisi Istilah (1954), *Kamus Istilah Kehewanian* oleh Komisi Istilah (1956), *Kamus Istilah Teknik* oleh Komisi Istilah (1956), *Kamus Istilah Pelayaran* oleh Komisi Istilah (1956), *Intisari Tatanama Kimia Anorganik dan Kimia Organik beserta Kamus Istilah Kimia* oleh Komisi Istilah (1956), *Kamus Istilah Kerajinan Wanita* oleh Komisi Istilah (1957), *Kamus Istilah Hukum* oleh Komisi Istilah (1958), *Kamus Istilah Pendidikan, Pengajaran, dan Ilmu Jiwa* oleh Komisi Istilah

(1958), dan *Pedoman Pembentukan Istilah Kimia* oleh Komisi Istilah (1958).

Jika penerbitan di atas diperhatikan, tampak bahwa hasil kerja Komisi Istilah cukup banyak. Pada saat itu Komisi Istilah memang bekerja sangat aktif. Sejak tanggal 1 Juni 1951 komisi itu sudah digabungkan dengan Balai Bahasa Jawatan Kebudayaan, dan tahun 1952 dimasukkan ke dalam Lembaga Bahasa dan Budaya.

Komisi Istilah mempunyai 16 seksi yang masing-masing terdiri atas 3 sampai 12 orang ahli. Komisi ini diketuai oleh Prof. Dr. Prijatna (1950--1957) yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat (1957--1960). Pada tahun 1960--1962 jabatan pimpinan dipegang oleh Dra. Lukijati Gandasubrata. Jabatan wakil ketua dipegang oleh Nur Sutan Iskandar yang aktif bekerja sejak tahun 1950 sampai tahun 1960. Jabatan sekretaris umum berturut-turut dipegang oleh St. Muh. Said, A.W. Djumena, R.A. Datuk Besar, dan Dra. Moliar Achmad.

LEMBAGA BAHASA DAN KESUSASTRAAN

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 69626/B/S/, tanggal 1 Juni 1959, Lembaga Bahasa dan Budaya berganti nama menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Sejak itu lembaga tersebut beserta cabang-cabangnya terlepas dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan langsung di bawah Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Bagian Bahasa, Jawatan Kebudayaan dilebur dan pegawainya masuk ke Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Demikian pula sejak bulan Juni 1964, Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah, Jawatan Pendidikan Umum juga dimasukkan ke dalam lembaga itu. Dengan demikian, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan merupakan gabungan dari Lembaga Bahasa dan Budaya yang berada di bawah Fakultas Sastra, Bagian Bahasa dan Jawatan Kebudayaan, dan Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah dari Jawatan Pendidikan Umum.



Dra. Lukijati G.

Gandasubrata. Pada tahun 1960 jabatan pimpinan umum dipegang oleh sekretaris umum karena pimpinan umum meninggal dunia. Pada tahun 1962 Dra.



Dra. Moliar Achmad

Moliar Achmad menjabat kepala lembaga karena Dra. Lukijati Gandasubrata pindah ke Semarang. Pada tahun 1966, pimpinan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan itu diganti oleh Dra. S.W. Rujati Mulyadi.

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan terdiri atas delapan urusan, yakni (a) Urusan Tata Bahasa, dipimpin berturut-turut oleh Drs. Slamet Muljana, T.W. Kamil, M.A., Drs. Nurdin Achmad, dan Drs. Basuki Suhardi; (b) Urusan Peristilahan, dipimpin oleh Dra. Moliar Achmad, dan kemudian oleh Dra. Sri

Timur Suratman; (c) Urusan Kesusastraan Indonesia Modern, dipimpin oleh Drs. H.B. Jassin, kemudian oleh Drs. Lukman Ali; (d) Urusan Kesusastraan Indonesia Lama, berturut-turut dipimpin oleh Dra. S.W. Rujati Mulyadi, Drs. Sardanto Tjokrowinoto, dan Soelastri Soerjoatmojo; (e) Urusan Bahasa Daerah, dipimpin berturut-turut oleh Dra. S.W. Rujati Mulyadi, Drs. Hoesein Widjajakusumah, Dra. Sri Sukei Adiwimarta, Drs. Djajuli, dan Drs. Ramli Harun; (f) Urusan Perkamusan, dipimpin oleh Drs. A.M. Moeliono, M.A., kemudian oleh Drs. Koentamadi; (g) Urusan Dokumentasi dan Penerbitan, dipimpin oleh Drs. Hoesein Widjajakusumah, kemudian oleh Soelastri Soerjoatmodjo, dan terakhir oleh Drs. Munawar; (h) Urusan Terjemahan, dipimpin berturut-turut oleh Dra. Lukijati Gandasubrata, Hoedi, B.A., dan Suntari Suntoro.

Cabang Lembaga Bahasa dan Kesusastraan berjumlah tiga buah, yaitu (1) Cabang Yogyakarta, dipimpin oleh Drs. Mudjanattistomo, (2) Cabang Singaraja, dipimpin oleh Drs. Suwito Santoso, kemudian oleh Drs. I Gusti Ngurah Bagus, dan (3) Cabang Makassar, dipimpin berturut-turut oleh A. Tenriadji, Moh. Nur, dan Ahmad Rahman.

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan mempunyai tugas yang hampir tidak berbeda dengan tugas Lembaga Bahasa dan Budaya. Lembaga ini bertugas (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek, terjemahan, dan keputakaan, (2) mengadakan penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, (3) mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi lain di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, (4) mengadakan simposium, seminar, dan diskusi tentang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, (5) memberi penerangan, pertimbangan, dan saran kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, dan (6) menyelenggarakan penerbitan.

Setelah berubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, kegiatan lembaga itu tampak lebih maju daripada sebelumnya. Pada tanggal 7 Mei 1966 dibentuklah sebuah Panitia *Crash Program* Ejaan Bahasa Indonesia, yang anggotanya adalah ahli-ahli bahasa di Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Drs. Anton M. Moeliono, M.A. bertindak sebagai ketua dan Dra. S.W. Rujati Mulyadi sebagai wakil ketua. Jabatan sekretaris dipegang oleh Dra. Sri Timur Suratman, sedangkan jabatan sekretaris II dipegang oleh Drs. Basuki Suhardi. Anggota-anggotanya adalah Djoko Kentjono, M.A., Drs. Harimurti Kridalaksana, Drs. Lukman Ali, Drs. S. Effendi (menggantikan Drs. Sardanto Tjokrowinoto). Panitia itu ditetapkan

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan No. 062/1967, tanggal 19 September 1967. Panitia itu telah menyusun konsep ejaan yang kemudian diterbitkan oleh Dian Rakyat dengan judul *Ejaan Baru Bahasa Indonesia*, (1967).

Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-36 (1964), Lembaga Bahasa dan Kesusastraan bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta menyelenggarakan simposium bahasa dan kesusastraan dengan tema "Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru." Topik yang dibahas dalam simposium ini meliputi bidang kebahasaan dan pengajaran bahasa serta sastra. Pada kesempatan simposium itu diadakan pula kegiatan pameran dokumentasi bahasa dan sastra. Hasil simposium itu berupa buku yang diterbitkan pada tahun 1967 oleh Gunung Agung dengan judul *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru* dengan editor Drs. Lukman Ali. Sebelum itu, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan telah menerbitkan dua buku, yaitu (1) *Syair Putri Akal* (1965) yang disusun oleh Urusan Penelitian dan Penyusunan Kesusastraan Lama, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan (2) *Studi Bidang Kehidupan Desa di Pinggiran Jakarta* (1965) yang disusun oleh Tim Kerja Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Penerbitan hasil kegiatan kebahasaan dan kesastraan meliputi *Kamus Istilah Pertanian dan Perikanan* oleh Komisi Istilah (1960), *Kamus Istilah Ekonomi/Keuangan* oleh Komisi Istilah (1960), *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (cetakan II) oleh W.J.S. Poerwadarminta (1961), *Kamus Istilah Kimia/Farmasi Inggris-Indonesia-Jerman-Belanda* oleh Komisi Istilah (1965), *Syair Putri Akal* oleh Urusan Kesusastraan Lama LBK (1965), *Studi Bidang Kehidupan Desa di Pinggiran Jakarta* oleh Tim Kerja Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1966), *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru* oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan bersama Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, dan KASI Jaya (1966), *Ejaan Baru Bahasa Indonesia* oleh Panitia Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (1966), *Kamus Istilah Bahasa dan Kesusastraan* oleh Komisi Istilah (1966).

DIREKTORAT BAHASA DAN KESUSASTRAAN

Setelah tiga tahun Lembaga Bahasa dan Kesusastran diresmikan, atas dasar Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 75/V/kep/i/1966, tanggal 3 November 1966 lembaga tersebut diubah namanya menjadi Direktorat Bahasa dan



Dra. S.W. Rujati M.

Kesusastran di bawah pimpinan Dra. S.W. Rujati Mulyadi. Direktorat Bahasa dan Kesusastran berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Struktur organisasi yang ada pada direktorat ini lebih ramping daripada yang ada pada Lembaga Bahasa dan Kesusastran. Direktorat Bahasa dan Kesusastran mempunyai bagian-bagian sebagai berikut: (a) Dinas Bahasa Indonesia, dikepalai oleh Drs. S. Effendi; (b) Dinas Kesusastran Indonesia, dikepalai oleh Drs. Lukman Ali; (c) Dinas Bahasa dan Kesusastran Daerah, dikepalai oleh Drs. Koentamadi; (d) Dinas Bahasa Kesusastran Asing, dikepalai oleh Chusaeri; (e) Dinas Peristilahan dan Perkamusan, berturut-turut, dikepalai oleh Dra. Sri Timur Suratman (November 1966--Mei 1967), dan oleh Dra. Sri Sukesi Adiwimarta (Juni 1967--Mei 1969); (f) Sekretariat, berturut-turut, dikepalai oleh Hermanu Maulana (November 1966--Mei 1967) dan oleh Dra. S.W. Rujati Mulyadi (Mei--Juli 1967) ketika jabatan pimpinan Direktorat Bahasa dan Kesusastran dipegang oleh Chusaeri dan Hermanu Maulana. Setiap dinas terdiri atas lima seksi yang melaksanakan tugas-tugas dinas.

Direktorat Bahasa dan Kesusastran mempunyai tugas (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek, terjemahan, dan kepustakaan; (2) mengadakan penyelidikan dan penelitian setempat, seminar, simposium, dan musyawarah sebagai bahan untuk memperlancar tugas, yang dapat diselenggarakan bersama-sama dengan instansi di dalam lingkungan departemen dan badan organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (3) membantu mempertinggi mutu pengetahuan dan penguasaan bahasa asing, menerjemah-

kan hasil sastra dan unsur-unsur kebudayaan lainnya, baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa daerah ke dalam bahasa asing atau sebaliknya; (4) memberikan bantuan, keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang masalah yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah serta bahasa asing kepada instansi-instansi di dalam lingkungan departemen dan badan, atau organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (5) menyelenggarakan penerbitan dan mengabadikan hasil penyelidikan dan penelitian untuk kepentingan usaha pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada khususnya, untuk kepentingan bangsa dan negara pada umumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, terutama, ialah penyebaran informasi tentang ejaan. Pada bulan Juni 1967 Panitia Ejaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berkunjung ke Malaysia atas undangan Pemerintah Malaysia dalam rangka penyebaran dan pengembangan ejaan baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 27 September 1967 Panitia juga turut serta dalam diskusi tentang ejaan yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pada tanggal 29 Oktober 1967 diselenggarakan ceramah mengenai ejaan yang dihadiri guru-guru SMP dan SMA di Yogyakarta. Pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1969, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan ikut dalam diskusi ejaan baru bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Peningkatan informasi mengenai ejaan bahasa Indonesia ini tidak hanya berlangsung di pusat. Di daerah pun dilaksanakan penerangan tentang ejaan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan Cabang Makassar atas prakarsa Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Pameran dokumentasi bahasa dan sastra diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 5 November 1967. Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-40, pada tanggal 11 sampai dengan 18 November 1968--bersamaan dengan pembukaan Taman Ismail Marzuki--Direktorat Bahasa dan Kesusastraan menyelenggarakan pameran dokumentasi sastra Indonesia modern.

Bersama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Ikatan Linguistik Indonesia, dan IKIP Jakarta, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan menyelenggarakan Seminar Bahasa Indonesia pada tanggal 26--28 Oktober 1968 di Jakarta. Seminar ini membicarakan masalah standarisasi, tata bahasa, dan penggunaan bahasa. Pemakalah seminar itu adalah Prof. S. Takdir Alisjahbana, S.H., Drs. Anton M. Moeliono, M.A., A. Latief, M.A., Dr. Samsuri, Drs. M. Ramlan, Djoko Kentjono, M.A., Drs. Umar Junus, Drs. A.M. Affandi, Hassan Ahmad (Malaysia), Drs. M.S. Hutagalung, dan Drs. Hari-

murti Kridalaksana. Hasil seminar itu diterbitkan oleh Nusa Indah, Ende, 1971, dengan judul *Seminar Bahasa Indonesia 1968*.

Beriringan dengan penyelenggaraan seminar itu, diadakan diskusi tentang kritik sastra pada tanggal 31 Oktober 1968 di Balai Budaya Jakarta. Kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Dewan Kesenian Jakarta. Makalah yang berjudul "Tentang Kritik Sastra: Sebuah Pendirian Lagi" dari Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan dibawakan oleh Drs. S. Effendi. Makalah dari Dewan Kesenian Jakarta dibawakan oleh Arief Budiman dan Goenawan Mohamad dengan judul "Tentang Kritik Sastra." Makalah dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang berjudul "Pendirian atas Pendirian tentang Kritik Sastra" dibawakan oleh Drs. J.U. Nasution.

Dalam usaha peningkatan mutu pengetahuan para pegawainya, Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan menyelenggarakan kursus bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Arab dengan memanfaatkan tenaga-tenaga Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan, yaitu A.M. Almatsier, A. Latief, M.A., Dra. Saodah Nasution, Dra. S.W. Rujati Mulyadi, Hermanu Maulana, dan Drs. Muhadjir. Majalah *Bahasa dan Budaya* yang terhenti sejak tahun 1963, mulai diterbitkan lagi tahun 1967 dalam bentuk stensilan dengan nama baru *Bahasa dan Kesusasteraan*.

Penerbitan hasil kegiatan kebahasaan dan kesasteraan meliputi *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cetakan IV oleh W.J.S. Poerwadarminta (1966) majalah dua bulanan *Bahasa dan Kesusasteraan* (1967), *Bahasa dan Kesusasteraan Seri Khusus: No. I Pagar Kawat Berduri* oleh Drs. M. Saleh Saad (1968), "Drama Usmar Ismail Api" oleh Drs. S. Effendi (1968), No. *Mamahami dan Menikmati Puisi* oleh Drs. E. Hutagalung (1968), No. II *Hikayat Bulan Berbelah* oleh Dra. S.W. Rujati Mulyadi (1968), *Kritik Sastra* oleh Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan bersama Dewan Kesenian Jakarta (1968), *Pameran Dokumentasi Indonesia Modern* oleh Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan dan Dewan Kesenian Jakarta dengan bantuan IKAPI (1968), *Prasasti Baru Radja Ragadjaja* oleh Ketut Ginarsa (1968), *Arti Dongeng Bali dalam Pendidikan terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia* oleh Tim Riset Cabang Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan Makassar (1968), *Tembang Macapat: Timbulnya Daerah Pemakaian serta Penyebarannya* oleh Drs. Sardjono H.A (1968).

LEMBAGA BAHASA NASIONAL

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mashuri, S.H., No. 034/1969 Tahun 1969, mulai tanggal 24 Mei 1969 nama Direktorat Bahasa dan Kesusastraan diganti menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Secara struktural, lembaga ini berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dra. S.W. Rujati Mulyadi diangkat sebagai Kepala Lembaga Bahasa Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 035/1969. Namun, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1970, Kepala Lembaga Bahasa Nasional dijabat oleh Drs. Lukman Ali karena Dra. S.W. Rujati Mulyadi bertugas di luar negeri (Leiden).



Dra. S.W. Rujati M.

Lembaga Bahasa Nasional mempunyai tugas (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, per-kamus, sastra, dialek, terjemahan, dan kepustakaan; (2) mengadakan penelitian setempat, seminar, simposium, dan musyawarah bersama-sama instansi lain, dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, badan, dan organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (3) memberikan bantuan, keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai masalah bahasa dan sastra Indonesia dan daerah kepada instansi di lingkungan departemen, badan, organisasi masyarakat, atau perorangan, baik di dalam maupun di luar negeri; (4) menyelenggarakan penerbitan dan penyebaran hasil penelitian untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada khususnya, serta bangsa dan negara Indonesia pada umumnya; (5) menyelenggarakan ketatausahaan selengkapya; serta (6) memberi saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan demi kesempurnaan tugas pokok.

Tugas tersebut dilaksanakan oleh bidang sesuai dengan ruang lingkup masalah. Bidang-bidang itu ialah sebagai berikut: (a) Bidang Bahasa Indone-

sia, dikepalai oleh Drs. S. Effendi, (b) Bidang Sastra Indonesia, dikepalai oleh Drs. Lukman Ali, (c) Bidang Bahasa dan Sastra Daerah, dikepalai oleh Drs. Koentamadi, (d) Bidang Perkamusan dan Peristilahan, dikepalai oleh Dra. Sri Sukeksi Adiwimarta, (e) Bidang Penerjemahan, dikepalai oleh A.M. Almatseir, dan (f) Sekretariat, dikepalai oleh Dra. Sri Sukeksi Adiwimarta. Kelima bidang dan sekretariat tersebut masing-masing mempunyai lima seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi.

Karena tugas pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra nasional makin luas, dengan surat keputusan No. 038/1970, tanggal 1 Mei 1970, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan pembentukan kembali cabang Lembaga Bahasa Nasional, yaitu Cabang I di Singaraja, Cabang II di Yogyakarta, dan Cabang III di Makassar, Cabang I Singaraja dikepalai oleh Drs. I Gusti Ngurah Bagus, Cabang II Yogyakarta dikepalai oleh Drs. Mudjanattistomo dan Cabang III Makassar dikepalai oleh Ahmad Rahman.

Kegiatan Lembaga Bahasa Nasional, antara lain, sebagai berikut.

a. Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan Lembaga Bahasa Nasional, antara lain, (1) Penelitian tentang pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMP dan SMA Jakarta pada bulan Februari--Mei 1970 sebagai tindak lanjut penandatanganan naskah kerja sama antara Lembaga Bahasa Nasional (diwakili oleh Drs. Lukman Ali) dan Direktorat Pendidikan Menengah Umum (diwakili oleh Drs. Waskito T.S.) pada tanggal 29 Januari 1970. Penelitian itu dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas Drs. Lukman Ali (Ketua Umum). (2) Penelitian tentang soal-soal ujian bahasa Indonesia SMP dan SMA tahun 1950--1967 untuk mengetahui isi, organisasi, dan ragam bentuk ujian. Penelitian ini dilakukan oleh Drs. S. Effendi dan Drs. Farid Hadi pada tahun 1972. Hasilnya diterbitkan sebagai nomor khusus majalah *Bahasa dan Kesusastraan*. (3) Penelitian tentang imbuhan dalam bahasa Indonesia tertulis untuk memperoleh deskripsi tentang bentuk, distribusi, fungsi, dan maknanya melalui telaah data imbuhan yang terdapat dalam 6.721 kalimat dari sumber (buku cerita sastra, kumpulan puisi, pepatah, majalah ilmu sastra, dan surat kabar). Penelitian dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas Drs. S. Effendi (Ketua), Drs. Zulkarnain (Sekretaris/Anggota), Djoko Kentjono, M.A., Drs. Sjahrul Sjarif, Drs. Farid Hadi, dan Dra. Ria Djuhariah (para anggota) dalam rangka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, tahun 1973/1974.

b. Penyusunan

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lembaga Bahasa Nasional, antara lain (1) Penyusunan antologi yang berisi sejumlah sajak perjuangan yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Dr. H.B. Jassin, Drs. S.W. Rujjati Mulyadi, Drs. Lukman Ali, Dra. Anita K. Rustapa, Drs. Djajanto Supraba, dan Lukman Hakim. Antologi ini diberi judul "Aku" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Trisno Sumardjo, Bisby Sunharjo, dan Moh. H. Salleh, M.A. (2) Penyusunan naskah "Daftar Pustaka" yang memuat informasi tentang buku dan artikel yang membicarakan atau bertalian dengan bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah. Penyusunan dilakukan oleh sebuah tim pada tahun 1972/1975 dalam rangka melengkapi daftar pustaka yang telah ada. (3) Penyusunan naskah "Pedoman Pengajaran Bahasa Indonesia" yang berusaha menjelaskan antara lain perspektif pengajaran bahasa, cara pengorganisasian komponen pengajaran kemampuan bahasa, pengalaman belajar yang diperlukan anak didik, dan cara mengevaluasi hasil belajar anak didik. Penyusunan dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Drs. S. Effendi, dengan anggota Dr. Mulyanto Sumardi, Djoko Kentjono, M.A., Drs. Muhadjir, Drs. Basuki Suhardi, Abdul Latief, M.A., Drs. Djajanto Supraba, dan Dra. Yayah B. Lumintang pada tahun 1973/1974.

c. Pertemuan

Dalam upaya pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra nasional, Lembaga Bahasa Nasional menyelenggarakan pertemuan kebahasaan dan kesastraan. Pertemuan itu antara lain sebagai berikut.

Ceramah

Ada dua ceramah, yaitu (1) "Penelitian Kesusastraan Daerah" oleh Ajip Rosidi bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-42, 28 Oktober 1970; dan (2) "Bahasa Indonesia dalam Pendidikan dan Pengajaran," disampaikan oleh Drs. S. Effendi pada tanggal 29 Oktober 1970.

Diskusi

Dua diskusi diselenggarakan, yaitu (1) Bahasa untuk Guru-Guru SMP dan SMA di Jakarta pada bulan Oktober 1971 bekerja sama dengan Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama Jakarta Raya dan Institut Agama Islam Negeri Jakarta. Dalam diskusi itu dibahas kertas kerja "Tentang Mengarang dan Apresiasi Puisi di SMP dan SMA" oleh Drs. S. Effendi dari

Lembaga Bahasa Nasional, "Kata-kata Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Arab," oleh Drs. Sudarno dari Institut Agama Islam Negeri Jakarta, dan dua kertas kerja tanggapan masing-masing oleh Drs. Bakran Jacob dan Drs. Ramli Harun. (2) Diskusi Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Guru-Guru SMP pada bulan Mei 1972, bekerja sama dengan Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama Jakarta. Diskusi itu membahas kertas kerja "Identifikasi Tujuan Kurikuler Pengajaran Bahasa Indonesia di SMP" oleh Drs. S. Effendi.

Seminar/Simposium

Pada masa Lembaga Bahasa Nasional telah diselenggarakan seminar, simposium, dan sarasehan. (1) Seminar Bahasa Indonesia di Puncak Pass pada tanggal 2--3 Maret 1972 yang menghasilkan kesimpulan bahwa pembakuan bahasa perlu dilaksanakan guna mengatasi kekurangan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa kebudayaan, ilmu, dan teknologi modern. Atas dasar seminar itu pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1972 menetapkan bahwa mulai tanggal 17 Agustus 1972 berlaku tata cara penulisan bahasa Indonesia menurut Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden No. 57, tahun 1972. (2) Seminar Bahasa Daerah (Bali, Sunda, Jawa) di Yogyakarta, pada tanggal 1--5 November 1973. (3) Seminar Tata Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia di Pacet, Cipanas pada tanggal 18--22 Februari 1974. (4) Praseminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta, pada tanggal 29--31 Oktober 1974. (5) Seminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta, pada tanggal 25--28 Februari 1975. (6) Simposium Peristilahan pada tanggal 2--3 Desember 1972 di Jakarta. Simposium ini diselenggarakan bersama oleh Lembaga Bahasa Nasional, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, IKIP Jakarta, LIPI, dan Dewan Kesenian Jakarta dengan bantuan Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (7) Sarasehan Ejaan Bahasa Jawa di Yogyakarta, Bahasa Sunda di Bandung, dan Bahasa Bali di Singaraja.

Sidang Majelis Bahasa

Kerja sama kebahasaan bersama Malaysia dilakukan dalam wadah Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Sidang MBIM diselenggarakan pertama kali di Kuala Lumpur pada tanggal 26--30 Desember 1972. Sidang MBIM itu selanjutnya diselenggarakan setahun dua kali secara berganti-ganti di Indonesia dan di Malaysia.

Selain menyelenggarakan pertemuan kebahasaan dan kesastraan, Lembaga Bahasa Nasional aktif mengikuti pertemuan kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh pihak lain, seperti berikut. (1) Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Dasar, Prasekolah, dan Pendidikan Luar Biasa di Jakarta pada bulan Maret 1970, dengan membawakan kertas kerja "Apresiasi Sastra Indonesia di Sekolah Dasar" oleh Drs. S. Effendi. (2) Lokakarya Penyusunan Kurikulum yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (sekarang Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, BP3K) pada tahun 1971--1973 dalam rangka pelaksanaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan di delapan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam kegiatan ini Drs. S. Effendi mewakili Lembaga Bahasa Nasional.

d. Penerbitan

Dalam rangka penyebarluasan informasi tentang bahasa dan sastra, Lembaga Bahasa Nasional menerbitkan majalah dalam bentuk stensil berjudul *Lembaga* yang disebarakan kepada guru. Majalah tersebut khusus berisi tulisan-tulisan mengenai pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pimpinan umum majalah ini adalah Drs. Lukman Ali, dengan Drs. S. Effendi sebagai ketua redaksinya.

e. Peningkatan Ketenagaan

Dalam rangka peningkatan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan, Lembaga Bahasa Nasional menyelenggarakan penataran dan pemberian kesempatan karyawan belajar, melalui cara berikut. (1) Penataran Leksikografi di Tugu, Bogor pada tanggal 9 Juni--4 Agustus 1974; lima orang peserta penataran terbaik dipilih untuk melanjutkan belajar linguistik leksikografi di Negeri Belanda selama 8 bulan. (2) Pemberian kesempatan kepada para karyawan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan memberikan kesempatan belajar/mengajar, baik di dalam maupun di luar negeri, ikut secara aktif dalam kegiatan seminar, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Nasional maupun oleh instansi lain.

Lembaga Bahasa Nasional kemudian berubah nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam rangka pelaksanaan reorganisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 tahun 1974, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 tahun 1975.

**BAGIAN KEDUA
PUSAT BAHASA**

GERAK DAN LANGKAH PUSAT BAHASA

Kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan Pusat Bahasa mendasar dan menyeluruh dengan melibatkan tokoh dari berbagai kalangan telah dimulai sebelum nama Pusat Bahasa diresmikan. Pada tanggal 28--31 Oktober 1974, misalnya, telah diselenggarakan Praseminar Politik Bahasa Nasional yang merumuskan kerangka dasar kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan. Pada saat itu telah disepakati bahwa kerangka dasar kebijakan bahasa nasional adalah satu kesatuan kebijakan yang dijalin oleh pengolahan tiga kelompok masalah, yaitu (1) masalah pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa Indonesia, (2) masalah pembinaan, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa daerah (terutama bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat pemakainya, serta (3) masalah pemakaian dan pengajaran bahasa asing.

Keputusan Praseminar Politik Bahasa Nasional tersebut segera ditindaklanjuti, yaitu mengisi kerangka dasar kebijakan bahasa nasional itu dengan menyelenggarakan Seminar Politik Bahasa Nasional pada tanggal 25--28 Februari 1974. Seminar itu (1) merencanakan dan merumuskan isi kerangka dasar kebijakan bahasa nasional, (2) merumuskan dan menyusun ketentuan dan garis kebijakan umum mengenai penelitian, kebahasaan, dan pengembangan pengajaran bahasa dan sastra, serta (3) menyusun rencana umum pengembangan kebijakan bahasa nasional.

Dari dua kegiatan seminar yang melibatkan tokoh bahasa dan sastra serta budayawan dan tokoh lain tersebut, makin jelas tampak betapa luas dan besar tugas lembaga yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Maka, sejak 2 April 1975 lembaga yang bertugas menangani masalah kebahasaan dan kesastraan itu ber-

sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 070/0 tahun 1975.

a. Kebijakan Bahasa Nasional

Pada tahun kelahirannya itu juga, Pusat Bahasa mengeluarkan dua pedoman yang amat populer sebagai upaya perubahan bahasa Indonesia. Pertama, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* sebagai pegangan masyarakat bahasa dalam pembakuan sistem tulis bahasa Indonesia. Kedua, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* merupakan panduan dalam pengembangan peristilahan bahasa Indonesia. Gerak dan gema Pusat Bahasa menyusuri seluruh wilayah pembinaan bahasa Indonesia itu berada di bawah pimpinan Prof. Dr. Amran Halim. Apa kata Kepala Pusat Bahasa yang pertama itu? Berikut pandangan yang melandasi pemikirannya dalam memimpin Pusat Bahasa.

PUSAT NASIONAL PENGEMBANGAN BAHASA

Amran Halim

Kepala Pusat Bahasa 1975--1984



Pusat Bahasa merupakan lembaga lanjutan Lembaga Bahasa Nasional. Pusat Bahasa lahir dan bergerak atas dasar tiga pokok pikiran yang utama. Pokok pikiran pertama adalah bahwa masalah kebahasaan di Indonesia merupakan satu jaringan menyeluruh yang dijalin oleh unsur-unsur kebahasaan yang ada di Indonesia, yaitu (1) bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan (bahasa nasional) maupun sebagai bahasa negara, (2) bahasa daerah, dan (3) bahasa asing yang digunakan atau diajarkan di sekolah serta bahasa asing yang digunakan tetapi tidak diajarkan di sekolah. Semua bahasa itu tumbuh dan digunakan di dalam masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kebahasaan yang pada tahun 1970-an disebut Politik Bahasa Nasional. Ini merupakan inti fungsi Pusat Bahasa yang mula-mula direncanakan lahir dengan nama Pusat Nasional Pengembangan Bahasa.

Pokok pikiran yang kedua adalah bahwa yang diperlukan dalam masyarakat Indonesia adalah pembinaan sikap yang positif, sikap yang dapat diandalkan terhadap bahasa Indonesia, sikap yang dapat diandalkan terhadap bahasa daerah, dan sikap terhadap penggunaan bahasa asing di Indonesia. Sikap yang perlu dibina itu adalah sikap yang sejalan dengan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, yaitu sikap yang menempatkan bahasa Indonesia pada kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Indonesia, yang digunakan dengan rasa kebanggaan, rasa keyakinan bahwa bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu. Pada waktu yang sama ia dapat dijadikan alat komunikasi, alat pemerintahan, alat pengembangan perencanaan dan pembangunan, dan alat pengembangan serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap terhadap bahasa daerah juga perlu dibina sesuai dengan amanat Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bahasa yang dihargai oleh masyarakat pemakainya dengan (sekurang-kurangnya) dua cara, yaitu (1) digunakannya dengan rasa bangga dan (2) digunakannya dengan keyakinan bahwa bahasa daerah mempunyai hak hidup karena bahasa daerah adalah penyandang budaya daerah yang terkait erat dengan pengembangan dan kehidupan kebudayaan nasional.

Sikap terhadap penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan Belanda, yang diperlukan adalah sikap yang menentukan bahwa bahasa asing tertentu, seperti bahasa Inggris adalah bahasa asing yang diperlukan untuk komunikasi dengan bangsa-bangsa lain, untuk kepentingan ekonomi, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai sikap terhadap penggunaan bahasa asing itu melebihi kadar kebanggaan dalam sikap penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ini adalah pokok pikiran yang pertama yang melandasi kelahiran dan gerak Pusat Bahasa. Dengan kata lain, di samping pokok pikiran bahwa keseluruhan masalah kebahasaan di Indonesia merupakan satu jaringan, pokok pikiran yang kedua adalah diperlukan pembinaan sikap terhadap bahasa-bahasa itu. Untuk mencapai sarannya, bahasa Indonesia, bahasa daerah tertentu, perlu dikembangkan supaya bahasa Indonesia terutama dapat berfungsi sebagai bahasa pemerintahan, bahasa nasional, dan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi di samping bahasa pendukung sastra sebagai unsur budaya nasional.

Pokok pikiran yang ketiga adalah bahwa jaringan kebahasaan di Indonesia serta pembinaan sikap terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan terhadap penggunaan bahasa asing, serta pengembangan bahasa Indonesia dari sudut kosakata/istilah, misalnya, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, Pusat Bahasa sejak berdiri mengembangkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia kebahasaan dengan menyelenggarakan penataran yang bertahap dan berkelanjutan. Bertahap berarti bahwa penataran itu dilakukan dengan membagi-bagi bidang kebahasaan menjadi, misalnya, bidang sintaksis, morfologi, sosiolinguistik, historis komparatif, dan dialektologi. Berkelanjutan mempunyai pengertian bahwa penataran dilakukan di Indonesia, diprogramkan untuk jangka pendek tiga bulan sampai satu tahun, lalu berkelanjutan dengan pendidikan di luar negeri, yaitu di negeri Belanda.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dimungkinkan karena pada waktu itu diadakan program kerja sama dengan Belanda melalui Universitas Leiden dengan lahirnya *Indonesian Linguistics Development Project (ILDEP)*. Karena masalah bahasa di Indonesia adalah masalah nasional tentu tidaklah mungkin bagi Pusat Bahasa menyediakan semua sumber daya manusia yang diperlukan itu. Oleh karena itu, penataran yang dilaksanakan dialamatkan kepada bukan hanya tenaga teknis Pusat Bahasa melainkan juga tenaga pengajar pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan cara ini Pusat Bahasa memperoleh dua manfaat dari sudut sumber daya manusia. Manfaat yang pertama adalah kualitas tenaga intern Pusat Bahasa sendiri meningkat, sedangkan yang kedua Pusat Bahasa memiliki tenaga yang dapat diharapkan membantu di dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan bahasa di seluruh Indonesia dengan jalan melibatkan tenaga pengajar pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan dengan memberikan penataran khusus yang intensif untuk tenaga teknis Pusat Bahasa sendiri.

Dalam kaitan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya serta pengembangan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya Pusat Bahasa juga bekerja sama dengan memperoleh bantuan dari Pemerintah Belanda dalam bentuk tenaga ahli dan konsultan dari Amerika Serikat,

dan dari Inggris melalui British Council. Tenaga-tenaga dari British Council membantu Pusat Bahasa di dalam pengembangan pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Luasnya bidang garapan yang dipercayakan kepada Pusat Bahasa menuntut adanya kelengkapan adanya Pusat Bahasa yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, Pusat Bahasa disusun dengan struktur yang mencakup bidang-bidang pengembangan bahasa Indonesia, pembinaan sastra Indonesia, bahasa daerah, pengembangan pengajaran bahasa asing, dan perkamusan. Selain itu, Pusat Bahasa juga dibangun dengan kelengkapan utama, yaitu perpustakaan kebahasaan yang lengkap. Kelengkapan buku dan bahan kepustakaan Pusat Bahasa dimungkinkan dengan adanya bantuan dari Yayasan Ford, Amerika Serikat. Selain itu, Pusat Bahasa juga dibangun dengan kelengkapan laboratorium fonetik. Laboratorium fonetik ini dibutuhkan untuk meneliti dan mengembangkan ragam lisan bahasa Indonesia.

Sesuai dengan fungsinya yang menyeluruh itu, Pusat Bahasa mendapat kepercayaan dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk juga bertugas mewakili Indonesia sebagai anggota *Governing Board SEAMEO-RELC* di Singapura dari tahun 1972--1984/1985. Kedudukan ini sangat menguntungkan bagi Pusat Bahasa karena dengan berfungsi sebagai anggota *Governing Board SEAMEO-RELC* di Singapura, Pusat Bahasa mendapat kehormatan dan kepercayaan pula untuk memilih, menyeleksi tenaga kebahasaan, untuk dikirimkan mengikuti program latihan SEAMEO-RELC di Singapura. Yang diseleksi adalah calon-calon dari seluruh Indonesia dari lingkungan Pusat Bahasa sendiri termasuk balai-balainya yang ada di Yogyakarta, Denpasar, dan Ujung Pandang, serta dari lingkungan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Malah SEAMEO-RELC akhirnya juga berkembang dari RELC yang mula-mula merupakan singkatan dari *Regional English Language Centre* berkembang menjadi *Regional Language Centre* dengan mempertahankan singkatannya, yaitu RELC.

Dengan kedudukan seperti itu, Pusat Bahasa memiliki pandangan yang menyeluruh mengenai kebahasaan di seluruh Indonesia. Selain itu, Pusat Bahasa juga memiliki keleluasaan mengembangkan gerak dan usahanya sehingga dengan dukungan berbagai pihak, terutama Menteri Pemuda dan Olahraga, ditetapkan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa

sejak tahun 1980. Dengan demikian, kegiatan kebahasaan menjadi terpusat dalam bulan Oktober di seluruh Indonesia dengan melibatkan bukan hanya Pusat Bahasa beserta perguruan tinggi, melainkan juga lembaga-lembaga daerah mulai dari Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, instansi terkait, seperti sekolah menengah, SLTP dan SMU, baik siswanya maupun para gurunya.

Hal itu sangat menentukan dalam usaha kita memasyarakatkan perlunya sikap terhadap bahasa Indonesia, terhadap bahasa daerah, dan terhadap pemakai bahasa asing itu dibina secara terus-menerus, menyeluruh, dan terpadu. Selain itu, Pusat Bahasa juga memperoleh peluang meyakinkan berbagai pihak bahwa pembentukan istilah perlu dikembangkan secara nasional. Oleh karena itu, pada tahun 1972 sebelum Pusat Bahasa lahir, yaitu pada tahun 1975 dibentuklah Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia yang merupakan lembaga mitra Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia untuk menjalankan kegiatan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Kegiatan ini melibatkan tenaga dari berbagai perguruan tinggi bidang keilmuan. Dengan demikian, tata istilah berbagai ilmu pengetahuan di Indonesia ini telah dikembangkan bukan oleh tenaga Pusat Bahasa sendiri, melainkan juga melalui kerja sama dengan berbagai pihak yang melibatkan berbagai pakar dan mewakili berbagai cabang ilmu pengetahuan.

b. Sarana dan Tenaga Kebahasaan

Upaya ke arah pengembangan dan pembakuan bahasa Indonesia tersebut dilanjutkan pada bidang tata bahasa dan kosakata. Maka, lahir dua sarana pembakuan yang amat penting dalam sejarah ketatabahasaan dan perkamusan Indonesia setelah karya Sutan Takdir Alisjahbana dan W.J.S. Poerwadarminta, yaitu *Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pada tahun 1988. Upaya pengembangan, pembakuan, dan pemasyarakatan bahasa Indonesia serta pelestarian bahasa daerah memerlukan tenaga kebahasaan dan kesastraan yang andal. Untuk itulah, Pusat Bahasa meningkatkan mutu tenaga kerja melalui pendidikan formal pada jenjang magister dan doktor.

Kelahiran dua karya tata bahasa dan kamus serta peningkatan mutu akademik tenaga kebahasaan dan kesastraan, baik di Pusat Bahasa maupun di luar Pusat Bahasa berada di bawah kepemimpinan

Prof. Dr. Anton M. Moeliono. Apa penuturan Kepala Pusat Bahasa yang kedua mengenai itu? Ikutilah pandangan dan pemikirannya dalam uraian berikut.

PERANAN PUSAT BAHASA YANG BERWIBAWA DI MASA MENDATANG

Anton M. Moeliono

Kepala Pusat Bahasa 1984--1989



Setelah Pusat Bahasa berhasil meluncurkan pembakuan ejaan bahasa Indonesia (EYD) pada tahun 1972, lembaga itu sejak 1985 berusaha melanjutkan kegiatan pembakuannya demi kemantapan bahasa Indonesia yang dinamis. Maka pada tahun 1988 diterbitkan edisi pertama *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Buku tata bahasa itu, edisi keduanya diedarkan pada tahun 1993, sedangkan edisi ketiganya

terbit pada tahun 1998 berkenaan dengan Kongres Bahasa Indonesia VII. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* juga dilengkapi dan edisi keduanya diterbitkan pada tahun 1991.

Di dalam periode 1984--1989 di kalangan Pusat Bahasa muncul kesadaran bahwa suatu pusat nasional tidak dapat berwibawa jika sumber daya manusianya tidak ditingkatkan tarafnya. Karena itu, Proyek *Indonesian Linguistik Development Project* (ILDEP) II sebagai lanjutan Proyek ILDEP (1979--1985) dipersiapkan dan dimatangkan.

Sasaran umum program ILDEP II ialah perbaikan infrastruktur di bidang studi bahasa dan susastra yang mencakupi pengembangan sumber daya manusia pada tingkat pascasarjana lewat beasiswa, bimbingan

dan pertemuan ilmiah, serta pengadaan fasilitas penelitian dalam bentuk buku, majalah, dan penerbitan naskah.

Jika diperinci dapat disebutkan ilmu bidang kegiatan yang berikut.

- 1) Penyeliaan dan pembimbingan peserta program pascasarjana di Indonesia dan Nederland.
- 2) Penyelenggaraan penataran dan kursus penyegar tentang berbagai bidang linguistik dan ilmu susastra, serta pengiriman peserta ke berbagai konferensi ilmiah.
- 3) Pengembangan perpustakaan Pusat Bahasa dan ketiga cabangnya lewat pengadaan buku dan majalah, dan pendidikan perpustakaan.
- 4) Penyebaran sumber informasi ilmiah dalam berbagai bentuk seperti penerjemahan telaah bahasa asing, penerbitan disertai pakar Indonesia.
- 5) Perancangan dan pengembangan program otomasi untuk kosakata kamus, buku pedoman dan bahan ajar, serta katalog perpustakaan yang berotomasi.

Peningkatan tenaga kader telah menghasilkan 44 orang doktor yang terdiri atas (1) 8 orang doktor di lingkungan Pusat Bahasa, (2) 12 orang doktor yang berasal dari 7 IKIP, (3) 24 doktor yang berasal dari 10 universitas. Pada tingkat strata₂ telah dihasilkan 29 orang magister yang terdiri atas (1) 20 orang magister di lingkup Pusat Bahasa, (2) 8 orang magister yang berasal dari dua universitas, dan (3) 1 orang magister yang berasal dari Pemerintah Derah Irian Jaya.

Pada tingkat strata₁ telah dihasilkan 11 orang sarjana dari bagian tata usaha dan perpustakaan di Pusat Bahasa.

Di bidang publikasi telah diterbitkan 65 jilid buku, yang masing-masing bertiras antara 1.000--3.000 eksemplar. Selanjutnya dirintis penerbitan Seri Pustaka Pengajaran Bahasa bekerja sama dengan *Regional Language Center SEAMEO* di Singapura. Hingga akhir Proyek ILDEP II dihasilkan lima jilid. Kerja sama dengan *Australian National University*, di Canberra, membuahkan seri *Materials on Languages in Indonesia* yang berjumlah kira-kira 50 jilid buku.

Untuk perpustakaan tersedia dana NF 60.000 untuk pengadaan buku dan majalah. Kira-kira tiga ribu buku dapat ditambahkan pada khazanah perpustakaan pusat dan cabang. Untuk tujuan otomasi dibeli

3 komputer, 2 printer, beserta aksesorinya; untuk katalogisasi dibeli peranti lunak yang diadaptasi untuk kebutuhan perpustakaan sebagaimana dirumuskan oleh Perpustakaan Nasional dan Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia.

Bahasa Indonesia yang menjadi medium pendidikan dan ilmu pengetahuan perlu dimasyarakatkan dan dikembangkan daya ungkangnya. Pemasyarakatan itu bertalian dengan penghapusan keniraksaraan yang masih mendekati 20 persen dari penduduk. Di daerah tertentu dan di antara golongan tertentu keniraksaraan mengendalai dengan jelas pemerataan kesempatan untuk maju. Karena terdapat korelasi antara keniraksaraan dan kemampuan bahasa Indonesia, pembangunan dan pemodernan masyarakat sangat bergantung pada berhasil tidaknya pemasyarakatan bahasa Indonesia, baik dalam ragam tulis maupun ragam lisan.

Peningkatan keefisienan dan keefektifan bahasa Indonesia sebagai wahana pengetahuan dan sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa bertalian dengan pengembangan kosakata teknis dan peristilahan. Jumlah istilah yang beratus ribu yang telah direkacipta harus disalurkan masuk ke sistem pendidikan lewat penerbitan glosarium dan kamus bidang ilmu. Selama istilah hanya terdapat di dalam bank data, kesimpangsiuran pemakaian istilah oleh pakar Indonesia akan berlanjut. Akibatnya, orang akan merasa lebih aman memakai istilah asing.

Di bidang leksikografi makin terasa perlunya penerbitan tesaurus yang dengan cermat dapat memerikan nuansa makna berbagai sinonim dan akronim sehingga lambat-laun dapat dihilangkan prasangka bahwa bahasa Indonesia bahasa yang miskin yang takkan mampu bersaing dengan bahasa modern lain di dunia. Di samping itu, sejumlah bahasa daerah yang jumlah penuturnya di atas satu juta orang menuntut penyusunan buku tata bahasanya yang lengkap dan kamus dwibahasa Indonesia-Daerah dan sebaliknya yang memadai demi tujuan kohesi nasional.

Perkembangan kebudayaan dan peradaban modern di dalam berbagai bidangnya, seperti ilmu, teknologi, dan seni akan dapat diikuti dengan lebih baik jika didukung oleh tersedianya perpustakaan yang terjangkau. Di samping karangan para ahli Indonesia, masih banyak lagi informasi khusus yang tersimpan dalam bahasa asing yang hanya terbuka bagi orang yang memahami bahasa asing itu. Karena itu, di dalam

garis haluan kebijakan kebahasaan untuk masa mendatang usaha penerjemahan harus menempati skala prioritas yang tinggi.

c. Kebijakan Sastra

Gerak dan langkah serta gaung pembinaan dan pengembangan bahasa memang telah menyusuri wilayah republik ini. Berbeda halnya dengan sastra, upaya pemasyarakatan dan apresiasi sastra di kalangan masyarakat luas belum seperti upaya yang telah dilakukan pada pembinaan dan pengembangan bahasa. Maka, gerakan pemasyarakatan sastra mulai digencarkan pada tahun 1989. Bulan Bahasa yang diselenggarakan setiap bulan Oktober sejak 1989 diubah namanya menjadi Bulan Bahasa dan Sastra. Gerak langkah Pusat Bahasa pada pemasyarakatan sastra itu diprakarsai oleh Kepala Pusat Bahasa Drs. Lukman Ali. Apa kata Kepala Pusat Bahasa yang ketiga tentang kebijakan pengembangan sastra di Indonesia. Berikut pandangan Drs. Lukman Ali.

BERAMAH-RAMAHAN DENGAN SASTRA

Lukman Ali

Kepala Pusat Bahasa 1989--1991



Sejak saya masuk ke Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1959, yang pada waktu itu masih bernama Lembaga Bahasa dan Budaya (LBB) dan tak lama kemudian menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK), saya mulai berkenalan dengan apa yang disebut penelitian sastra.

Jangan dianggap studi sastra waktu itu sudah seperti studi sastra sekarang. Kegiatan penelitian terbatas pada pencatatan karya sastra dalam berbagai "genre": roman (novel), sajak, cerpen, dan drama. Bahan-bahan inilah yang dibicarakan, yang hasilnya dapat disebut *analisis*, *resensi* dalam rangka pengenalan karya yang dibicara-

kan kepada pembaca atau peminat sastra. Yang jelas pada waktu itu masyarakat pembaca atau peminat sastra tersebut belum seluas sekarang. Ada kesan seakan-akan publik peminat atau peneliti sastra terbatas pada sedikit orang yang kadang-kadang orangnya hanya itu-itu saja.

Sebagaimana diketahui LBK mempunyai satu bagian yang disebut Bagian Kesusastraan. Tokoh yang pertama bertugas di situ ialah H.B. Jassin, di samping W.J.S. Poerwadarminta di Bagian Perkamusan. Jassin, sebelum masuk ke LBK, sebenarnya sudah banyak menulis dan berbicara tentang sastra. Ia sudah dikenal sebagai kritikus sastra. Begitu masuk ke LBK pada tahun 50-an, ia langsung mengembangkan secara resmi profesinya sebagai kritikus itu. Hal tersebut dijalankannya sejalan dengan tugasnya sebagai dosen Kesusastraan Indonesia Modern di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Mulailah ia menanamkan benih kritik sastra dalam sejumlah kecil mahasiswanya, seperti Bahrum Rangkuti, J.U. Nasution, M. Saleh Saad, Boen S. Oemarjati, M.S. Hutagalung, Lukman Ali, Faizah Rivai, dan sempat pula membimbing beberapa orang dosen FKIP/IKIP Jakarta seperti Fachrudin Ambo Enre, Mbiyo Saleh, dan Brahim. Selanjutnya, jumlah ini berkembang lagi.

Hasil bimbingan Jassin tampak dalam skripsi-skripsi yang dibuat untuk melengkapi tugas dalam rangka ujian Sarjana Muda Sastra dan Sarjana Sastra (sekarang S1). Dengan melalui seleksi beberapa skripsi itu sempat diterbitkan. Penerbit yang berminat kepada penelitian sastra itu terutama ialah PT Gunung Agung. Pada saat itu tampak hubungan kerja sama penelitian sastra antara Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan LBK erat sekali. Di LBK tersimpan dokumentasi sastra, baik milik LBK maupun milik pribadi Jassin yang sengaja dibawa dari rumahnya untuk memudahkan tugasnya sehari-hari, sebagai peneliti dan sebagai dosen. Pada waktu itu dokumentasi sastra Jassin tersebut dapat dikatakan sangat lengkap berupa buku-buku tentang studi sastra, karya sastra, pembicaraan tentang sastra yang banyak termuat dalam surat-surat kabar, majalah ataupun tulisan-tulisan yang sudah atau belum dipublikasikan.

Kemudian, dokumentasi ini (khususnya milik Jassin) dipindahkan ke salah satu bangunan di kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini Raya, Jakarta. Ke Bagian Kesusastraan Modern LBK dan kemudian

juga ke Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin (nama ruangan tempat dokumentasi di Cikini itu) banyak berkunjung sastrawan, budayawan, kritikus, guru, mahasiswa, serta peminat lainnya. Semua ingin melihat dan membaca hal-hal yang mereka perlukan. Ada pula yang datang terutama pengarang kesusastraan, untuk berbincang-bincang tentang berbagai masalah sastra. Perbincangan dilakukan secara santai disertai senyum, tertawa, merengut, mengepulkan asap dari mulut atau lubang hidung. Duduk pun bebas seperti bersila di atas kursi, lutut naik satu atau keduanya sambil seolah-olah berada di ruangan dapur. Apa yang disebut orang *gosip* atau *rumor* (sebagaimana banyak dipakai sekarang) merupakan hidangan lezat, walaupun di ruang itu tidak disediakan kopi atau minuman lainnya. Pokoknya perbualan berlangsung hangat.

Saya masih ingat Bakri Siregar, Sitor Situmorang, Pramoedya Ananta Toer, Trisno Sumardjo, Wiratmo Sukito, Mh. Rustandi Kartakusuma, Iwan Simatupang, Bahrum Rangkuti, Subagio Sastrowardjo, Asrul Sani, Ajip Rosidi, Ramadhan K.H., Aoh K. Hadimadja, Nur Sutan Iskandar, S. Takdir Alisjahbana, dari angkatan yang lebih tua, dan banyak lagi yang lain, di samping juga dari golongan angkatan yang lebih muda, seperti Taufik Ismail, Arief Budiman, Goenawan Mohamad, Mansur Samin, Bur Rasuanto, A. Bastrani Amin, Arifin C. Nur, D.A. Peransi, dan Bokor Hutasuhut. Semuanya terlibat dalam perdebatan hangat sampai bermerah muka dan telinga. Umpamanya, ada beberapa pengarang menuding golongan kritikus yang dianggap hanya sebagai *tukang cencang* yang tidak menemukan hakikat yang sebenarnya setelah sang peneliti membedah karya sastra. Diumpamakan oleh mereka (pengarang), seperti yang dikatakan Goenawan Mohamad, bahwa *kritik sastra* seakan menjadi sinonim dari *pisau bedah* dari *anatomi ciptaan* yang mengingatkan kita pada ruangan tempat para profesor berhadapan dengan calon-calon dokter yang berbicara tentang urat-urat, tentang letak tulang-belulang dari sesosok mayat. Para pengarang selama ini menggusari anggapan seakan-akan hasil sastra itu adalah si mayat yang dibawa ke kamar mayat hanya untuk diperiksa-periksa dan dibedah. Hasil sastra yang digotong ke ruang bedah itu seperti barang yang tak punya napas. Lalu bertanya, "Lho, di mana napasku, di mana napasku? (lihat Lukman Ali [ed.], *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*, Gunung Agung, Jakarta,

1967, hlm. 176). Golongan pengarang yang juga peneliti, seperti H.B. Jassin, tidak menyetujui pandangan itu. Begitulah anggapan pengarang tentang kritikus.

Masalah sejenis timbul lagi dalam *Diskusi Kritik Sastra* 1968, yang juga masih menimbulkan "perang pendapat" antara pengarang dan kritikus, terutama tentang ukuran-ukuran atau metode penilaian karya sastra dengan memanfaatkan teori *Ganzheit*, yaitu "keseluruhan kesan yang hidup tentang suatu karya sastra yang hidup bergerak dalam hati kita berguruh atau bergumam, menari-nari atau tinggal diam sepi" seperti dikatakan oleh Arief Budiman dan Goenawan Mohamad (lihat Lukman Ali [ed.], *Tentang Kritik Sastra, Sebuah Diskusi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1978:4--5).

Masalah kritik sastra ini pun berlanjut terus di kalangan kritikus dan ahli serta peneliti sastra yang akhirnya empat orang dari mereka merumuskan kesamaan pendapat tentang kritik sastra, yaitu M. Saleh Saad, M. S. Hutagalung, Lukman Ali, dan S. Effendi, yang menyatakan bahwa sepatutnya telaah dan kritik sastra hendaknya berorientasi pada karya sastra sebagai suatu totalitas yang dibangun oleh sejumlah unsur intrinsik yang saling berhubungan secara fungsional dalam mengucapakan amanat tertentu. Pendapat ini sebenarnya mulai diungkapkan dalam *Simposium Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia* tahun 1966 dan *Diskusi Kritik Sastra* 1968. Sayang pendapat tersebut belum sempat berkembang. Sementara itu di luar kelompok itu timbul apa yang disebut sebagai *Aliran Rawamangun*. Penamaan itu sebenarnya bukan berasal dari kelompok empat orang tadi (lihat Abdul Rozak Zaidan, dkk., *Kamus Istilah Sastra*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994:25).

Di kalangan luar Pusat Bahasa berkembang pula pembicaraan tentang pendekatan-pendekatan (aliran) kritik sastra formalisme, strukturalisme, *new-criticism*, *post modernisme*, semiotik, dan lain-lain, yang belum tentu relevan dengan kebutuhan studi sastra Indonesia. Aliran-aliran belum dicerna dengan matang, lalu sebagai eksperimen langsung diaplikasi ke dalam penelitian sastra kita. Demikianlah, kegiatan perbincangan kritik sastra ini tidak lepas dari perhatian Pusat Bahasa, bahkan orang-orang Pusat Bahasalah yang memprakarsai sebagian perbincangan kritik itu melalui kerja sama dengan badan atau perseorangan di luar Pusat Bahasa.

Pusat Bahasa telah tergugah secara lebih *intens* untuk meneruskan kegiatan pengisian pengembangan sastra Indonesia, baik dalam bidang teori, kritik, maupun sejarah sastra yang dalam kehidupannya selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Pada setiap kesempatan yang tepat, acara sastra terus ikut serta.

Seperti sudah kita ketahui pula sebagian di antara pengarang mengeluarkan suatu sikap budaya yang terumus dalam *Manifes Kebudayaan* yang merupakan antipode terhadap sikap budaya *Lekra* (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berafiliasi dengan PKI. *Manifes Kebudayaan* menyarankan, antara lain, *kebebasan mencipta*. Dalam hubungan itu tidak dapat penulis lupakan pula bahwa di *Bagian Kesusastraan LBK* naskah *Manifes Kebudayaan* sebelum selesai ditandatangani pernah diperlihatkan H.B. Jassin kepada penulis di samping pengarang lainnya. *Bagian Kesusastraan* yang bertempat di salah satu ruangan atas gedung di Jalan Diponegoro 82, Jakarta (bekas sekolah Kristen sebelumnya) kemudian pindah ke Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, menjadi tempat pertemuan tokoh dalam bidang sastra: teoretikus dan kritikus.

Saya menarik kesimpulan bahwa di sini tampak sastra dimesrai dengan kasih sayang sebagai barang berharga yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai hasil keisengan yang bernada "sok" atau "gengsi-gengsian" agar tidak dilihat sebagai "terbelakang". Bukan pula sebagai *mode* yang bertolak dari kepura-puraan. Akan tetapi, sastra adalah kebutuhan untuk pengayaan batin agar dapat lebih bijaksana menghadapi hidup walaupun hal itu belum pernah terpenuhi secara memuaskan, bahkan boleh dikatakan cenderung hanya berupa *utopia*.

Imbas kecintaan kepada sastra itu, sebagaimana yang diperlihatkan secara implisit oleh para pengarang dan peneliti sastra, dapat memberikan dorongan kepada usaha penanaman apresiasi walaupun belum meluas. Ciptaan yang tidak diiringi dengan apresiasi menjadi terpercil seperti pernah lama kita alami, khususnya dalam kalangan pelajar. Kekurangan dalam kemampuan mengapresiasi itulah yang amat dirasakan oleh Pusat Bahasa. Oleh karena itu, dalam kegiatan *Bulan Bahasa* yang diadakan sekali setahun, sejak tahun 1980, acara sastra diisi antara lain dengan kegiatan sayembara mengarang cerpen dan esei, sayembara pementasan drama, dialog pelajar dengan pengarang, dan cerdas-cermat

sastra dalam hubungannya dengan penumbuhan apresiasi sastra. Acara ini mendapat perhatian penuh, baik oleh pihak pengarang sebagai ciptawan maupun oleh pelajar, pencinta, pemerhati, dan peneliti.

Dari tahun ke tahun acara tersebut tetap berlangsung dan berkembang sehingga nama *Bulan Bahasa* sebagai salah satu kegiatan sastra dalam rangka peringatan *Sumpah Pemuda*, dilengkapi dengan kata *Sastra*. Terjadilah nama kegiatan baru atau kegiatan lama yang diperbaharui: *Bulan Bahasa dan Sastra* mulai tahun 1989 sehingga kegiatan sastra terwadahi secara jelas, tidak hanya *embel-embel* saja di samping kegiatan bahasa.

Dalam bidang penelitian sastra kegiatan berlangsung lancar khususnya yang disalurkan melalui kegiatan proyek, yaitu Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah (Pusat). Hasil-hasil proyek tersebut telah banyak yang diterbitkan. Hal itu menunjukkan bahwa Pusat Bahasa secara berkelanjutan terus melakukan penelitian serta pengembangan sastra.

Demikianlah catatan sekitar kegiatan sastra di Pusat Bahasa mulai dari LBB sampai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sekarang ini. Banyak lagi yang perlu dimasukkan dalam catatan ringkas ini, tetapi untuk buku ini tentu perlu ada pembatasan-pembatasan.

d. Pemasarakatan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Pusat Bahasa menyadari seperlunya bahwa tugas pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan penertiban penggunaan bahasa asing tidak dapat dilakukan oleh Pusat Bahasa sendiri. Maka, Pusat Bahasa melanjutkan, meningkatkan, dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam rangka pemasarakatan bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah daerah Pusat Bahasa mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia. Kebijakan penertiban bahasa di tempat-tempat umum dan penancangan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh Presiden Republik Indonesia 20 Mei 1985 merupakan langkah strategis pemasarakatan bahasa Indonesia secara baik dan benar ke segala lapisan masyarakat. Gerakan kesadaran disiplin dalam berbahasa Indonesia itu merupakan kebijakan Dr. Hasan Alwi sebagai Kepala Pusat Bahasa

yang keempat. Apa kata Dr. Hasan Alwi mengenai kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa? Inilah penuturannya.

KERJA SAMA KEBAHASAAN DENGAN PEMDA

Hasan Alwi

Kepala Pusat Bahasa 1991-sekarang



Rumusan tentang pembinaan bahasa Indonesia dari GBHN yang satu ke GBHN berikutnya memperlihatkan adanya peningkatan; mulai dari pentingnya pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sampai pada perlu ditingkatkannya upaya pemasyarakatannya sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat. Pada satu sisi, rumusan tersebut amat melegakan hati karena menggam-

barkan tekad dan kemauan politik yang kuat untuk menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (menurut butir ketiga Sumpah Pemuda 1928) dan bahasa negara (sejalan dengan Pasal 36 UUD 1945) dalam kedudukannya yang kukuh dan mantap. Akan tetapi, pada sisi yang lain rumusan itu juga membersitkan rasa khawatir: apakah Pusat Bahasa siap dan mampu melaksanakan amanat yang terkandung di dalam rumusan tersebut?

Pusat Bahasa memang merupakan instansi Pemerintah yang ditugasi merencanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang secara khusus berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Namun, kekhawatiran yang dimaksudkan di atas tetap mencemaskan, terutama karena amat terbatasnya jumlah tenaga kebahasaan di Pusat Bahasa dan di ketiga balai bahasa yang ada (di Yogyakarta, Makassar, dan Denpasar) untuk melaksanakan kegiatan pembinaan yang sarasannya diharapkan mencapai seluruh lapisan masyarakat itu.

Berkat adanya instruksi dari dua orang menteri, kekhawatiran dan kecemasan itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Yang pertama adalah instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1991 tentang Pemasyara-

katan Bahasa Indonesia dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; ditujukan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II, Walikota/kepala, dan Camat Kepala Wilayah di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1992 tentang Peningkatan Usaha Pemasarakatan Bahasa Indonesia dalam Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, ditujukan kepada Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Kedua instruksi tersebut dijadikan bahan pertimbangan utama dalam menyampaikan ajakan kepada para gubernur untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan pembinaan bahasa di propinsi masing-masing. Hasilnya benar-benar sangat membesarkan hati. Pusat Bahasa berhasil menandatangani piagam kerja sama dengan 26 gubernur kepala daerah tingkat I di seluruh Indonesia. (Kerja sama dengan Pemda DKI Jakarta telah disepakati pada tanggal 18 Februari 1989, sebelum ada kedua instruksi menteri tersebut.)

Ada tiga butir kegiatan yang dicantumkan di dalam piagam kerja sama itu. Pertama, pelaksanaan penyuluhan sebagai bentuk pemsarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, penertiban pemakaian bahasa asing di tempat umum. Ketiga, bantuan atau dukungan pihak pemda kepada Pusat Bahasa dalam rangka mendirikan balai penelitian bahasa di provinsi yang bersangkutan. Kegiatan yang disebutkan pertama boleh dikatakan cukup intensif dilaksanakan, sekali dalam setahun. Untuk itu, setiap tahun Pusat Bahasa menyelenggarakan penataran penyuluhan untuk menambah jumlah tenaga penyuluh di setiap provinsi. Peserta penataran itu adalah para dosen perguruan tinggi yang mewakili provinsinya. Kegiatan kedua, yaitu penertiban pemakaian bahasa asing di tempat umum, di dalam pelaksanaannya bahkan melibatkan wakil-wakil dari departemen yang lain (di luar Depdikbud dan Depdagri), yaitu Deppen, Depkeh, Deparpostel, dan Kantor Menpera. Demikian pula halnya dengan kegiatan ketiga yang pada saat ini tengah diupayakan pengusulan pendirian balai penelitian bahasa di enam provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Irian Jaya, Jawa Barat, dan Jawa Timur).

Dalam rangka kerja sama dengan Pemda Tingkat I itu, di setiap provinsi Pusat bahasa memiliki semacam "perwakilan" yang disebut

Koordinator Pemasyarakatan Bahasa Indonesia. Perencanaan dan evaluasi terhadap kegiatan kerja sama dengan pemda itu dilakukan dalam suatu rapat koordinasi yang diadakan setahun sekali. Selain dihadiri oleh peserta dari Pusat Bahasa, rapat koordinasi itu dihadiri pula oleh wakil Pemda Tingkat I dan koordinator pemasyarakatan bahasa Indonesia dari setiap provinsi. Dengan demikian, dapatlah diharapkan bahwa kerja sama antara Pusat Bahasa dan seluruh Pemda Tingkat I di seluruh Indonesia itu akan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terencana sehingga pada suatu saat nanti, entah kapan, pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat.

ORGANISASI PUSAT BAHASA

a. Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 079/O Tahun 1975, yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222g/O/1980, Pusat Bahasa ditetapkan sebagai pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Bahasa dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Sejak 1975 hingga kini kepala Pusat Bahasa, secara berturut-turut ialah Prof. Dr. Amran Halim (1975--1984), Prof. Dr. Anton M. Moeliono (1984--1989), Drs. Lukman Ali (1989--1991), dan Dr. Hasan Alwi (1991--sekarang).

b. Tugas dan Fungsi

Pusat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Pusat Bahasa mempunyai fungsi sebagai (1) perumus kebijakan Menteri dan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bahasa; (2) pelaksana penelitian dan pengembangan bahasa, serta pembina unit pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah; dan (3) pelaksana urusan tata usaha Pusat.

c. Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0218/0/1990, tanggal 3 April 1990, ditetapkan perincian tugas bagian, subbagian, dan bidang di lingkungan Pusat Bahasa. Pusat Bahasa terdiri

atas (1) Bagian Tata Usaha, (2) Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, (3) Bidang Sastra Indonesia dan Daerah, (4) Bidang Perkamusan dan Peristilahan, dan (5) Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Bagian Tata Usaha

Bagian ini mempunyai tugas memberikan layanan administrasi kepada semua satuan organisasi di lingkungan Pusat. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai (a) pelaksana dalam urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga; (b) pelaksana dalam urusan kepegawaian; dan (c) pelaksana dalam urusan keuangan.

Kepala Bagian Tata usaha, secara berturut-turut ialah Maman Sumantri (1975--1984), Drs. Koentamadi (1984--1986), dan Drs. Hasjmi Dini (1985--sekarang).



Drs. Hasjmi Dini

Bagian Tata Usaha bertugas (1) menyusun program kerja tahunan Bagian dan mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Pusat; (2) mempersiapkan rancangan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra; (3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data; (4) melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan di lingkungan Pusat; (5) melaksanakan urusan penyelenggaraan rapat dinas; (6) melaksanakan urusan perlengkapan; (7) melaksanakan urusan kerumahtanggaan; (8) melaksanakan urusan kepegawaian; (9) melaksanakan urusan keuangan; (10) melaksanakan urusan pengembangan ketatausahaan; (11) melaksanakan pemantauan pelaksanaan perencanaan dan program kerja; (12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Pusat.

Bagian ini terdiri atas (1) Subbagian Urusan Dalam, (2) Subbagian Kepegawaian, dan (3) Subbagian Keuangan, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

Subbagian Urusan Dalam bertugas (1) menyusun rencana dan program kerja tahunan serta mempersiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan Pusat; (2) melakukan urusan surat-menyurat; (3) melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi; (4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; (5) melakukan urusan barang perlengkapan; (6) melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor; (7) melakukan urusan keprotokolan, penerimaan tamu, dan upacara; (8) melakukan urusan kerumahtanggaan dan perawatan kantor; (9) mengatur penggunaan, perawatan, dan perbaikan kendaraan dinas; (10) melakukan urusan penyusunan risalah rapat dinas Pusat; (11) melakukan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (12) menyusun laporan pelaksanaan kerja, mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bagian, dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan Pusat.

Subbagian Kepegawaian bertugas (1) menyusun program kerja tahunan; (2) menyusun formasi pegawai; (3) mempersiapkan pengusulan mutasi pegawai; (4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; (5) mempersiapkan usaha pengembangan pegawai; (6) mempersiapkan ujian dinas pegawai golongan I, II, dan III di lingkungan Pusat; (7) mempersiapkan usaha peningkatan disiplin pegawai; (8) melakukan urusan registrasi kepegawaian; (9) melakukan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai; (10) mengurus cuti pegawai; (11) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan kepegawaian; (12) melakukan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja.

Subbagian Keuangan bertugas (1) menyusun program kerja tahunan; (2) menyusun usul rencana anggaran rutin dan pembangunan; (3) menyusun rencana penggunaan anggaran; (4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; (5) mempersiapkan usul permintaan UUDP dan mengurus penyelesaiannya; (6) melakukan tata usaha pengurusan keuangan; (7) mempersiapkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; (8) melakukan tata usaha perjalanan dinas; (9) melakukan pengurusan gaji, uang lembur, dan honorarium pegawai; (10) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan keuangan; (11) mela

kukan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (12) menyusun laporan.

Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah serta pengajaran bahasa. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah mempunyai fungsi (a) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa, serta (b) mempersiapkan pembakuan bahasa Indonesia dan daerah.

Kepala Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, secara berturut-turut dijabat oleh Drs. S. Effendi (1975--1990), Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil. (1990--1992), Dr. Yayah B. Lumintintang (1992--sekarang).



Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah bertugas (1) menyusun rencana kegiatan tahunan; (2) menyusun rencana kegiatan mengenai pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah; (3) meneliti berbagai aspek bahasa Indonesia untuk pembakuan; (4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; (5) menyusun bahan pemyasyarakatan bahasa Indonesia baku; (6) memantapkan sarana pengembangan bahasa Indonesia; (7) memantapkan

sarana pengembangan bahasa daerah; (8) memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia; (9) memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa daerah; dan (10) menyusun laporan tahunan.

Bidang Sastra Indonesia dan Daerah

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra Indonesia dan daerah serta pengajaran sastra. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Sastra Indonesia dan Daerah mempunyai fungsi (a) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra, serta (b) melakukan pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra.

Kepala Bidang Sastra Indonesia dan Daerah, berturut-turut dijabat oleh Drs. Lukman Ali (1975--1980), Dra. Sri Timur Suratman (1980--1985), Dra. Anita K. Rustapa (1980--1991), Dr. Edwar Djamaris (1991--1997), Drs. Abdul Rozak Zaidan, M. Hum. (1997--sekarang).



Drs. A. Rozak Z., M.A.

Bidang Sastra Indonesia dan Daerah bertugas (1) menyusun program kerja tahunan; (2) menelaah sastra lama; (3) menyusun karya tulis sastra lama; (4) mengumpulkan dan mengolah data; (5) menelaah sastra modern; (6) menyusun karya tulis sastra modern; (7) menilai karya sastra; (8) menerjemahkan karya sastra; (9) menyediakan sarana pembinaan tenaga kesastraan; (10) menyediakan informasi kesastraan; (11) menyediakan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan sastra Indonesia dan daerah; (12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja.

Bidang Perkamusan dan Peristilahan

Bidang Perkamusan dan Peristilahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan kosakata dan istilah untuk kepentingan perkamusan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, bidang ini mempunyai fungsi (a) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis perkamusan dan peristilahan, serta (b) melakukan pembinaan, penelitian, dan pengembangan perkamusan dan peristilahan, antara lain penyusunan kamus dan ensiklopedi.



Dr. Dendy Sugono

Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan, berturut-turut adalah Dra. Sri Sukei Adiwimarta (1975--1987), Drs. Adi Sunaryo (1987--1990), Dr. Hasan Alwi (1990--1992), Dr. Hans Lapoliwa, M. Phil. (1992--1994), Dr. Dendy Sugono (1994--sekarang).

Bidang Perkamusan dan Peristilahan bertugas (1) menyusun rencana dan program kerja tahunan; (2) meneliti dan mengodifikasi khazanah kebahasaan dalam usaha menyusun kamus ekabahasa, baik untuk keperluan kamus umum maupun kamus khusus, kamus dwibahasa, ensiklopedi, dan tesaurus; (3) menyediakan layanan dan informasi bagi masyarakat dalam bidang leksikografi; (4) mengumpulkan dan mengolah data; (5) menyediakan sarana pengembangan kosakata (termasuk istilah) bahasa Indonesia dan daerah; (6) menyediakan sarana pengembangan peristilahan yang mencakup berbagai bidang ilmu; (7) mengelola dan melaksanakan kerja sama kebahasaan, khususnya peristilahan, dalam usaha penyelarasan dan pembakuan; (8) memantau dan mengevaluasi pengembangan kosakata (termasuk istilah) bahasa Indonesia dan daerah; (9) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan perkamusan dan peristilahan; (10) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (11) menyusun laporan pelaksanaan program kerja.

Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing, serta pengadaan perpustakaan sebagai sarana pengembangan kebahasaan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah mempunyai fungsi (a) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis dan bahan informasi pengembangan bahasa dan sastra; (b) melakukan pengembangan bahasa dan sastra; (c) memilih karya sastra untuk diterjemahkan; dan (d) menerbitkan hasil penelitian.



Drs. Adi Sunaryo, M.Hum.

Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra, berturut-turut adalah Dra. S.W. Rujjati Mulyadi (1975--1978), A. Latief, M.A. (1978--1987), Drs. Zulkarnain (1987--1990), Dr. Nafron Hasjim (1990--1996), Drs. Adi Sunaryo, M.Hum. (1996--sekarang).

Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas (1) menyusun program kerja tahunan; (2) melaksanakan kegi-

atan penyuluhan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung; (3) mengembangkan bahan penyuluhan bahasa dan sastra; (4) mengumpulkan dan mengolah data; (5) membina hubungan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan instansi lain, organisasi profesi, dan jaringan komunikasi informasi kebahasaan dan kesastraan di dalam dan di luar negeri; (6) mengurus dan membina perpustakaan sebagai pusat pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan; (7) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan bahasa dan sastra; (8) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (9) menyusun laporan pelaksanaan program kerja.

Satuan Kerja Perpustakaan

Satuan Kerja Perpustakaan atau Perpustakaan Pusat Bahasa merupakan satuan kerja Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra yang mempunyai tugas (1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan pustaka kebahasaan dan kesastraan untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra; (2) penyediaan fasilitas layanan informasi pustaka kebahasaan dan kesastraan dalam bentuk penyediaan pangkalan data kebahasaan, penerbitan guntingan surat kabar, dan penyusunan abstrak, indeks dan bibliografi; (3) pengupayaan kerja sama dengan lembaga kebahasaan dan keperpustakaan, dalam dan luar negeri, untuk peningkatan mutu pengelolaan perpustakaan.

Jumlah koleksi secara keseluruhan hingga April 1998 adalah 100.437 jilid, yang terdiri atas 70.316 judul. Koleksi kebahasaan dan kesastraan merupakan koleksi terbesar, yaitu 70% dari keseluruhan koleksi. Bentuk koleksi meliputi bahan tercetak (buku, majalah, atlas, dan surat kabar) dan bahan tak tercetak (mikrofilm, mikrofilmis, kaset suara, kaset video, pita suara, dan foto).



Dra. Jumariam, M.Ed.

Sejak berdirinya, mulai dari ITCO hingga Pusat Bahasa, perpustakaan ini dikepalai oleh Dr. E.M.A.A.J.A. Allard (1947), Drs. Husein Widjajakusumah (1952), Sulastri Soerjoatmodjo dan Drs. Munawar (1966), Dra. Ipon Sukarsih Purawijaya (1969--1984), Dra. Jumariam, M.Ed. (1985--sekarang).

Unit Pelaksana Teknis

Pusat Bahasa mempunyai tiga unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, yaitu (1) Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta, (2) Balai Penelitian Bahasa di Denpasar, dan (3) Balai Penelitian Bahasa di Makassar. Balai-balai penelitian bahasa tersebut mempunyai tugas melaksanakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di daerahnya masing-masing. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Balai Penelitian Bahasa mempunyai fungsi (a) melaksanakan penelitian bahasa, terutama bahasa daerah; (b) melaksanakan penelitian sastra, terutama sastra daerah, dan (c) melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Balai. Organisasi Balai Penelitian Bahasa terdiri atas (1) Kepala Balai, (2) Subbagian Tata Usaha, (3) Tenaga Peneliti, serta (4) Perpustakaan dan Dokumentasi.



Drs. Suwadji



Drs. I Nyoman S., M.Hum.



Drs. Zainuddin H., M.Hum.

Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta dipimpin, secara berturut-turut, oleh Tardjan Hadidjaja (1952--1960), Tardjosusastro (1960--1969), Drs. Mudjanattistomo (1969--1976), Dr. Soepomo Poedjosoedarmo (1976--1977), Drs. Mudjanattistomo (1977--1978), Dra. Wedhawati (1978--1983), Prof. Drs. M. Ramlan (1983--1987), Dr. Sudaryanto (1987--1991), Drs. Suwadji (1991--sekarang).

Balai Penelitian Bahasa Denpasar, secara berturut-turut, dipimpin oleh Dr. G. Goris (1947--1958), Drs. Soewito Santoso (1958--1963), Drs. Made Djendra (1963--1973), Drs. I Gusti Ngurah Bagus (1973--1992), dan Drs. I Nyoman Sulaga (1992--sekarang).

Balai Penelitian Bahasa Makassar, secara berturut-turut, dipimpin oleh Drs. G.S. Wolhoff (1953--1956), Dr. H. Goris (1957), Abdurahim (1958--1960), A. Yenriadji (1961--1963), Muhammad Noer (1964--1965), Ahmad Rahman (1966--1976), Drs. J.F. Pattiasina, M.Sc. (1977--1989), Drs. Abdul

Muthalib (1989--1996), dan Drs. Zainuddin Hakim, M.Hum.(1996--sekarang).



Balai Bahasa Penelitian Bahasa Yogyakarta

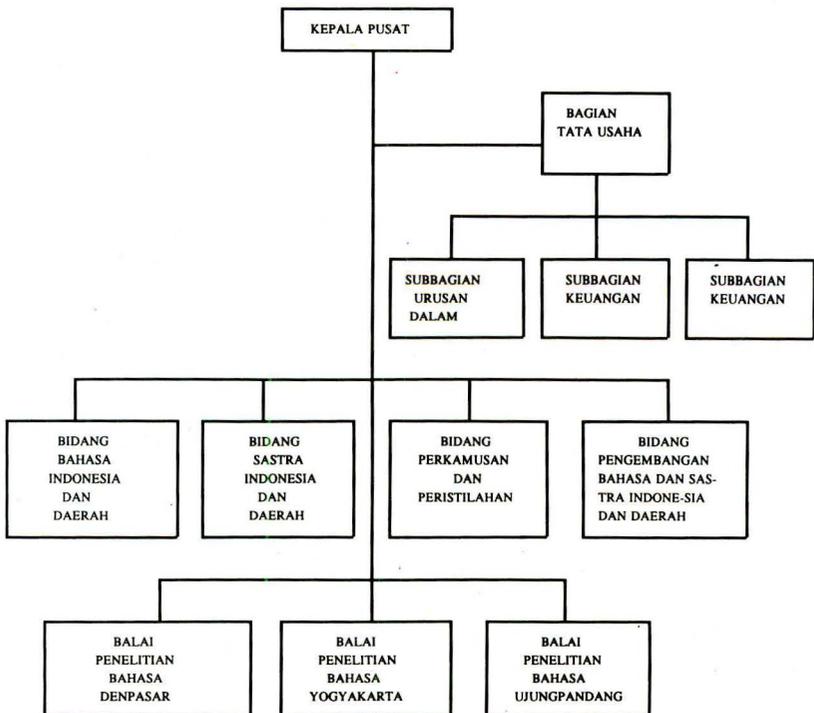


Balai Bahasa Penelitian Bahasa Yogyakarta



Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang

STRUKTUR ORGANISASI



d. Pengembangan Organisasi

Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14/U/1984 tanggal 26 Oktober 1984, yang menyatakan bahwa Kepala Pusat Bahasa dapat mengusulkan penyempurnaan struktur organisasi yang memadai, langkah awal dalam hubungan itu adalah pembentukan sejumlah satuan kerja yang disesuaikan dengan ruang lingkup kerja serta tenaga yang ada di Pusat Bahasa. Pada saat ini jumlah satuan kerja yang ada adalah (1) Satuan Kerja Bahasa Indonesia, (2) Satuan Kerja Bahasa Daerah, (3) Satuan Kerja Bina Sastra, (4) Satuan Kerja Sastra Lama, (5) Satuan Kerja Sastra Modern, (6) Satuan Kerja Perkamusan, (7) Satuan Kerja Peristilahan, (8) Satuan Kerja Penyuluhan, (9) Satuan Kerja Pembimbingan, (10) Satuan Kerja Perpustakaan dan Dokumentasi

Setiap satuan kerja itu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala bidangnya masing-masing.

Nama Balai Penelitian Bahasa diusulkan agar diubah menjadi Balai Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sehingga pembinaan dan pengembangan bahasa di daerah berada di bawah koordinasi Balai Bahasa. Mulai tahun 1989/1990, ditetapkan wilayah kerja Balai Bahasa agar seluruh kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan dapat terkoordinasi dan terencana dengan lebih baik. Wilayah kerja itu tergambar pada tabel berikut.

WILAYAH KERJA BALAI BAHASA

No.	Balai Bahasa	Wilayah Kerja
1.	Yogyakarta	1. DI Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur
2.	Denpasar	1. Bali 2. Nusa Tenggara Barat
3.	Ujungpandang	1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara

No.	Balai Bahasa	Wilayah Kerja
4.	Padang (dalam proses pendirian)	1. DI Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Selatan 4. Sumatera Barat 5. Bengkulu 6. Riau 7. Lampung
5.	Bandung (dalam proses pendirian)	Jawa Barat
6.	Banjarmasin (dalam proses pendirian)	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Barat 4. Kalimantan Timur
7.	Kupang (dalam proses pendirian)	1. Nusa Tenggara Timur 2. Timor Timur
8.	Irian Jaya (dalam proses pendirian)	1. Irian Jaya 2. Maluku

e. Pengembangan Ketenagaan

Salah satu faktor penunjang kelancaran dan keberhasilan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah adalah tersedianya tenaga ahli yang profesional. Dalam kaitan itu, kebijakan yang dilakukan dalam bidang ketenagaan selama ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kebahasaan dan kesastraan.

Peningkatan Kuantitas

Dalam upaya peningkatan kuantitas tenaga kebahasaan dan kesastraan baik di pusat maupun di daerah, Pusat Bahasa secara bertahap meningkatkan jumlah pegawainya. Jumlah tenaga Pusat Bahasa berdasarkan pendidikan formalnya dapat dilihat pada tabel berikut.

JUMLAH TENAGA

No.	Organisasi	Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	SM	S1	S2	S3	
1	Pusat Bahasa	10	8	60	10	130	22	7	247
2	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta	4	1	27	2	27	3	1	62
3	Balai Penelitian Bahasa Denpasar	1	-	15	1	28	6	-	51
4	Balai Penelitian Bahasa Makassar	1	2	17	3	20	4	-	47

Peningkatan Kualitas

Secara bertahap Pusat Bahasa berusaha meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pendidikan Formal

Pusat Bahasa bekerja sama dengan ILDEP memberikan beasiswa kepada tenaga Pusat Bahasa, termasuk Balai Penelitian Bahasa, untuk mengikuti pendidikan formal pada tingkat pascasarjana.

Hasil yang dicapai selama kurun waktu tahun 1988--1992 tampak pada gambaran tabel berikut.

PENDIDIKAN PASCASARJANA

No.	Instansi	Program		Ket.
		S2	S3	
1.	Pusat Bahasa	5	3	
2.	Balai Penelitian Bahasa	5	2	
3.	Perguruan Tinggi	3	15	

Sejak tahun 1993 beasiswa pendidikan S2 dan S3 dibiayai sendiri oleh anggaran rutin Pusat Bahasa. Hasil yang diperoleh seperti tampak pada tabel berikut.

PENDIDIKAN S2

No.	Instansi	Yang sudah selesai	Yang sedang mengikuti pendidikan	Keterangan
1	Pusat Bahasa	22	8	
2	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta	3	6	
3	Balai Penelitian Bahasa Denpasar	6	5	
4	Balai Penelitian Bahasa Makassar	4	1	

PENDIDIKAN S3

No.	Instansi	Yang sudah selesai	Yang sedang mengikuti pendidikan	Keterangan
1	Pusat Bahasa	7	1	
2	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta	1	-	
3	Balai Penelitian Bahasa Denpasar	-	-	
4	Balai Penelitian Bahasa Makassar	-	1	

Pendidikan Nonformal

Kerjasama Pusat Bahasa dengan ILDEP telah melaksanakan pendidikan lanjutan melalui program ILDEP I dan ILDEP II pada tahun 1974--1998. Kegiatan serta hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

PENATARAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN KERJA SAMA DENGAN ILDEP

No.	Jenis Penataran	Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V		Keterangan
		Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	
1.	Leksikografi	1974	30	1975	20	1975	15	1976	15	1977	5	16 orang telah menyelesaikan program doktor
2.	Sosiolinguistik	1975	30	1976	20	1976	15	1977	15	1978	5	
3.	Dialektologi	1976	30	1977	20	1977	15	1978	15	1979	5	
4.	Penerjemahan	1977	30	1978	20	1978	15	1979	15	1980	5	
5.	Sastra	1978	30	1979	20	1979	15	1980	15	1981	5	
6.	Morfologi Sintaksis	1979	30	1980	20	1980	15	1981	15	1982	5	
7.	Linguistik Historis Komparatif	1980	30	1981	20	1981	15	1982	15	1983	5	

PENATARAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN PASCA ILDEP

No.	Jenis Penataran	Tahap I		Tahap II		Tahap III	
		Tahun	Peserta	Tahun	Peserta	Tahun	Peserta
1.	Linguistik Umum I	1981	30	1982	30	1982	15
2.	Linguistik Umum II	1982	30	1983	30	1983	17
3.	Sastra Angkatan I	1983	30	1984	30	1984	17
4.	Linguistik Umum III (Leksikografi)	1984	30	1985	30	1985	30
5.	Sastra Angkatan II	1985	30	1986	30	-	-
6.	Penyuntingan: a. Angkatan I dan II b. Angkatan III dan IV	1982 1984	30 40	1983 1985	40 30	- -	- -
7.	Penyuluhan: Angkatan I, II, III	1987	30	1988	30	1989	30

Partisipasi dalam Pertemuan Kebahasaan dan Kesastraan

Di samping pendidikan dan pelatihan, Pusat Bahasa juga memberikan kesempatan kepada karyawannya turut serta dalam berbagai pertemuan kebahasaan dan kesastraan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Melalui kegiatan ini diharapkan para karyawan dapat memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan dan keahliannya dalam rangka peningkatan kualitas tenaga Pusat Bahasa pada umumnya.

KEGIATAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

a. Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan sebagai upaya untuk: (1) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia yang memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia modern dalam berbagai aspek, seperti aspek politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan; (2) melestarikan bahasa dan sastra daerah sebagai warisan budaya bangsa serta memanfaatkannya sebagai sumber dalam pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Untuk kegiatan penelitian bahasa dan sastra tersebut, beberapa langkah kebijakan ditetapkan, antara lain kebijakan dalam (1) meningkatkan usaha penelitian berbagai aspek bahasa untuk keperluan pembakuannya; (2) meningkatkan usaha penelitian karya sastra Indonesia; (3) meningkatkan usaha inventarisasi bahasa daerah dengan mengutamakan bahasa yang terancam punah; dan (4) meningkatkan usaha penyusunan tata bahasa dan kamus bahasa daerah. Untuk melaksanakan kegiatan ini Pusat Bahasa bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun pemerintah. Penelitian dilakukan terhadap semua aspek bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Bahasa dan Sastra Indonesia

Penelitian bahasa dan sastra Indonesia yang dilaksanakan Pusat Bahasa semasa kurun waktu antara 1977 hingga tahun 1998 berjumlah 655 topik, yang terdiri atas 472 aspek penelitian kebahasaan dan 182 topik penelitian kesastraan. Materi penelitian meliputi berbagai topik kebahasaan dan kesastraan Indonesia, antara lain, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia, tata bahasa, pengajaran sastra Indonesia, dan apresiasi sastra. Data mengenai penelitian bahasa dan sastra Indonesia itu dapat dilihat pada *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1975--1993*.



Hasil kegiatan penelitian kebahasaan

Bahasa dan Sastra Daerah

Penelitian bahasa dan sastra daerah pada umumnya dilaksanakan oleh tenaga peneliti daerah di bawah koordinasi Pusat Bahasa. Selama kurun waktu 1975--1998 telah diteliti 241 bahasa daerah (dialek) di wilayah Indonesia yang meliputi 1.647 topik penelitian bahasa dan sastra, yang terdiri atas penelitian bahasa sebanyak 1.183 topik, dan penelitian sastra sebanyak 464 topik.

b. Penyusunan dan Pembakuan

Kegiatan penyusunan bahan kebahasaan meliputi pembuatan naskah: (1) pedoman kebahasaan seperti ejaan dan istilah; (2) pembakuan, seperti kamus dan tata bahasa; (3) bahan penyuluhan bahasa; (4) acuan kebahasaan, seperti bibliografi kebahasaan, dan (5) buku sastra Indonesia dan daerah. Selama kurun waktu 1975--1997 tercatat 379 judul karya penyusunan dan pembakuan telah diterbitkan, yang terdiri atas 7 judul kamus ekabahasa, 104 judul kamus dwibahasa (bahasa Indonesia-bahasa daerah dan sebaliknya), 117 judul kamus bidang ilmu, 27 judul daftar istilah komprehensif, 29 judul tata bahasa (bahasa

Indonesia dan bahasa daerah), 17 judul bahan penyuluhan, 33 judul buku pedoman/panduan, 1 judul tesaurus, 2 judul buku pintar bahasa dan sastra, 1 judul ensiklopedi sastra, 1 judul sejarah sastra, dan 42 judul buku informasi kepustakaan bahasa dan sastra.



Gambar kegiatan penyusunan dan pembakuan

c. Penerjemahan

Kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra juga dilaksanakan melalui upaya penerjemahan atas buku-buku dan artikel kebahasaan dan kesastraan. Kegiatan itu bertujuan, antara lain, memperkaya khazanah terbitan keilmuan dalam bidang bahasa dan sastra, serta meningkatkan kualitas tenaga kebahasaan dan kesastraan melalui bacaan yang berupa hasil terjemahan tersebut.

Pusat Bahasa melaksanakan kegiatan penerjemahan dengan penekanan pada buku-buku ilmiah berbahasa lain, seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. Kegiatan penerjemahan, selain dilaksanakan oleh Pusat Bahasa sendiri, juga dilakukan atas kerja sama dengan Proyek ILDEP II, Universitas Leiden, Belanda.



*Lokakarya penerjemahan film dan televisi
Jakarta, 31 Juli 1996*

Dalam upaya penerjemahan itu, Pusat Bahasa telah menerbitkan hasil penerjemahan sebanyak 67 judul, termasuk hasil terjemahan Proyek ILDEP.

d. Pertemuan

Pertemuan merupakan sarana yang disediakan Pusat Bahasa bagi kelompok masyarakat pakar bahasa dan sastra serta pakar bidang lain, untuk memperoleh masukan yang berupa aspirasi dan gagasan bagi pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya, serta bahasa dan sastra daerah pada umumnya. Masukan tersebut pada gilirannya dapat dimanfaatkan Pusat Bahasa dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan semua aspek kebahasaan nasional. Pertemuan tidak hanya membahas masalah kebahasaan nasional, tetapi juga membahas masalah yang menyangkut bahasa di negara-negara serumpun dan bahasa-bahasa Asia pada umumnya.



*Seminar Meningkatkan Mutu Sulih Suara
24 Juni 1996*

Kegiatan pertemuan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, lokakarya, konferensi, atau kongres, baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Pusat Bahasa menyelenggarakan kegiatan pertemuan bekerja sama dengan organisasi dan instansi lain atau dilaksanakan sendiri. Selama kurun waktu 1975--1998 telah dilaksanakan sebanyak 115 pertemuan, yang terdiri atas 112 pertemuan tingkat lokal dan nasional, dan 3 pertemuan tingkat internasional. Pertemuan tingkat nasional yang patut dicatat adalah *Praseminar/Seminar Politik Bahasa Nasional* (1975) dan *Kongres Bahasa Indonesia* (1978, 1983, 1988, 1993, 1998), sedangkan pertemuan tingkat internasional adalah *ASANAL III* (1975), *ASANAL V* (1980), dan *TICAL* (1981). Perincian data pertemuan itu dapat disimak dalam *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1975--1993*.

Kongres Bahasa

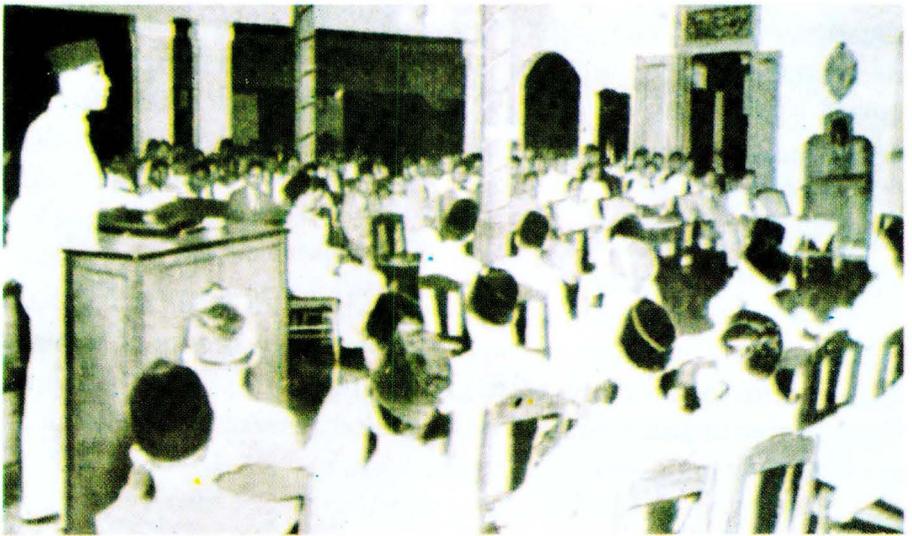
Dalam upaya merumuskan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra, terutama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan kongres bahasa yang membahas berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan. Kongres bahasa Indonesia yang pernah dilaksanakan oleh Pusat Bahasa merupakan kelanjutan dari kongres-

kongres sebelumnya, yaitu Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dan Kongres Bahasa Indonesia II (1954).

Selama kurun waktu tahun 1975--1998, Pusat Bahasa telah menyelenggarakan lima kongres bahasa Indonesia, yakni Kongres Bahasa Indonesia III (1978), Kongres Bahasa Indonesia IV (1983), Kongres Bahasa Indonesia V (1988), Kongres Bahasa Indonesia VI (1993), dan Kongres Bahasa Indonesia VII (1998).

Kongres Bahasa Indonesia I Solo, 25--27 Juni 1938

Kongres Bahasa Indonesia I diselenggarakan dengan tujuan mencari pedoman bagi para pemakai bahasa, mengatur bahasa, dan mengusahakan agar bahasa Indonesia dapat tersebar lebih luas karena pada waktu itu diperoleh gambaran umum bahwa bahasa Indonesia dianggap belum teratur. Pencetus gagasan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia I adalah wartawan harian *Soeara Oemoem*, Surabaya, Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo.



*Suasana Sidang Kongres Bahasa Indonesia I
Solo, 25--28 Juni 1938*

Dalam kongres tersebut tampil berbicara, antara lain, Sanusi Pane, Ki Hadjar Dewantara, H.B. Perdi, Mr. Amir Sjarifuddin, Mr. Muh. Yamin, Soekardjo Wirjopranoto, St. Takdir Alisjahbana, K. St. Pamoentjak, dan M. Tabrani. Susunan panitia kongres adalah sebagai berikut.

Ketua Komite : Soedardjo Tjokrosisworo
Sekretaris/Penulis : Sumanang
Pembantu/Komisaris : Albert Manumpak Sipahutar
Ketua Kehormatan Komite : Prof. Dr. Husein Djajadiningrat
Ketua : Prof. Dr. Poerbatjaraka
Anggota : Mr. Amir Syarifuddin; Katja Sungkana
Sumanang; Mr. Muhammad Syah

Panitia Penerimaan

Ketua : Soedardjo Tjokrosisworo
Wakil Ketua : Suhari Kusumodirdjo
Penulis : Sjamsu Harjohudojo; Karkono Partosentono
(Karkono Kamadjaja); Darmastowo
Darmosoegondo
Bendahara : Sjamsu Hadiwijoto
Tarido Soeroprado
Anggota : Soetedjo Wirjowasono; Doetodilogo;
Soeradi Sastrokarjono; Asnawi Hadisiswojo;
Soerono; Sadono Dibiosarojo

Kongres Bahasa Indonesia II Medan, 28 Oktober--2 November 1954

Kongres Bahasa Indonesia II, sebagai kelanjutan dari Kongres Bahasa Indonesia I, diselenggarakan di Medan, dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden I, Ir. Soekarno. Kongres tersebut diprakarsai dan dilaksanakan oleh Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.



*Pidato Presiden Soekarno
pada Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia II
Medan, 28 Oktober 1954*

Peserta kongres tercatat 302 orang yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Selain itu, tercatat pula peserta dari Tanah Semenanjung, Belanda, Prancis, dan India. Kongres dibagi atas kelompok berikut: (1) Seksi A: Tata Bahasa dan Ejaan; (2) Seksi B: Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan; (3) Seksi C: Bahasa Indonesia dalam Kuliah dan Pengetahuan serta Kamus Etimologi Indonesia; (4) Seksi D: Bahasa Indonesia dalam Film, dalam Pergaulan, dan dalam Prosa dan Puisi; (5) Seksi E: Bahasa Indonesia dalam Pers.

Panitia Penyelenggara terdiri atas:

Ketua : Sudarsana
Wakil Ketua : Slamet Muljana
Panitera I : Mangatas Napitupulu
Panitera II : Drs. W.J.B.F. Toody
Panitera III : Nur St. Iskandar
Anggota : Pudjowijatno; Amir Hamzah Nasution; La Side

Kongres Bahasa Indonesia III Jakarta, 28 Oktober-3 November 1978

Kongres Bahasa Indonesia III diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Kongres bertujuan memantapkan

kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional (sesuai dengan isi dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928) maupun sebagai bahasa negara (sesuai dengan Bab V, Pasal 36, UUD 1945).

Kongres membahas masalah kebahasaan yang meliputi (a) fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan sarana perhubungan antardaerah dan antarbudaya di Indonesia; (b) fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemerintahan dan ketahanan nasional, sebagai unsur pendidikan dan pengajaran, sebagai sarana pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagai sarana komunikasi; serta (c) pembinaan dan pengembangan bahasa daerah; yang terangkum dalam 49 makalah.

Keputusan kongres berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut yang berkaitan dengan: (1) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional; (2) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang pendidikan; (3) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang komunikasi; (4) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang kesenian; (5) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang linguistik; (6) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.



*Peserta Kongres Bahasa Indonesia III
dalam salah satu acara diskusi*

Kongres diikuti oleh 419 orang peserta, termasuk beberapa peserta dari luar negeri. Panitia Penyelenggara terdiri atas:

Ketua : Amran Halim

Sekretaris : Maman Sumantri

Kongres Bahasa Indonesia IV Jakarta, 21--26 November 1983

Kongres Bahasa Indonesia IV bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kongres tersebut membahas masalah bahasa dan sastra dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional serta kaitannya dengan komunikasi massa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.



*Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia IV
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Nugroho Notokusanto
tanggal 21 November 1983*

Kongres diikuti oleh 485 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan peserta luar negeri. Jumlah makalah yang disajikan sebanyak 52 buah. Kongres mengambil keputusan yang berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah-masalah di bidang

bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa yang dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional. Penyelenggaraan kongres dilakukan oleh panitia berikut:

Ketua : Prof. Dr. Amran Halim,
Wakil Ketua : A. Latief, M.A.
Sekretaris : 1. Maman Sumantri;
2. Dra. Sri Sukesri Adiwimarta;
3. Ny. S. Wahyudin

Kongres Bahasa Indonesia V (Jakarta, 28 Oktober--3 November 1988)

Kongres Bahasa Indonesia V diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 60 tahun Sumpah Pemuda dan bertujuan memantapkan bahasa Indonesia sehubungan dengan perannya untuk memperlancar usaha pencerdasan bangsa, sebagai jembatan tercapainya kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Tema yang dipilih untuk kongres tersebut adalah "Menjunjung Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dalam Konteks Pembangunan Nasional", dengan subtema (a) "Peningkatan Mutu dan Peran Bahasa Indonesia Memperlancar Usaha Pencerdasan Bangsa"; (b) "Bahasa Indonesia Merupakan Sarana Pemantapan Pembangunan Ketahanan Nasional"; (c) "Kemampuan Berbahasa Indonesia Merupakan Jembatan Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata".

Kongres diikuti oleh 819 orang peserta yang terdiri atas pakar dan peminat bahasa dan sastra dari berbagai instansi, organisasi profesi, dan perseorangan dari dalam dan luar negeri. Kongres membahas 73 makalah. Putusan kongres berupa kesimpulan umum dan usul tindak lanjutnya, yang meliputi bidang bahasa (17 butir), bidang sastra (10 butir), bidang pengajaran bahasa (8 butir), dan bidang pengajaran sastra (6 butir).

Panitia Penyelenggara terdiri atas:

1) Ketua : Prof. Dr. Anton M. Moeliono
2) Wakil Ketua : Drs. Bastomi Ervan
3) Sekretaris : Drs. Hasjmi Dini
4) Wakil Sekretaris : Drs. Nunus Supardi



*Presiden Soeharto menyampaikan pidatopembukaan
Kongres Bahasa Indonesia V, 28 Oktober 1988
di Istana Negara*

Kongres Bahasa Indonesia VI Jakarta, 28 Oktober--2 November 1993

Kongres Bahasa Indonesia VI diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta, dan diikuti oleh 770 peserta dari seluruh Indonesia dan 52 peserta dari luar negeri (Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Hongkong, India, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Singapura). Pokok-pokok masalah yang dibahas adalah a) Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa (11 judul), b) Pengembangan Bahasa dan Sastra (8 judul), c) Pembinaan Bahasa dan Sastra (8 judul), d) Pengajaran Bahasa dan Sastra (2 judul), dan e) Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri (5 judul).

Kongres mengambil putusan yang dibagi dalam dua bagian. Bagian Umum, terdiri atas delapan putusan. Bagian Khusus, terdiri atas 5 masalah kebahasaan: a) Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa (14 putusan); b) Pengembangan Bahasa dan Sastra (12 putusan); c) Pembinaan Bahasa dan Sas-

tra (15 putusan); d) Pengajaran Bahasa dan Sastra (7 putusan); Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri (6 putusan).



*Suasana diskusi pada salah satu sidang kelompok
Kongres Bahasa Indonesia VI, 1993*

Kongres dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang tersusun sebagai berikut.

Ketua : Dr. Hasan Alwi

Wakil : A. Latief, M.A.

Tim Teknis : Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana (Koordinator)

Drs. Lukman Ali, Panuti Sudjiman, Ph.D., Dr. Sapardi Djoko Damono, Drs. Taya Paembonan, Irvan Masduki, S.H., Dr.S. Effendi, dan Drs. Sunaryo (Anggota)

e. Pemasarakatan/Penyuluhan

Pemasarakatan/penyuluhan kebahasaan, sebagai sarana pembinaan kebahasaan, dilaksanakan dengan tujuan (1) menumbuhkan dan membina sikap bahasa yang positif; (2) meningkatkan kegairahan penggunaan bahasa Indo-

nesia dengan baik dan benar; dan (3) meningkatkan mutu dan disiplin penggunaan bahasa Indonesia.

Sasaran penyuluhan kebahasaan adalah pesuluh yang terdiri atas (1) masyarakat pemakai bahasa pada umumnya, (2) karyawan instansi pemerintah dan swasta, (31) pembina bahasa yang terdiri atas guru dan ahli bahasa.

Keluasan sasaran kegiatan penyuluhan ini mengharuskan Pusat Bahasa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi maupun organisasi profesi di seluruh Indonesia, demi pencapaian tujuan yang digariskan dalam kebijakan kebahasaan. Kerja sama itu dilakukan, antara lain, dengan pemerintah daerah, kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi kebahasaan dan kesastraan, instansi perbankan, departemen di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga nondepartemen, dan sekolah.

Kegiatan penyuluhan sebenarnya sudah dimulai tahun 1972, menjelang peresmian pemakaian *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* oleh Presiden Suharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Namun, kegiatan itu baru terorganisasi dan terencana dengan baik sesudah tahun 1975.

Hingga saat ini hampir tidak terbilang jumlah kegiatan dan sasaran penyuluhan itu karena semakin meningkatnya permintaan, kunjungan, dan kerja sama yang berkaitan dengan penyuluhan kebahasaan. Peningkatan frekuensi kegiatan itu terjadi terutama sejak awal penyelenggaraan Bulan Bahasa pada tahun 1980.

Penyuluhan Langsung

Penyuluhan langsung adalah penyuluhan yang disampaikan secara bersemuka dengan masyarakat pesuluh secara langsung dalam berbagai kesempatan, baik di Pusat Bahasa maupun di instansi lain.

Permintaan dan Kunjungan

Pusat Bahasa memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat atau instansi yang mengajukan permintaan atau berkunjung langsung ke Pusat Bahasa. Sejak tahun 1984 jumlah permintaan dan kunjungan lehlh kurang 875 kali pada lebih kurang 290 instansi, yang terdiri atas sekolah, instansi pemerintah, instansi swasta, dan perguruan tinggi. Perincian nama sekolah, instansi, dan perguruan tinggi itu dapat disimak, antara lain, dalam *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1975--1993*.



Penyuluhan Bahasa Indonesia

Penyuluhan atas Dasar Kerja Sama

Kerja sama penyuluhan adalah upaya pembinaan kebahasaan yang dilaksanakan atas kesepakatan bersama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan instansi atau pemerintah daerah tertentu. Secara aktif kerja sama telah terbina dengan beberapa pihak semenjak tahun 1975. Yang patut dicatat adalah kerja sama dengan TVRI, RRI, pemerintah daerah, instansi nondepartemen, instansi sekolah, perguruan tinggi, dan dengan kantor-kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Kerja sama pembinaan bahasa Indonesia dengan berbagai pemerintah daerah dilaksanakan, antara lain, dalam hal (a) penertiban pemakaian bahasa pada papan nama, papan reklame, dan rambu lalu lintas, (b) peningkatan kemampuan berbahasa pejabat dan karyawan pemerintah daerah, dan (c) peningkatan kemampuan mengajar bahasa Indonesia para guru sekolah dasar.

b. Kerja Sama dengan Instansi Lain

Kerja sama penyuluhan kebahasaan dibina dengan berbagai instansi, baik instansi dalam lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun instansi non-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan penyuluhan kebahasaan yang dilaksanakan pada instansi-instansi tersebut merupakan wujud

kerja sama untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pejabat dan karyawan, terutama kemampuan bahasa yang bertalian dengan administrasi perkantoran. Pada lain pihak, kerja sama dibina dengan perguruan tinggi dan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang, antara lain, bertujuan mencetak kader-kader penyuluh bahasa di seluruh Indonesia. Kerja sama itu mulai dirintis pada tahun 1975. Hingga akhir Maret 1998 telah disiarkan, lebih kurang, sebanyak 1.900 siaran melalui TVRI dan RRI. Perincian sebagian pokok bahasan yang disiarkan TVRI dan RRI dapat disimak dalam *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1975--1993*.

Penyuluhan Tak Langsung

Penyuluhan tak langsung adalah penyuluhan yang disampaikan melalui media, seperti surat, telepon, dan terbitan.

Penyuluhan Melalui Surat dan Telepon

Penyuluhan melalui surat dan telepon merupakan kegiatan penyuluhan yang bersifat pasif. Penyuluhan diberikan melalui surat dan telepon sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui kedua media komunikasi itu. Jumlah pertanyaan kebahasaan yang diterima Pusat Bahasa setiap tahun rata-rata adalah 600 pertanyaan. Kumpulan jawaban surat mengenai masalah kebahasaan itu dihimpun dalam buku petunjuk penyuluhan yang berjudul (1) *Masalah Bahasa yang Patut Anda Ketahui I*, (2) *Masalah Bahasa yang Patut Anda Ketahui II*, dan "Masalah Bahasa yang Patut Anda Ketahui III".

Pentingnya peranan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa disadari oleh Perum Telekomunikasi. Oleh karena itu, sejak tahun 1987, instansi itu mencantumkan nomor telepon Pusat Bahasa, 4896558 dan 4706287, pada halaman nomor telepon penting pada Buku Petunjuk Telepon.

Penyuluhan Melalui Terbitan

Upaya penyuluhan kebahasaan dilakukan juga melalui cara penyebaran terbitan selebaran seperti *Lembar Komunikasi*, sebuah terbitan berbentuk lembar lepas yang terbit dua belas nomor setahun. Terbitan itu dibagikan kepada peminat bahasa dan sastra pada umumnya, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh kegiatan penyuluhan. *Lembar Komunikasi* secara kumulatif diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul *Petunjuk Praktis Berbahasa Indonesia* (1989, 1990, 1991).

Terbitan lain yang juga merupakan sarana penyuluhan adalah berbagai pedoman kebahasaan, seperti *Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Pembentukan Istilah*. Terbitan sejenis itu dapat ditemukan dan dibeli di toko-toko buku. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* juga merupakan salah satu rujukan terpenting untuk meningkatkan kemampuan kebahasaan, terutama dalam penguasaan kosakata.

f. Penerbitan

Penerbitan merupakan kegiatan Pusat Bahasa yang berkaitan dengan upaya pendokumentasian hasil kegiatan dan pelestarian warisan budaya bangsa yang berupa bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Sasaran kegiatan adalah semua naskah hasil penelitian dan penyusunan yang dianggap layak terbit berdasarkan penilaian para pakar bahasa dan sastra. Selain itu, sebagai upaya penyebaran informasi mengenai perkembangan kebahasaan yang sedang terjadi, Pusat Bahasa menerbitkan, secara berkala, *Bahasa dan Sastra*, *Lembar Komunikasi*, dan buletin kepustakaan *Informasi Pustaka Kebahasaan*. Di samping itu, untuk melengkapi bahan penyuluhan kebahasaan, Pusat Bahasa juga menerbitkan buku-buku acuan dalam terbitan berseri dengan judul *Seri Penyuluhan*.



Hasil terbitan Pusat Bahasa

Bahasa dan Sastra

Majalah ini mulai diterbitkan pada tahun 1975, bersamaan dengan terbitnya majalah *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Frekuensi terbit majalah ini adalah tiga bulanan. Hingga akhir tahun kerja 1992/1993 telah terbit sebanyak 57 nomor. Artikel yang dimuat dalam majalah ini meliputi bidang linguistik dan linguistik terapan serta sastra dan sastra terapan.

Lembar Komunikasi

Terbitan lain berbentuk lembaran lepas (*leaflet*) yang dicetak sebanyak dua belas nomor setiap tahun. Kandungan isi lembaran ini meliputi berbagai masalah kebahasaan yang merupakan petunjuk praktis bagi pemakai bahasa pada umumnya. Lembaran ini disusun dan disediakan bagi masyarakat umum yang berminat. Secara kumulatif lembaran ini dihimpun dalam buku petunjuk praktis kebahasaan yang berjudul *Petunjuk Praktis Berbahasa Indonesia*.

Informasi Pustaka Kebahasaan

Buletin ini diterbitkan untuk melengkapi informasi kebahasaan lain dengan informasi khusus tentang kepustakaan kebahasaan mutakhir yang dimiliki Perpustakaan Pusat Bahasa. Buletin ini diterbitkan empat kali setahun dan disediakan secara terbatas bagi perpustakaan dan masyarakat peneliti kebahasaan dan kesastraan yang berminat.

Seri Penyuluhan Kebahasaan dan Kesastraan

Terbitan ini termasuk ke dalam golongan terbitan tidak berkala meskipun memiliki nomor seri dalam setiap penerbitannya. Penyusunan naskah dilakukan berdasarkan keperluan dalam kegiatan penyuluhan. Beberapa judul yang dapat disebutkan, antara lain, *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*; *Pedoman Surat-Menyurat*; *Pedoman Tata Istilah*; dan berbagai bahan penyuluhan.

g. Bulan Bahasa dan Sastra

Setiap bulan Oktober, sejak tahun 1980, Pusat Bahasa menyelenggarakan **Bulan Bahasa** dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda. Kegiatan Bulan Bahasa merupakan rangkaian acara kebahasaan dan kesastraan, selama satu bulan, yang bertujuan meningkatkan pemasyarakatan bahasa dan apresiasi sastra di Indonesia. Sasaran kegiatan adalah para peminat bahasa dan sastra, guru, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Keluasan cakupan kegiatan yang juga meliputi kegiatan kesastraan, menyebabkan

berubahnya nama kegiatan menjadi **Bulan Bahasa dan Sastra** mulai tahun 1989.



Cerdas Cermat Bulan Bahasa

Beberapa mata acara tetap dalam kegiatan **Bulan Bahasa dan Sastra** adalah (a) kegiatan kebahasaan yang meliputi, antara lain (1) Pertemuan Kebahasaan, (2) Lomba Kebahasaan, (3) Penyuluhan, (4) Penerbitan, (5) Pintu Terbuka Pusat Bahasa, (6) Cerdas Cermat Kebahasaan; (b) kegiatan kesastraan yang meliputi, antara lain (1) Diskusi Sastra di Kalangan Siswa SMA, (2) Cepat Tepat Sastra Tingkat SMA, (3) Pertemuan Sastrawan dengan Siswa SMA, (4) Festival Pementasan Sastra, (5) Pameran Sastra, (6) Apresiasi Sastra Melalui Radio dan Televisi.

h. Pemberian Penghargaan

Salah satu di antara kegiatan Pusat Bahasa adalah (1) melakukan penilaian terhadap perilaku dan sikap berbahasa anggota masyarakat serta memberikan penghargaan kepada tokoh kebahasaan dan kesastraan yang berjasa dan (2) memberikan pengakuan atas hasil karya dan prestasi anggota masyarakat di bidang bahasa dan sastra dengan cara menerbitkan surat-surat ketetapan dan

keputusan yang sesuai. Beberapa penghargaan yang pernah diberikan oleh Pemerintah, melalui Pusat Bahasa, antara lain sebagai berikut.

Anggota Masyarakat

Penghargaan kebahasaan diberikan kepada tokoh-tokoh anutan masyarakat dari berbagai kalangan, yang berdasarkan penilaian juri ditetapkan sebagai tokoh yang peduli terhadap bahasa Indonesia serta menggunakannya secara baik dan benar dalam penampilan sehari-hari. Tokoh yang memperoleh penghargaan itu, antara lain, Rudy Hartono (olahragawan), Hasan Ashari Oramahi (penyiar), dan Mark Sungkar (insan perfilman).

Tokoh Kebahasaan

Penghargaan yang diberikan kepada tokoh kebahasaan pada umumnya didasarkan atas jasa dan prestasi seorang tokoh, terutama atas jasa dan prestasinya dalam upaya pengembangan bahasa Indonesia. Selain itu, penghargaan diberikan atas jasa dan peran sertanya dalam pengembangan peristilahan pada Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia. Penerima penghargaan sebagai tokoh kebahasaan, antara lain, Sutan Muhammad Zain, W.J.S. Poerwadarminta, Soewojo Wojowasito, Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Dr. Sri Sukei Adiwimarta, Dr. Mien A. Rifai, Dr. Liek Wilardjo, dan Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka. Data lengkap mengenai penerima penghargaan terdapat, antara lain, dalam *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1975--1993*.

Tokoh Kesastraan/Sastrawan

Penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada tokoh kesastraan/sastrawan pada umumnya berdasarkan penilaian atas prestasi karya. Penilaian itu diberikan oleh suatu badan atau organisasi yang mempunyai otoritas dalam menilai karya sastra, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Tingkat Nasional

Sejak tahun 1989, Pusat Bahasa memberikan penghargaan kepada penulis sastra terbaik dengan tujuan untuk merangsang kegiatan menulis kreatif, baik dalam prosa, puisi, maupun drama. Kegiatan pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas menulis, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas. Selama periode 1989--1998 tercatat sebanyak dua puluh sastrawan yang meraih penghargaan kesastraan yang diberikan Pusat Bahasa. Peraih penghargaan itu adalah Danarto, Ahmad Tohari, D. Zawawi Imron,

Beny Setia, Wisran Hadi, Saini K.M., Darman Moenir, Edijushanan, Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi A.G., Kuntowijoyo, N. Riantiarno, Seno Gumira Ajidarma, F. Rahardi, Satyagraha Hoerip, Afrizal Malna, Piek Ardijanto Soeprijadi, Rusli Marzuki Saria, Titis Basino P.I., dan Wing Kardjo.

Tingkat Internasional

Hadiah Sastra ASEAN (*S.E.A. Write Award*) diberikan setiap tahun, sejalan tahun 1978, oleh Yayasan Hadiah Sastra ASEAN yang berpusat di Bangkok. Hadiah itu diberikan kepada sastrawan atas dasar kreasi karya sastra yang dinilai oleh tim juri yang terdiri atas tokoh-tokoh budaya dan sastra yang mewakili negara-negara ASEAN. Pusat Bahasa, sebagai unit organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, dalam hal ini berperan sebagai sponsor utama yang membentuk panitia yang memiliki kewenangan dalam menentukan calon pemenang dari Indonesia.

Sejumlah sastrawan yang pernah menerima penghargaan *S.E.A. Write Award*, antara lain Iwan Simatupang, Sutardji Calzoum Bachri, Putu Wijaya, Goenawan Mohamad, Marianne Katoppo, Y.B. Mangunwijaya, Budi Darma, Abdul Hadi Wiji Muthari, Sapardi Djoko Damono, Umar Kayam, Danarto, Arifin C. Noer, Gerson Poyk, Subagio Sastrowardoyo, A.A. Navis, Ramadhan K.H., Taufiq Ismail, Ahmad Tohari, W.S. Rendra, Seno Gumira Ajidarma, dan N. Riantiarno.

KERJA SAMA

Pusat Bahasa sangat menyadari bahwa tugas yang dibebankan kepadanya sangat berat sehingga tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Hal itu disebabkan oleh berbagai keterbatasan, baik karena status kelembagaannya maupun karena jumlah dan mutu tenaga yang belum memadai. Untuk mengatasi hal itu, Pusat Bahasa melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan dan dipandang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Kerja sama itu dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra. Kerja sama itu dilakukan, baik dengan lembaga di dalam negeri maupun dengan lembaga di luar negeri.

a. Kerja Sama Dalam Negeri

Kerja sama dalam negeri dilakukan, baik dengan lembaga di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pemerintah yang lain maupun dengan pihak swasta. Kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

Departemen Penerangan

Kerja sama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) sudah sejak lama dilakukan. Kerja sama itu direalisasikan dalam bentuk siaran pembinaan bahasa Indonesia dengan frekuensi satu kali dalam seminggu. Selain itu, melalui RRI dilakukan juga siaran pembinaan bahasa Indonesia melalui rubrik *Aku Cinta Bahasa Indonesia (ACBI)* dengan frekuensi dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Rabu.

Pemerintah Daerah

Kerja sama dengan pemerintah daerah dirintis mulai dari kerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang penandatanganan piagam-kerjasamanya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1989. Kerja sama itu mendorong terbitnya berbagai putusan dan instruksi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai ketentuan pemakaian bahasa pada papan nama, papan reklame, dan rambu lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Hal itu

dilakukan dengan tujuan meningkatkan citra keindonesian di wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Kerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta ini melahirkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1992, tanggal 13 Januari 1992.



Pemancangan imbauan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Kerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta ditindaklanjuti dengan melakukan pendekatan kepada Departemen Dalam Negeri. Pendekatan itu menghasilkan *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991* yang memuat instruksi kepada seluruh Gubernur/Kepala Daerah dan jajarannya sampai ke tingkat kecamatan untuk melaksanakan pembinaan bahasa Indonesia di wilayah masing-masing. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri itu, Pusat Bahasa dapat melakukan kerja sama kebahasaan dengan 26 gubernur/kepala daerah yang lain. Pada dasarnya, kerja sama dengan pemerintah daerah itu dilaksanakan dalam hal (a) penertiban pemakaian bahasa dalam papan nama, papan reklame, dan rambu lalu lintas, (b) peningkatan kemampuan berbahasa pejabat dan karyawan di lingkungan pemerintah daerah, dan (c) pemberian bantuan kepada Pusat Bahasa dalam upaya pendirian Balai Bahasa di daerah. Secara berurutan penandatanganan piagam kerja sama dengan pemerintah daerah itu adalah sebagai berikut.

(1)	DKI Jakarta	18 Februari 1989
(2)	Sumatera Barat	25 September 1993
(3)	Sulawesi Utara	29 September 1993
(4)	Sumatera Utara	7 Oktober 1993
(5)	Sulawesi Selatan	14 Oktober 1993
(6)	Jawa Timur	20 Desember 1993
(7)	D.I. Aceh	11 Januari 1994
(8)	Kalimantan Selatan	31 Januari 1994
(9)	Sulawesi Tengah	3 Februari 1994
(10)	D.I. Yogyakarta	3 Juni 1994
(11)	Jawa Barat	20 Juni 1994
(12)	Nusa Tenggara Barat	28 Juni 1994
(13)	Jawa Tengah	30 Juni 1994
(14)	Sumatera Selatan	13 September 1994
(15)	Lampung	18 Oktober 1994
(16)	Riau	15 Desember 1994
(17)	Kalimantan Tengah	11 Januari 1995
(18)	Jambi	6 Juli 1995
(19)	Sulawesi Tenggara	24 Juli 1995
(20)	Nusa Tenggara Timur	4 September 1995
(21)	Kalimantan Timur	11 September 1995
(22)	Bali	24 Oktober 1995
(23)	Maluku	20 November 1995
(24)	Bengkulu	18 Juli 1996
(25)	Kalimantan Barat	23 Mei 1996
(26)	Timor Timur	10 Maret 1997
(27)	Irian Jaya	24 Februari 1997

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Penandatanganan piagam kerja sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 November 1989. Kerja sama itu bertujuan meningkatkan pemasyarakatan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pemerintah secara umum.

Universitas Indonesia

Kerja sama dilaksanakan dengan Fakultas Sastra dalam bentuk (a) penyelenggaraan pertemuan kebahasaan, dan (b) peningkatan mutu tenaga teknis Pusat Bahasa melalui pendidikan formal.

Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) H.B. Jassin

Pusat Bahasa bekerja sama dengan PDS H.B. Jassin dalam bentuk bantuan dana yang diberikan oleh Pusat Bahasa untuk pengelolaan pusat dokumentasi itu.

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)

Kerja sama dengan DKJ dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan bersama pertemuan kebahasaan dan kesastraan.

Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT)

Pusat Bahasa bersama BPPT bekerja sama mengolah istilah komputer.

PT Elnusa Yellow Pages

Kerja sama dilaksanakan berupa bantuan tenaga konsultan Pusat Bahasa dalam penyusunan istilah untuk lembar kuning *Buku Petunjuk Telepon*.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Bersama BPHN, Pusat Bahasa melaksanakan penyusunan *Kamus Hukum Pidana*.

Departemen Perindustrian

Kerja sama dengan lembaga ini berupa kegiatan penyusunan *Standar Industri Indonesia* (SII) dalam peristilahan bidang perindustrian.

Departemen Perhubungan

Kerja sama dilakukan dalam bentuk kegiatan penyusunan *Kamus Hidrometeorologi* dan *Kamus Meteorologi Perhubungan*.

Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi

Bersama lembaga ini, Pusat Bahasa melaksanakan kegiatan penyusunan *Kamus Istilah Pariwisata*. Instansi ini dipecah menjadi tiga lembaga, yaitu Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya, PT Pos Indonesia, dan PT Telkom

Indonesia. Saat ini masih dilakukan kerja sama dengan ketiga instansi tersebut, terutama dalam bidang peristilahan.

Departemen Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi

Kerja sama terjadi dalam bentuk pengupayaan pembakuan istilah untuk SNI bidang tambang, minyak, dan gas bumi.

Perusahaan Umum Listrik Negara

Kerja sama dilaksanakan dalam bentuk penyusunan istilah kelistrikan.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Kerja sama dengan Menpora terjalin sejak ditetapkannya bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa mulai tahun 1980. Penyelenggaraan kegiatan Bulan Bahasa merupakan subkegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda yang berlangsung sebulan penuh selama bulan Oktober.

Organisasi Profesi Kebahasaan dan Kesastraan

Kerja sama dengan Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), dan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan berbagai pertemuan kebahasaan dan kesastraan serta pemasyarakatan bahasa Indonesia.



Seminar Nasional Bahasa dan Sastra

Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia

Kerja sama dengan instansi pendidikan tinggi meliputi berbagai kegiatan, antara lain (a) penelitian kebahasaan Indonesia dan daerah, (b) penyelenggaraan kegiatan kebahasaan, seperti pertemuan dan Bulan Bahasa, (c) pembinaan tenaga peneliti/pengajar kebahasaan, penyuluh, dan (d) penyusunan daftar dan kamus istilah dalam Panitia Kerja Sama Kebahasaan (Pakersa).

Secara khusus, Pusat Bahasa melakukan kerja sama dengan Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam rangka komputerisasi kegiatan pemetaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Piagam kerja sama ditandatangani pada tanggal 5 September 1995.

Organisasi Pengusaha

Kerja sama dengan organisasi pengusaha, antara lain, dijalin dengan *Real Estat Indonesia* (REI), *Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia* (P3I), dan *Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia* (PHRI). Kerja sama dengan REI--penandatanganan Piagam Kerja Sama dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995--bertujuan menertibkan nama-nama kompleks perumahan yang dibangun oleh anggota REI. Nama-nama kompleks perumahan yang menggunakan bahasa asing diubah menjadi nama-nama dalam bahasa Indonesia. Kerja sama dengan P3I bertujuan menertibkan pemakaian bahasa dalam dunia periklanan, baik iklan di media cetak dan elektronik maupun iklan di papan-papan reklame atau luar ruang. Kerja sama dengan PHRI bertujuan menertibkan bahasa di lingkungan hotel dan restoran.

Perusahaan Swasta

Kerja sama dengan perusahaan swasta telah dilakukan, antara lain, dengan Bank LIPPO. Kerja sama ini bertujuan menertibkan pemakaian bahasa di lingkungan perusahaan tersebut.

Berbagai Instansi dan Perseorangan

Kerja sama dilaksanakan atas dasar permintaan berupa tenaga penyuluh bahasa dan tenaga teknis kebahasaan lain sebagai penyuluh, penilai, atau konsultan bahasa. Kerja sama dengan perseorangan dilakukan dalam hubungan dengan upaya pengembangan bahasa, antara lain dalam pengembangan kosakata dan istilah, pengembangan bahasa dalam pemrograman perangkat lunak komputer, seperti perangkat lunak untuk kegiatan pemetaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia.

b. Kerja Sama Luar Negeri

Negeri Belanda

Dengan negeri ini, yang diwakili oleh Universitas Kerajaan di Leiden telah terjalin kerja sama yang terwujud dalam suatu proyek bersama, yaitu *Proyek Pengembangan Ilmu Bahasa Indonesia*. Selama kurun waktu tahun 1975 hingga 1991 telah dilaksanakan dua penandatanganan proyek kerja sama, yaitu *Proyek ILDEP I (1977--1985)* dan *Proyek ILDEP II (1988--1994)*.

Baik *Proyek ILDEP I* maupun *Proyek ILDEP II* mempunyai tujuan, antara lain: (a) memperkuat infrastruktur pelaksanaan garis besar kebahasaan Indonesia, baik di bidang ketenagaan maupun di bidang perlengkapan; (b) melaksanakan pertukaran tenaga ahli, pemberian beasiswa, dan keperluan kebahasaan lain yang dianggap perlu.

Program yang dikembangkan meliputi kegiatan seperti berikut: (a) pendidikan pascasarjana, (b) pembentukan pangkalan data pustaka kebahasaan, (c) pembentukan pangkalan data perkamusan, (d) penataran tenaga profesional dalam rangka pendirian balai bahasa, dan (e) pengembangan kepastakaan kebahasaan melalui upaya penerjemahan dan penerbitan.

Malaysia dan Brunei Darussalam

Pusat Bahasa, mewakili Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, mewakili Pemerintah Malaysia, membentuk *Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM)* pada tahun 1972. Tujuan majelis, antara lain, mengupayakan adanya titik temu di antara kedua bahasa dalam hal peristilahan. Upaya tersebut ditunjang oleh pertemuan rutin, yang dikenal dengan sebutan *Persidangan Majelis*, diselenggarakan dua kali setahun secara bergiliran di kedua negara.

Kerja sama kebahasaan antara kedua bangsa serumpun itu kemudian meluas setelah Brunei Darussalam secara resmi diterima sebagai anggota majelis pada tahun 1987, dan Singapura diterima sebagai pemerhati. Nama majelis sejak saat itu berubah menjadi *Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM)*.

Majelis itu hingga saat ini telah melaksanakan persidangan sebanyak 38 kali dan berhasil mengolah istilah dalam 104 bidang ilmu. Jumlah istilah yang dihasilkan, lebih kurang sebanyak 200.000 istilah. Selain itu, persidangan majelis juga membahas empat seri kamus ilmu dasar, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi.



Sidang Pakar MABBIM

Sejak tanggal 12 Agustus 1996, majelis ini bersepakat untuk membentuk satu wadah yang khusus menangani masalah kesastraan yang diberi nama *Majelis Sastra Asia Tenggara* (Mastera). Secara sengaja majelis ini menggunakan nama geografi *Asia Tenggara* dengan harapan dapat menjadi ajang kerja sama bagi masyarakat sastra di kawasan itu, tidak hanya terbatas pada negara anggota MABBIM. Sesuai dengan namanya, Mastera memusatkan perhatian pada masalah kesastraan, penelitian sastra, perluasan kesempatan penciptaan sastra, dan ikut serta dalam penyebaran penggunaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai alat komunikasi di kawasan Asia Tenggara.

SEAMEO-Regional Language Centre (RELC), Singapura

Kerja sama kebahasaan antara Pusat Bahasa dan RELC dilaksanakan dengan tujuan (a) peningkatan mutu dan kemampuan tenaga pengajar bahasa Inggris di SLTA dan perguruan tinggi; (b) penyebarluasan dan pertukaran terbitan, dan (c) penerjemahan.

Duduk sebagai anggota *governing board*, mewakili Indonesia, antara lain, Prof. Dr. Amran Halim (1975--1983), Prof. Dr. Anton M. Moeliono (1983--1989), dan Prof. Dr. Retmono (1989--sekarang).

Pusat Kebudayaan Prancis

Kerja sama kebahasaan dengan instansi ini berbentuk bantuan tenaga ahli dalam bidang pengajaran bahasa Prancis.

Ford Foundation

Dalam kerja sama ini *Ford Foundation* menyediakan bantuan dana untuk pengembangan profesionalisme tenaga kebahasaan di lingkungan Pusat Bahasa. Bantuan itu telah dimanfaatkan, antara lain, untuk (a) pemberian beasiswa belajar di luar negeri, (b) peningkatan mutu tenaga teknis, (c) kesertaan dalam pertemuan kebahasaan di kawasan Asia Tenggara, (d) pengadaan buku dan bahan pustaka lain dalam bidang kebahasaan, dan (e) pengundangan pakar kebahasaan Amerika Serikat untuk kepentingan penataran kebahasaan.

Summer Institute of Linguistics (SIL)

Kerja sama dengan *SIL* terlaksana dalam bentuk penyelenggaraan ceramah dan seminar di Pusat Bahasa. Kerja sama juga terjadi dalam bentuk kegiatan "tukar-menukar" terbitan.

Goethe Institut (Pusat Kebudayaan Jerman)

Jalinan kerja sama antara Pusat Bahasa dan *Goethe Institut* terjadi dalam bentuk (a) penyelenggaraan simposium penerjemahan (9--10 Desember 1985), (b) penyelenggaraan simposium bahasa keilmuan (15--16 September 1986), (c) bantuan tenaga ahli kebahasaan Jerman sebagai konsultan dan pembimbing akademik untuk peneliti Pusat Bahasa, dan (d) pemberian beasiswa ke Jerman.

British Council

Kerja sama dengan *British Council* terjadi dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa kepada tenaga teknis, terutama tenaga teknis bidang susastra.

School of Oriental and African Studies (SOAS)

Kerja sama antara *SOAS* dan Pusat Bahasa terlaksana dalam bentuk pemberian fasilitas pendidikan dan penelitian kebahasaan dan kesastraan untuk tenaga teknis dan tenaga peneliti Pusat Bahasa, terutama tenaga peneliti bidang

susastra. Selain itu, kerja sama juga berupa pemberian bantuan tenaga ahli ke-sastraan, antara lain, dalam kegiatan penyusunan buku sejarah sastra Indonesia modern.

Unesco

Kerja sama dengan *Unesco* terjadi dalam bentuk penerbitan *Kamus Hidrologi* dan *Kamus Hidrogeologi*.

BAGIAN KETIGA
PANDANGAN TOKOH

PELESTARIAN BAHASA DAERAH

Edi Sedyawati

Direktur Jenderal Kebudayaan



Fungsi Bahasa Daerah di Indonesia

Untuk Indonesia masa kini, yaitu Indonesia yang me-wujud ke dalam kesatuan bangsa Indonesia yang mer-deka dan membentuk negara Republik Indonesia, bahasa daerah mempunyai peranan yang khas. Kese-luruhan bahasa daerah, yaitu bahasa-bahasa dari ber-bagai suku bangsa Indonesia, di satu sisi mempunyai peranan yang berkelanjutan dari masa lalu sebagai pemberi jatidiri suku bangsa yang bersangkutan, dan di sisi lain mempunyai peranan baru sebagai sumber khazanah dan sumber gagasan (konsep) untuk memperkaya bahasa kesatuan nasional, bahasa Indonesia.

Aktualisasi fungsi tersebut sudah tentu memerlukan berbagai sarana, baik berupa struktur dalam tata masyarakat yang memungkinkan dijalankan, mau-pun berupa program yang memberikan arah dan mutu bagi aktualisasi fungsi itu. Keberadaan lembaga-lembaga pembina, yang dikelola baik oleh Pemerin-tah maupun oleh kalangan swasta, seperti yang bergerak di bidang pendidikan, pengkajian, atau pelestarian adat-istiadat, merupakan sarana struktural yang diperlukan untuk aktualisasi fungsi bahasa daerah, sedangkan program pada bidang-bidang yang sama diperlukan untuk menciptakan kegiatan yang tepat sasaran dan mengarah ke mutu hasil kerja yang tinggi.

Program pengkajian, misalnya, perlu secara sistematis diarahkan kepada pengadaan data dasar untuk pengetahuan bahasa daerah (daftar kata, kamus dua arah, fonologi, morfologi, sintaksis, contoh teks) dan kepada pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahasa tersebut, misalnya berkenaan dengan simbolik dan gaya bahasa, serta masalah kebahasaan yang terkait dengan struktur dan hubungan sosial. Program pendidikan perlu memberikan kedu-dukan yang jelas dari pengajaran bahasa daerah, baik di sekolah umum mau-pun di sekolah khusus, baik sebagai bahasa ibu maupun sebagai bahasa kedua.

Adapun program pelestarian adat-istiadat yang terkait dengan bahasa daerah sangat bergantung pada eksistensi bahasa daerah itu masing-masing.

Eksistensi Bahasa Daerah

Dapat dikatakan bahwa suatu bahasa daerah akan tetap hidup selama ada fungsi-fungsi yang dilayaninya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Fungsi yang paling dasar adalah fungsi sebagai sarana komunikasi. Fungsi komunikasi ini perlu disimak dalam dua arena yang berbeda, yaitu arena domestik dan arena publik. Secara umum dapat diamati bahwa dalam arena domestik bahasa daerah kurang lebih mantap penggunaannya jika keluarga yang bersangkutan seluruhnya berasal dari suku bangsa yang sama, dan keluarga tersebut tinggal dalam suku bangsa yang sama pula. Dalam komunitas seperti itu, biasanya bahasa daerah banyak pula digunakan di arena publik, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam konteks upacara resmi.

Fungsi seremonial bahasa daerah ternyata merupakan faktor penting pula untuk memperkuat eksistensi bahasa tersebut. Ketetapan untuk menggunakan bahasa daerah dalam upacara adat tertentu, lebih-lebih yang terkait dengan daur hidup, membuat khalayak tetap dapat mendengar penggunaan bahasa tersebut dari waktu ke waktu. Masalahnya di sini adalah bagaimana mencegah agar tingkat pemahaman bahasa daerah dari generasi ke generasi tidak merosot.

Landasan eksistensi bahasa daerah yang lebih kokoh lagi dapat diharapkan muncul dari fungsinya sebagai sarana ekspresi seni. Bidang seni yang paling menentukan adalah sastra, yang substansinya adalah bahasa. Namun, bisa saja terjadi bahwa eksistensi sastra daerah itu sebenarnya ditopang oleh minat orang yang lebih besar kepada seni musik dan seni teater dalam arti luas. Musik memberikan peluang kepada sastra yang dinyanyikan, sedangkan teater memberikan peluang kepada sastra yang dimainkan. Pesona pentas dan musik itulah yang seringkali membawa kepada kebutuhan untuk juga memahami sastra secara lebih daripada hanya sepintas lalu.

Batas-Batas Budaya yang Bergerak

Budaya (termasuk di dalamnya bahasa) adalah milik masyarakat. Dari masa ke masa kita melihat orang berpindah tempat, baik sebagai fungsi dari proses "menjadikan Indonesia" maupun sebagai akibat dari perubahan terencana yang diprogramkan oleh negara. Dalam proses meng-Indonesia itu terdapat kenyataan masa kini bahwa orang melihat Indonesia sebagai suatu keseluruhan lapangan kerja, sebagai keseluruhan sumber belajar, serta juga se-

bagai keseluruhan daerah pelayanan. Oleh karena itulah, orang Indonesia yang belajar ataupun bekerja, pada Pemerintah atau swasta, dapat berpindah-pindah tempat, melintasi perbatasan daerah asal kesukuannya.

Di antara "perubahan terencana" yang diprogramkan oleh negara dapat disebut, misalnya, transmigrasi dan pembuatan jalan-jalan raya serta pengembangan sistem transportasi lain yang semuanya itu mempermudah orang bepergian dari satu tempat ke tempat lain, khususnya di dalam negeri. Sebagai akibat dari pergaulan antarsuku bangsa yang semakin mesra dan semakin tinggi frekuensinya, kini perkawinan antarsuku bangsa sudah tidak dirasakan lagi sebagai sesuatu yang asing atau perlu dijadikan sumber gunjingan. Ada kesan bahwa keluarga yang terjadi dari perkawinan campuran cenderung memilih bahasa Indonesia untuk komunikasi domestik; dorongan untuk penggunaan salah satu bahasa daerah hanya didapat jika komunitas setempat masih intensif menggunakan bahasa daerah tersebut.

Dinamika sosial dan mobilitas penduduk itu membuat batas-batas budaya selalu dapat bergeser. Sosok budaya itu sendiri, baik pada kebudayaan suku bangsa maupun pada kebudayaan nasional Indonesia, senantiasa berubah mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi. Namun, dalam perubahan itu, biasanya ada sesuatu atau sejumlah ciri dominan yang selalu bertahan dan menjadi penanda kebudayaan yang bersangkutan, walaupun telah mengalami transformasi sebagai akibat dari pertemuan dengan kebudayaan lain.

Pengajaran Bahasa Daerah

Di samping pengajaran bahasa daerah sebagai *bahasa ibu*, kini sudah amat mendesak untuk diupayakan pula secara sistematis pengajaran bahasa daerah sebagai *bahasa kedua*. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dalam sistem persekolahan kita secara normatif telah ditetapkan untuk murid sekolah dasar kelas satu sampai dengan tiga. Selanjutnya, di dalam komunitas yang homogen, bahasa daerah itu dapat diperdalam dengan memasukkannya sebagai mata pelajaran tersendiri, dan dimasukkan sebagai bagian dari "muatan lokal" yang dialokasikan di dalam kurikulum yang sekarang berlaku. Namun, pelaksanaan norma itu pun belum sepenuhnya memadai, khususnya dalam pemerataan mutu antardaerah.

Pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua, yang juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari muatan lokal, amat diperlukan bagi komunitas yang tidak terlalu homogen, seperti di daerah perkotaan, atau di kawasan yang bersama penduduk dari berbagai asal kesukuan. Di sini, dengan penyediaan pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua itu, murid yang bukan penutur

asli dapat belajar bahasa setempat dengan lebih nyaman, tanpa tekanan dari ketidak-kenalan.

Langkah terpenting yang harus segera diambil adalah penetapan sasaran kajian yang lebih luas (bandingkan dengan fakta terdapatnya lebih dari 300 bahasa daerah di Indonesia) dengan penerahan daya keahlian yang lebih besar. Ini berarti tantangan bagi para ahli bahasa, di lembaga mana pun ia berada. Dalam hal ini Pusat Bahasa harus mengambil peranan sebagai koordinator dan pengarah program makronya. Setelah pengkajian menyusul tindakan yang amat penting untuk memungkinkan bahasa daerah diajarkan secara bertanggung jawab, yaitu penyusunan bahan ajar, sekaligus ke dalam jenjang kompetensi.

Penawaran mata pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Kedua kiranya paling tepat untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi. Mempelajari bahasa daerah di tempat asal bahasa yang bersangkutan dapat berarti menguasai sarana untuk dapat memahami budaya setempat secara lebih utuh sehingga dapat terjadi saling menghargai secara lebih mendalam. Pada tingkat kesiapan yang lebih lanjut dapat pula ditawarkan lebih dari satu bahasa daerah di sebuah sekolah, seorang murid dapat memilih atau mengambil semuanya. Pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua itu dapat ditujukan pada murid yang bukan penutur asli, atau murid yang merupakan anak dari penutur asli tetapi penguasaan bahasa daerahnya itu tidak mantap. Pada tingkat kesiapan yang mana pun, pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua harus dilihat dalam fungsinya sebagai sarana integrasi bangsa, khususnya integrasi melalui saling menghargai dan saling mempelajari.

VISI HIMPUNAN PEMBINA BAHASA INDONESIA (HPBI) TERHADAP PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Andi Mappi Sammeng



Butir ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, yang berbunyi "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia" merupakan langkah pertama yang menentukan di dalam perumusan garis haluan mengenai bahasa nasional kita. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV, pasal 36, yang menyatakan bahwa "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia", merupakan dasar hukum yang kuat dan resmi bagi pemakaian bahasa Indonesia, bukan saja

sebagai bahasa perhubungan pada tingkat nasional, tetapi juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di samping itu, politik bahasa nasional (yang dihasilkan oleh Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa resmi dan bahasa negara juga dijadikan pijakan dalam merumuskan garis haluan bahasa nasional. Pernyataan politik dan dasar hukum tersebut merupakan dasar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam berbagai bidang yang cukup luas: sebagai bahasa pendidikan, sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa pemerintahan, bahasa hukum, dan sebagainya.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan terus-menerus yang mencakup dua kegiatan besar, yakni pembinaan dan pengembangan bahasa. Pembinaan bahasa ditujukan kepada peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia atau upaya mempengaruhi penutur sehingga pemakaian bahasanya menggunakan kaidah, sedangkan pengembangan ditujukan kepada penyempurnaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara.

Peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui (1) penyediaan berbagai sarana, seperti buku yang dapat memberikan panduan bagi masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia, (2) penyediaan tenaga penyuluh, dan (3) penyediaan tenaga penerjemah yang andal

(dari bahasa Indonesia ke bahasa Asing atau sebaliknya). Penyediaan tenaga penerjemah ini sangat penting karena era globalisasi informasi yang berkembang dengan cepat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa kita. Dalam percaturan global itu HPBI memandang bahwa bahasa Indonesia harus bisa memainkan peranannya. Tidak hanya di dalam kawasan regional, tetapi juga di kawasan internasional. Dengan demikian, HPBI menyarankan bahwa di dalam pertemuan-pertemuan resmi kenegaraan, baik nasional maupun internasional, keputusan dari Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, untuk memperlancar dalam berkomunikasi, perlu disediakan tenaga penerjemah yang andal yang dapat menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya.

Era globalisasi informasi juga berpengaruh terhadap persepsi, wawasan dan sikap masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kesadaran dan kecintaan berbahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan identitas nasional. Mengingat perubahan tersebut terjadi secara berkelanjutan, maka upaya pembinaan bahasa pun perlu dilakukan secara berkelanjutan pula.

HPBI memandang bahwa upaya pembinaan bahasa nasional tersebut dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Pembinaan jangka panjang dilakukan melalui dua jalur, yaitu sekolah dan masyarakat. Pembinaan itu bertujuan untuk memberi kesadaran dan kecintaan pada masyarakat serta memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Dalam rangka membangun sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yang antara lain ditandai oleh kemahiran menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dalam jalur sekolah perlu dikembangkan teori pengajaran bahasa Indonesia yang dapat dipakai sebagai landasan penyusunan metode pengajaran bahasa Indonesia yang menggairahkan dan menarik minat peserta didik. Pengajaran bahasa juga harus dapat menjawab persoalan kurangnya penguasaan kosakata dan keterampilan berbahasa Indonesia para siswa, sebagaimana sering dikeluhkan.

Pembinaan bahasa nasional dalam jangka menengah dan pendek dilakukan terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan kemampuan bahasa Indonesia yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, hal yang juga perlu dilakukan ialah meluruskan persepsi negatif sebagian warga masyarakat tentang bahasa Indonesia. Persepsi negatif tentang potensi bahasa Indonesia ini terjadi seiring dengan makin menggejalanya penggunaan bahasa asing dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dasawarsa terakhir ini, misalnya, kita melihat gejala

maraknya penggunaan bahasa Inggris di dunia bisnis. Hampir menjadi anggapan umum bahwa bisnis yang terpercaya adalah bisnis yang dikomunikasikan dalam bahasa asing. Nama produk, merek dagang, perusahaan, lokasi, gedung, jenis usaha, semua dinyatakan dalam bahasa asing. Melalui program jangka pendek, HPBI telah menyoroti dan memberi pengarahannya terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada media massa, papan nama, kain rentang, papan petunjuk jalan, dan papan reklame.

Sementara itu, dalam program jangka menengah, HPBI mengadakan peningkatan dan perluasan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, instansi pemerintah pusat dan daerah, insan pers, penerbit, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan semua organisasi kemasyarakatan dan politik dalam rangka mewujudkan cita-cita pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

TUNTUTAN KESETARAAN

Bambang Kaswanti Purwo

Ketua Umum Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI)



Pada masa-masa awal setelah proklamasi kemerdekaan RI--sebelum lahirnya Pusat Bahasa--pada banyak tempat dapat dijumpai papan bertuliskan "Gunakanlah Bahasa Indonesia". Imbauan ini dirasakan perlu waktu itu supaya orang mulai membiasakan diri menggunakan bahasa nasional dan tidak lagi memakai bahasa Belanda dalam percakapan sehari-hari. Pada masa orde baru selama beberapa dekade terakhir ini--setelah Pusat Bahasa lahir--imbau berganti menjadi

"Pakailah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar", dan belakangan ini diperbarui menjadi "Berbahasa Indonesialah dengan Baik dan Benar". Imbauan ini dilandasi oleh keinginan agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang memiliki sistem yang lebih mantap: bahasa baku. Seiring dengan itu, para penuturnya pun diharapkan mau dan mampu menguasai penggunaan bahasa baku itu.

Sudah hampir dua puluh lima tahun Pusat Bahasa bergigih memasyarakatkan imbauan itu, melakukan berlaksa-laksa penyuluhan ke berbagai penjuru. Buku tata bahasa baku sudah terbit sampai edisi kedua dan tak lama lagi akan lahir edisi ketiganya. Kamus besar sudah sampai pada edisi kedua pula. Akan tetapi, jika direfleksikan: sudah berhasilkah usaha itu? Dari perencanaan bahasa, juga penyuluh bahasa, tidak jarang terdengar keluhan, misalnya, di banyak gerbang setiap kali menyambut hari kemerdekaan RI, masih banyak dijumpai penulisan secara salah: "Dirgahayu HUT RI ke ..." Belum lagi kesalahan penulisan istilah, penulisan ejaan, tanda baca, dan yang lain lagi.

Jika usaha itu dikatakan "belum berhasil", apa kiranya langkah yang dapat menjadi alternatif lain? Pendekatan "penyuluhan", apalagi yang bernada "instruktif", sudah saatnya ditinggalkan, pada era reformasi ini.

Bersamaan dengan itu pula imbauan yang lahir pada masa orde baru itu pun jangianlah dipakai lagi.

Ada dua alasan mengapa imbauan itu perlu ditinggalkan. Pertama, telah terjadi perbedaan tafsiran mengenai arti "bahasa yang baik dan benar". Khayal menganggap bahwa "bahasa yang baik dan benar" identik dengan "bahasa baku", padahal menurut perencana dan penyuluh bahasa, "baik" dan "benar" merupakan dua hal yang terpisah (TBBI, edisi kedua, 1993:22).

- (1) Berapakah Ibu mau menjual bayam ini? [tidak baik, benar]
(2) Berapa nih, Bu, bayemnya? [baik, tidak benar]

Kalimat (1) adalah ragam baku, tetapi itu bahasa yang "tidak baik tetapi benar". Kalimat (2) adalah ragam tak baku, dan itu dapat disebut sebagai bahasa yang "baik tetapi tidak benar". Akan tetapi, apa jawabannya jika ditanyakan kepada guru yang mengajar bahasa Indonesia di sekolah: mana kalimat yang merupakan bahasa yang "baik dan benar"? Mereka akan mengatakan kalimat (1). Kalimat (2) adalah contoh kebalikannya.

Hal kedua yang merupakan persoalan ialah pengertian "benar" dan "tidak benar". Pengertian "benar" dan "tidak benar"--menurut Pusat Bahasa--yang terdapat pada contoh (1) dan (2) berbeda dengan yang terdapat pada contoh (3) dan (4).

- (3) dididik [benar]
(4) di didik [tidak benar]

Pengertian "benar" dan "tidak benar" pada (1) dan (2) merupakan tipe-tipe kalimat, yang masing-masing memiliki konteksnya sendiri-sendiri: yang pertama konteks formal dan yang kedua konteks informal. Adapun pengertian "benar" dan "tidak benar" pada (3) dan (4) merupakan contoh kasus yang mengikuti atau tidak diikuti kaidah baku (atau yang dibakukan).

Kecampuradukan pengertian ini, sekalipun selama ini belum tentu disadari sebagai sesuatu yang campur aduk, membingungkan para pemakai bahasa Indonesia, termasuk para pengajarnya, terutama di peringkat pendidikan dasar dan menengah. Suasana kebingungan dan pbingungan ini sudah barang tentu tidak merupakan daya dukung positif bagi "misi baik" yang dicanangkan sekitar dua puluh lima tahun yang lalu oleh Pusat Bahasa.

Keadaan diperumit lagi oleh apa yang tersirat dari penamaan "benar" dan "tidak benar" pada contoh (1) dan (2). Untuk contoh (3) dan (4) hal itu tidak

menjadi masalah karena berkenaan dengan "penguasaan bahasa": tidak ada sangkut pautnya dengan konteks pemakaian. Namun, untuk contoh (1) dan (2), penamaan itu menyiratkan bahwa pengertian "benar"--oleh Pusat Bahasa--hanya diberlakukan untuk kalimat yang menyandang sebutan "baku". Kalimat (2), yang djumpai pada konteks informal, tidak "layak" memperoleh sebutan "benar". Sekalipun benar-benar dipakai dan djumpai sebagai bahasa yang hidup.

Jadi, meskipun kalimat seperti pada (1)--dalam perbincangan linguistik--dapat disebut "ragam tinggi" dan kalimat seperti pada (2) "ragam rendah", itu hanyalah istilah atau penamaan saja. Kalimat seperti pada (2) tidak perlu "direndahkan" sebagai kalimat yang tidak pernah dapat disebut sebagai kalimat yang "benar". Istilah "benar" dan "tidak benar" dapat tetap dipakai pada contoh (3) dan (4) karena tidak ada sangkut-pautnya dengan ragam formal dan informal, tetapi janganlah lagi pada contoh (1) dan (2).

Kalimat tipe (2) dan kalimat tipe (1) sama-sama merupakan bahasa yang "hidup". Perbedaannya hanyalah terletak pada konteks pemakaiannya. Keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling "menidakkan" (*complementary*), saling melengkapi, dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh karena itu, keduanya layak memperoleh perlakuan yang setara. Kalau yang satu dilimpahi banyak perhatian (banyak diteliti, dibuatkan buku tata bahasanya, kamusnya) yang satu juga samalah perhatiannya. Tidak ada pilih kasih, tidak ada anak mas dan anak tiri.

PUSAT BAHASA DI MATA HISKI

Mursal Esten

Ketua Umum Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (Hiski)



Di mata Hiski (Himpunan Sarjana-Kesusasteraan Indonesia), Pusat Bahasa (Pusat Bahasa) lebih dari sekedar *mitra*, Pusat Bahasa amat berperan membina dan mengembangkan profesi para sarjana kesusasteraan di seluruh Indonesia.

Hampir seluruh sarjana kesusasteraan di Indonesia berurusan dengan Pusat Bahasa. Mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pusat Bahasa. Me

reka ikut sebagai peserta (penatar dan petatar) di dalam penataran-penataran yang dirancang oleh Pusat Bahasa. Kehadiran Hiski sebagai organisasi profesi diprakarsai oleh para alumni penataran sastra Pusat Bahasa itu. Sejumlah doktor sastra di Indonesia lahir melalui program (kerja sama) Pusat Bahasa. Sebutlah, misalnya, nama-nama Fachruddin Ambo Enre, Suripan Sadi Huto-mo, Rachmat Djoko Pradopo, Okke F. Zaimar, Edwar Djamaris, Nani Tuloli, Nafron Hasjim, Faruk HT, Mursal Esten, Sri Rahayu Prihatmi, dan sejumlah master sastra di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Dari segi itu, peran Pusat Bahasa memanglah amat luar biasa. Akan tetapi, dibandingkan dengan perannya di dalam bidang kebahasaan, peran Pusat Bahasa dalam bidang kesasteraan dirasakan masih perlu ditingkatkan. Di dalam bidang kebahasaan Pusat Bahasa telah melahirkan karya-karya yang monumental, seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, konsep tentang *EYD*, *pedoman penyusunan peristilahan*, *istilah-istilah Indonesia berbagai bidang ilmu*, *Politik Bahasa Nasional*, dan lain-lain. Dalam bidang sastra dapat dikatakan belum ada karya-karya monumental yang dihasilkan Pusat Bahasa.

Saya tidak tahu persis penyebabnya. Apakah karena di Pusat Bahasa tidak ada orang yang memiliki kewibawaan (akademis) sekaliber *Prof. Dr. Anton*

M. Moeliono atau *Prof. Dr. Amran Halim* di bidang sastra? Kedua pakar bahasa itu telah memberi warna yang amat dominan terhadap kiprah Pusat Bahasa dan telah melahirkan karya-karya monumental dalam bidang bahasa. Akan tetapi, dalam bidang sastra?

Apakah kendala itu menyangkut ruang lingkup tugas? Bahwa Pusat Bahasa hanya menitikberatkan tugas dan perannya dalam bidang bahasa saja? Agaknya, bukan. Selama ini Pusat Bahasa juga telah melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak dalam bidang sastra. Akan tetapi, belum begitu berarti, belum bersifat monumental.

Di tengah-tengah kehidupan sastra Indonesia yang memprihatinkan, seyogianya Pusat Bahasa ikut peduli. Keprihatinan yang terjadi di dalam *wilayah penikmat* (sastra), *wilayah penciptaan*, dan *wilayah teori dan kritik* haruslah mendapat perhatian Pusat Bahasa.

Pusat Bahasa diharapkan mengambil prakarsa untuk menyiapkan *buku-buku kritik apresiatif* terhadap beberapa karya sastra Indonesia yang penting seperti *Belenggu*, *Atheis*, *Jalan Tak Ada Ujung*, *Robohnya Surau Kami*, *Pengakuan Pariyem*, *Sri Sumarah dan Bawuk*, *Warisan*, ataupun *Saman*. Pusat Bahasa memprakarsai untuk melanjutkan *antologi cerpen* sebagaimana yang telah dirintis oleh Satyagraha Hoerip dulu. Di samping memberi penghargaan kepada sastrawan (dengan hadiah yang memadai) setiap kali kongres (5 tahun sekali) Pusat Bahasa juga dapat menyelenggarakan *Sayembara Penulisan Roman* dengan hadiah 10 atau 20 juta rupiah.

Di dalam bidang teori dan kritik sastra perlu dirumuskan suatu bentuk teori dan kritik sastra yang relevan. Perlu dicari dan dirumuskan suatu *poetica* sastra Indonesia ataupun Melayu. Pusat Bahasa dan Dewan Bahasa dan Pustaka dapat memprakarsai suatu pertemuan ilmiah dengan mengundang para pakar sastra dari kedua bangsa serumpun.

Untuk membina dan mengembangkan sastra Indonesia, terutama yang menyangkut tiga wilayah sastra (penikmat, pencipta, serta teori dan kritik), diperlukan suatu *politik sastra nasional* yang akan menjadi acuan bagi setiap kebijakan dan usaha. Kongres Bahasa Indonesia VII mudah-mudahan dapat memberikan rekomendasi terhadap pentingnya suatu politik sastra nasional.

Semuanya itu tentulah tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pusat Bahasa. Keterbatasan, baik dalam jumlah kewibawaan akademis, yang dimiliki Pusat Bahasa, memerlukan pihak lain untuk melaksanakan program-program dan hasil karya yang monumental dalam bidang sastra. Salah satu pihak tersebut adalah Himpunan Sarjana Kesusastran Indonesia yang secara historis juga merupakan produk dari Pusat Bahasa.

Dengan demikian, di mata Hiski, Pusat Bahasa tidak hanya mitra, tetapi juga adalah *harapan*. Di mata Hiski, Pusat Bahasa bukanlah hanya sebuah lembaga teknis tentang kebahasaan, tetapi adalah sebuah lembaga kebudayaan yang berperan terhadap nilai-nilai budaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Hiski yakin, Pusat Bahasa mempunyai kemampuan untuk menjadi gantungan harapan yang demikian.

PERAN PUSAT BAHASA DALAM PEMBINAAN PERISTILAHAN ILMU DAN TEKNOLOGI INDONESIA

Mien A. Rifai

Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, Jakarta



Ketika memodernkan Bahasa Indonesia melalui penyempurnaan sistem ejaannya pada awal tahun 1970-an, kebijakan penting lain yang bersamaan digariskan juga oleh Lembaga Bahasa Nasional--yang kemudian dijelmakan menjadi Pusat (Pembinaan dan Pengembangan) Bahasa--adalah membina peristilahan keilmuannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pada saat diterbitkannya *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Di*

sempurnakan pada tahun 1975, diterbitkan pula *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jarang orang mengetahui bahwa kedua pedoman mahapenting tersebut merupakan contoh nyata hasil sinergi kegiatan kerja sama sekumpulan pakar bahasa dan pakar ilmu dan teknologi. Seandainya kedua kelompok pakar tadi bekerja sendiri-sendiri, pastilah tidak mungkin dalam waktu yang relatif pendek akan dapat dibuahkan perangkat panduan yang begitu komprehensif cakupannya, amat luas dampaknya, serta bervisi sangat jauh ke depan.

Keberhasilan gemilang ini merupakan kredit bagi jajaran pimpinan Pusat Bahasa selama ini karena dengan sabar tetapi gigih serta bertaat asas mereka terus membuka peluang untuk mempertemukan secara fisik kedua kelompok pakar--yang karena hakikat dan fitrah bidang kespesialisasiannya sering kali bersilang pendapat--untuk mempersatukan pandangan yang berbeda. Menarik untuk dicatat kerajinan seorang pakar fisika dalam mengumpulkan sinonim kata-kata 'terlupakan' untuk dijadikan contoh dalam pedoman ejaan yang sedang digarap, atau kesungguhan seorang pakar intonasi mencoba memahami konsep biologi yang sulit agar bisa memberikan pertimbangan kebahasaan dalam mencari padanan istilah yang berkaitan dengan kehidupan sel hewan. Agaknya memang akan sulit diulang atau ditemukan tolok bandingannya pola kebersamaan dalam bekerja tanpa pamrih sejempuit ilmuwan berlatar

belakang berbagai disiplin ilmu, yang dengan hanya bermodalkan kecintaannya pada bahasa Indonesia telah berjaya meletakkan landasan yang kokoh untuk mencendekiakan bahasa bangsanya itu. Kepedulian dan *commitment* mereka terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar telah membuahkan hasil bermanfaat yang secara nyata dapat dijadikan titik tolak untuk memajukan bahasa dan, dengan demikian, untuk meningkatkan harkat bangsanya.

Sebagai akibatnya, dalam tiga dasawarsa terakhir ini pembakuan bahasa keilmuan menunjukkan kemajuan yang sangat mencolok dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena selain peristilahan ilmu-ilmu dasar (biologi, fisika, kimia, dan matematika) yang diprioritaskan penanganannya, telah digarap pula puluhan bidang lain yang dianggap penting, mulai dari pertanian sampai akuntansi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sekarang telah tersusun suatu senarai berisikan hampir 150.000 istilah ilmiah yang secara nyata memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pekerjaan raksasa ini telah melibatkan ratusan pakar bermacam bidang ilmu yang bekerja di pelbagai instansi pemerintah dan swasta, yang dengan penuh ketekunan dipandu dan dibantu oleh pakar-pakar dari Pusat Bahasa. Seperangkat demi seperangkat senarai tadi yang sudah tuntas penggarapannya--terutama sesudah dicapai kesepakatan serantau dengan pihak Malaysia dan Brunei Darussalam melalui kegiatan Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia (MABBIM)--lalu diterbitkan untuk diperkenalkan kepada masyarakat.

Sekalipun perangkat istilah yang dihasilkan sudah mengalami penilikan dan penyaringan berlapis yang sangat ketat, pembakuan istilah tadi tetap berada di tangan para pemakai bahasa di lapangan, khususnya para ilmuwan yang aktif melakukan penelitian dan giat menulis, menerbitkan serta menyebarkan hasil kegiatan kecendekiannya. Pemakaian luas suatu istilah yang ditawarkan Pusat Bahasa menentukan, dan dengan demikian, pembakuan istilah bersangkutan. Istilah seperti *plasma nutfah* sebagai padanan istilah asing *germplasm* cepat dapat diterima masyarakat pemakai secara luas. Pada pihak lain, istilah *sintasan* untuk mengindonesiakan *survive* masih jarang dipakai orang, karena konsep *survive* sendiri memang tidak begitu sering dipergunakan orang dalam pembicaraan dan pembahasan sehari-hari. Sebaliknya istilah *hasil guna* dan *daya guna*, atau *mangkus* dan *sangkil*, ternyata kurang laku karena sulit dipahami maksudnya dan menimbulkan keragu-raguan, sehingga masyarakat pemakai lebih menyukai bentuk serapannya yaitu *efektif* dan *efisien*.

Berkat tersedianya perangkat peristilahan yang jumlahnya mencukupi tadi, dapatlah dimengerti jika tulisan ilmiah tentang bidang ilmu dan teknologi

yang tercanggih pun kini sudah dapat dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan medium bahasa Indonesia. Jumlah tesis magister, disertasi doktor, atau hasil penelitian dalam berkala ilmiah yang mengupas ilmu serba muskil seperti rekayasa genetika atau telematika, semakin hari semakin meningkat. Penggalakan tidak langsung ke arah ini terjadi karena untuk keperluan promosi karir seseorang, nilai kredit karya ilmiah berbahasa Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan karya yang ditulis dalam bahasa asing. Sejarah memang masih harus membuktikan apakah hasil karya keilmuan dalam bahasa Indonesia tadi akan dapat mengangkat harkat ilmuwan penulisnya dalam kancah internasional. Satu hal sudah pasti: karya ilmuwan Indonesia sekaliber Sartono Kartodirjo atau Taufik Abdullah yang ditulis dalam bahasa Indonesia sudah sering diacu oleh ilmuwan asing dalam penelitian ilmiah terkait yang mereka lakukan. Memang ternyata bahwa karya yang bermutu akan selalu dicari untuk diacu oleh orang sejangat dengan tidak mempedulikan medium bahasa yang dipergunakannya.

Keberhasilan pembinaan istilah ilmiah bahasa Indonesia ini memang belum sempurna sebab pemasyarakatan kosakata teknis yang begitu banyak tadi masih sering dirasakan kalangan pemakai kurang lancar jalannya. Senarai dan kamus yang sudah dirampungkan tidak mudah didapatkan di toko buku, karena kebijakan umum yang berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerbitan kurang mendukungnya. Sedikitnya tiras penerbitan senarai dan kamus tadi, serta mahalannya harga jual buku, ternyata ikut mengurangi kepesatan penggunaan istilah ilmiah yang dibentuk secara bersusah payah oleh Pusat Bahasa bersama mitra kerjanya. Akan tetapi, karena hanya bersifat teknis, masalah ini mungkin mudah untuk mengatasinya. Sekalipun demikian, tidak mapannya budaya membeli buku di kalangan kaum terpelajar Indonesia--antara lain karena mahalannya harga buku di pasaran--merupakan masalah tersendiri yang juga harus segera dipecahkan.

Hambatan lain yang lebih sulit penyelesaiannya adalah tidak sempurnanya penguasaan kemampuan berbahasa yang baik dan benar di kalangan peneliti Indonesia. Selain itu, ketaatasasan dan kedisiplinan mereka dalam menggunakan peristilahan juga tidak begitu kokoh, dan keadaan ini diperburuk oleh kuatnya tradisi yang menumbuhkan 'dialek' setempat karena kuatnya pengaruh almamater atau kondisi lingkungan kerja lainnya. Semua keadaan ini menyebabkan rendahnya kualitas karya ilmiah yang diterbitkan peneliti Indonesia sehingga kurang bergaung dampaknya dalam kancah nasional apalagi di forum internasional. Persoalan ini semakin diperberat oleh rendahnya kuantitas karya ilmiah yang diterbitkan secara mapan oleh mereka sehingga juga merupakan

penghalang upaya mempercepat pemasyarakatan istilah tadi. Berbagai ragam kendala ini bersifat seperti lingkaran setan, yang pada akhirnya tidak menjadikan senarai dan kamus istilah ilmiah sebagai komoditas yang mutlak diperlukan para ilmuwan pelaku ilmu dan teknologi untuk dapat mempertahankan kedudukan pangkat ataupun status sosial mereka di masyarakat.

Dengan sendirinya tidak semua masalah seputar pembinaan istilah ilmiah itu menjadi tanggung jawab Pusat Bahasa semata-mata. Semua warga negara Indonesia berkepentingan untuk memodernkan dan mencendekiakan bahasa Indonesia, sehingga mereka berkewajiban untuk ikut bahu-membahu bersama Pusat Bahasa memajukan bahasa nasional kita itu. Keproaktifan semua pihak memang dituntut agar hasil gemilang yang sudah diraih berkat kegiatan Pusat Bahasa selama ini tidak luntur begitu saja oleh gangguan riak yang kalau tidak diwaspadai berpotensi untuk membengkak dan tumbuh menjadi gelombang yang berbahaya bagi perkembangan bahasa Indonesia selanjutnya. Dalam jangka panjang, sebagai pemilik bahasa pusaka ini kita harus bertekad untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dunia, atau paling tidak salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PUSAT BAHASA: KENANGAN DAN HARAPAN

Taufik Abdullah



Rasanya saya pernah mengenal sebuah peribahasa lama yang menyatakan--kalau boleh memakai bahasa yang berilmiah-ilmiah--bahwa sudut pandangan kita menentukan bentuk realitas objektif yang kita hadapi. Jadi, realitas sering dilihat secara subjektif. Barangkali peribahasa itu berbunyi "lain tempat berdiri, lain yang tampak". Tetapi barangkali juga bukan begitu bunyinya. Menyesal juga saya dengan kelupaan saya ini. Saya me-
rasa kehilangan sebuah hiasan dalam proses wacana. Kehilangan saya rasakan--kalau dibolehkan sekali lagi bergaya yang meninggi-ninggi--sebagai contoh sederhana dari "kerugian kultural" dalam proses perubahan. Bukankah ini ucapan yang meninggi-ninggi? Meskipun begitu, saya berharap mudah-mudahan nanti saya dapat menemukan kembali apa yang saya rasakan sebagai kehilangan ini.

Dengan mengatakan ini saya tanpa sengaja telah menyampaikan sebuah harapan pada Pusat Bahasa. Bagaimanakah dalam usaha "pengayaan" (atau *enrichment*, kalau mengikuti kebiasaan saya yang kurang terpuji dalam memakai bahasa) perbendaharaan kultural bahasa, ingatan terhadap sesuatu yang telah dimiliki tidak hilang begitu saja? Dengan sengaja saya mengatakan "ingatan", bukan "pemakaian". Saya sadar bagaimanapun juga pilihan kosakata, ragam, dan gaya bahasa dalam proses dialog tidak hanya bergantung pada perubahan sosial, kultural, dan kebiasaan pribadi, tetapi juga pada kesadaran waktu atau sebut saja, waktu sosial.

Mengapa saya berpanjang-panjang, padahal saya cuma ingin mengatakan bahwa saya hanya akan berbicara tentang Pusat Bahasa dari sudut tempat saya berdiri? Tetapi, sudahlah, bukankah tidak selalu terlalu mudah untuk membedakan mana yang esensial dan mana pula yang aksidental dalam proses dialog? Mula-mula Pusat Bahasa hanya tampil di hadapan saya sebagai mem-

buat istilah" atau, barangkali lebih tepat, "penerjemah istilah" ilmiah. Manfaat kerjanya saya rasakan sekian puluh tahun yang lalu, ketika saya yang tidak pernah sempat belajar bahasa Belanda (maktumlah saya "anak Kiblik yang revolusioner", menurut ungkapan awal tahun 1950-an) menjadi mahasiswa yang harus membaca literatur yang berbahasa kolonial itu. Selanjutnya, bagi saya Pusat Bahasa adalah "ejaan yang disempurnakan", "pemeran TV tentang berbahasa yang baik dan benar", "penyelenggara Kongres Bahasa", "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Dan, terlebih lagi--bahkan kini terasa lebih dari yang lain-lain--bagi saya Pusat Bahasa adalah penerbit naskah-naskah lama, yang telah ditranskripsi ke huruf Latin atau, bahkan, diterjemahkan, ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun kadang-kadang saya menggerutu juga pada "kepelitan" Pusat Bahasa untuk sekadar memberitahu kepada saya, sang pembaca, tentang berbagai keterangan yang elementer mengenai naskah yang diterbitkan itu--tentang tahun penulisan, versi yang dipakai, pengarang atau penyalin, dan sebagainya--tetapi jasa penerbitan ini bagi kerja keilmuan saya tak ternilai artinya. Melalui naskah-naskah yang telah mengalami "pemudahan" yang sangat hebat ini saya seakan-akan masuk ke alam pikiran dan "ingatan sejarah" dari berbagai tradisi kita yang hidup dua--tiga abad yang lalu. Bagaimanakah kalau sekiranya saya sendiri yang harus mencari dan berhadapan langsung dengan naskah yang belum dicetak, belum ditranskripsi, atau belum diterjemahkan?

Di samping itu, bagi saya Pusat Bahasa adalah pula *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* yang saya rasakan sebagai enggan bersahabat dengan saya, bahkan seakan-akan mengumumkan "perang terbuka" kepada saya. Buku ini, seperti saya katakan dalam sumbangan saya yang dimuat sebagai "epilog" dalam *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996), menjadikan saya sebagai "orang luar", yang tak berhak mengetahui, jangankan ikut bicara, masalah "orang dalam". Pendeknya saya seakan-akan merasakan "cinta yang ditolak". Tata bahasa telah menjadi wilayah yang bersifat esoteris. Tetapi, biarlah, tata bahasa memang bukan cangkir kopi saya. Dan lagi, bukankah kekecewaan adalah irama dari kehidupan? Namun begitu, saya teringat pada dua kejadian yang menarik dalam "biografi" Pusat Bahasa.

Kejadian pertama berkaitan dengan almarhum Prof, Sutan Takdir Alisjahbana. Siapakah yang akan dapat membantah bahwa Pak Takdir (atau STA) adalah salah seorang "pejuang bahasa" yang paling terkemuka? Penulis novel, redaksi Balai Pustaka, penerbit dan editor majalah Poedjangga Baroe, anggota Komisi Istilah, penulis *Tata Bahasa Indonesia*, yang sekian lama dipakai di

sekolah-sekolah, dan entah apa lagi. Dengan latar belakang seperti ini, bukankah aneh juga terasa ketika beberapa tahun yang lalu (1986) ia dengan lantang mengusulkan agar Pusat Bahasa dibubarkan saja? Karena aneh, tebersit juga sebuah pertanyaan. Apakah ia bersungguh-sungguh dengan usulnya ini?

Barangkali tidak. Sebagai seorang ahli hukum ia tentu tahu juga bahwa sebuah lembaga kenegaraan tidak mungkin dibubarkan hanya karena kejengkelan yang dilontarkan seseorang, betapapun mungkin terhormatnya ia dalam masyarakat. Kalau usul itu datang dari Presiden atau Menteri, tentu saja masalahnya berbeda. Namun, serius atau tidak Pusat Bahasa--entah sengaja, entah bukan--seakan-akan tertantang untuk mengadakan serangan balik. Inilah kejadian kedua. Berkat *lobby* yang kelihatannya cukup cangguh dari para pentolan dan mantan pentolan Pusat Bahasa, Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) pun tampil dengan usul agar status Pusat Bahasa dinaikkan ke tingkat lembaga non-departemental. Jadi, terlepas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi setingkat dengan status LIPI, BPPT, dan sejenisnya. Maka sebuah "panitia nasional"--atau apa pun mungkin nama resminya--dibentuk untuk memperjuangkan peningkatan status ini. Tampaknya ini bukan sekadar impian, tetapi sebuah usul yang benar-benar ingin diperjuangkan. Hanya saja, siapa pun juga yang tahu sekadarnya tentang sistem kenegaraan dan proses pengambilan keputusan, telah sejak awal memperkirakan bahwa perjuangan yang penuh semangat itu akan sia-sia belaka. Setelah sekian lama waktu berjalan memang ternyata juga bahwa perjuangan itu telah "layu sebelum berkembang".

Kedua kejadian ini hanya meninggalkan kenangan dan catatan saya, tetapi tidak mengubah apa-apa. Situasi "sebelum" dan "sesudah" tak memperlihatkan perbedaan yang berarti. Sebaiknya kita menganggap saja dua kejadian itu sebagai sebuah proses dialog dari dua pandangan yang sama-sama mencintai bahasa nasional. Usul STA yang berapi-api itu tak lebih dari pantulan kejengkelannya pada Pusat Bahasa. Secara khusus ia dongkol dengan istilah dan kata baru yang diperkenalkan Pusat Bahasa dan usul Kongres Bahasa adalah pantulan dari kekesalan mengapa "bahasa yang baik dan benar" masih juga belum merupakan realitas dalam proses komunikasi.

Usul STA tampaknya lebih dari sekadar kejengkelan saja sebab lama sebelum usul yang "radikal" itu dilontarkan ia juga telah mengecam strategi kebahasaan yang ditempuh Pusat Bahasa dalam berhadapan dengan dinamika dari masyarakat pemakai bahasa. Kalau ini yang menjadi masalah tampaknya ia tidak sendirian. Bahkan pada suatu saat, di peralihan dekade ketujuh abad

ke-20, ketika ejaan baru akan diperkenalkan, siapakah yang tidak menyatakan "perang terbuka" pada Pusat Bahasa?

Apakah sesungguhnya yang menjadi masalah? Memang benar bahasa Indonesia bukanlah bahasa primordial, tetapi bahasa yang dengan sengaja dibina untuk menjadi bahasa nasional yang modern, kaya, dan tertata dengan baik. Akan tetapi, bukankah justru karena itu masyarakat bangsa beranggapan bahwa bahasa ini adalah juga milik mereka? Bukankah mereka adalah juga bagian dari proses pembentukan dan perwujudan bangsa? Kalau demikian, mereka--sang pemakai dan pecinta bahasa--merasa mempunyai hak untuk berbicara tentang ke mana dan bagaimana sebaiknya bahasa ini dibina. Jika saja rentetan kejadian di sekitar "ejaan baru" diingat kembali, barangkali akan tampak bahwa yang menjadi masalah sesungguhnya bukanlah terutama soal perlu atau tidaknya perbaikan ejaan, bahkan juga bukan pula tentang corak perbaikan yang diperkenalkan. Keberatan umum yang utama ialah gaya hegemoni yang sengaja ataupun bukan yang ditampakkan oleh para pembina dan pengembang bahasa. Semakin para ahli bahasa memperagakan keahlian, semakin berkembanglah sinisme dan semakin jauhlah hasrat pembinaan tercapai. Tampaknya pembinaan bahasa--bahasa sebagai komunikasi simbolik yang menjadikan pertukaran pesan dapat berjalan lancar--dalam konteks yang hegemoni kurang sesuai.

Bahasa memang tak mudah dilepaskan dari sistem kekuasaan. Bahkan boleh dikatakan bahwa kekuasaan memerlukan perangkat bahasa untuk memperkuat legitimasi dan dominasinya terhadap masyarakat. Kebiasaan memakai kosakata yang "keras" (*violent words*) dan gaya serba hiperbol dari rezim Demokrasi Terpimpin atau euphemisme dan kramanisasi (dan sankritisasi simbol) dari rezim Orde Baru adalah contoh dari strategi penguatan paradigma politik dan legitimasi kekuasaan dengan memakaikan mekanisme bahasa. Akan tetapi, justru karena kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat antara kekuasaan yang hegemonik dengan pemakaian bahasa inilah kecenderungan hegemoni: yang bertolak dari kekuasaan, yang dipakaikan dalam usaha membina bahasa itulah sinisme, bahkan oposisi terhadap pembinaan bahasa tak terelakkan. Jadi, jika saja pemahaman atas kecenderungan sosial ini diperhatikan, Kongres Bahasa tidak akan sampai pada usul peningkatan dan penambahan kekuasaan "demi pembinaan bahasa".

Sistem otoritas dalam bidang pengetahuan bahasa nasional tidak bisa disamakan dengan sistem otoritas dalam kedokteran, teknik, atau bahkan ekonomi sekalipun. Bahasa bukan sesuatu yang objektif yang "ada di sana" (*something out there*), tetapi adalah sesuatu yang subjektif yang merupakan

bagian dari kesadaran. Sistem otoritas dalam kebahasaan adalah sesungguhnya pantulan dari kewibawaan yang diberikan dengan persetujuan pemakai bahasa, bukan sesuatu yang dapat menuntut pengakuan, apalagi kepatuhan.

Memang bahasa tidak boleh dibiarkan berjalan atau berlari tanpa arah. Anarki dalam pemakaian bahasa bukan saja akan menimbulkan kegalauan kultural, tetapi mungkin pula mengubah masyarakat-bangsa menjadi sekian banyak tumpukan "komunitas orang asing", tanpa jalinan komunikasi yang bermakna. Kejernihan bahasa dan terjalannya komunikasi simbolik yang rapi adalah landasan yang kuat bagi terjalannya integrasi sosial dan nasional. Karena itulah peranan Pusat Bahasa sangat penting. Sebab itu pulalah Pusat Bahasa harus mempunyai "strategi sosial", bukan hanya "kebijakan bahasa".

Barangkali dengan ini saya telah "berkhotbah kepada orang yang telah yakin" atau berbicara tentang hal yang sejak lama telah diketahui. Boleh jadi, demikianlah halnya. Hanya saja komposisi keahlian dari Pusat Bahasa belum membayangkan pengetahuan yang elementer ini. Saya tahu, dalam usaha merumuskan istilah-istilah teknis, Pusat Bahasa memakai tenaga ahli dari disiplin yang diperlukan, tetapi usaha pengembangan pemakaian "bahasa yang baik dan benar" memerlukan strategi sosial-kultural yang tepat dan teliti. Perubahan struktural yang terjadi dengan cepat dan membanjirnya segala macam corak informasi mau tak mau memberi dampak yang mendalam pada segala aspek pemakaian bahasa. Baiklah saya tak perlu berbicara tentang tantangan masa depan, dengan segala cirinya, sebab ini akan membawa kita kepada masalah lain yang lebih kompleks. Walaupun begitu, kesimpulannya jelas. Bukankah sudah waktunya juga Pusat Bahasa merekrut staf yang tetap dari disiplin ilmu sosial? Tersedianya tenaga ahli ilmu sosial yang berkualitas dan sensitif semakin mendesak dalam usaha Pusat Bahasa merencanakan strategi sosial kebahasaan.

PUSAT BAHASA: PENILAIAN DAN HARAPAN

Zainuddin Taha

FPBS IKIP/Program Pascasarjana Unhas Ujung Pandang



Tanggal 28 Oktober 1998, Sumpah Pemuda genap berusia 70 tahun. peringatan peristiwa penting dan bersejarah itu di tengah era reformasi dewasa ini membuat kita semakin kagum atas jasa pemuda yang memprakarsai lahirnya ikrar yang intinya *satu tanah air, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan*. Dalam butir-butir sumpah itu terbayang di hadapan kita keagungan visi persatuan yang menyemangati perjuangan para pemuda generasi

prakemerdekaan itu. Untuk "persatuan Indonesia", mereka rela berkorban dan mengebelakangkan kepentingan golongan, suku, dan bahasa daerah mereka masing-masing. Kekaguman atas semangat persatuan itu kita wujudkan dengan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sejak Sumpah Pemuda diikrarkan, bahasa Indonesia telah menjalani perkembangan yang menakjubkan di berbagai sektor kehidupan. Di semua sektor, kosakata mengalami peningkatan yang cepat. Istilah dan kosakata baru bahasa Indonesia terus bertambah sehingga makin menambah kemampuannya untuk menjadi wahana komunikasi pengungkapan pikiran dan pendapat pada semua bidang kehidupan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia telah membuktikan keandalannya menjadi pemersatu seluruh bangsa Indonesia dan dalam menyampaikan konsep-konsep pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengaruh dan gengsi bahasa Indonesia di mancanegara juga makin meningkat yang ditandai oleh makin besarnya minat bangsa-bangsa lain dalam mempelajarinya. Dewasa ini bahasa Indonesia telah diajarkan di 29 negara, malahan ada negara yang menjadikannya sebagai bahasa asing utama.

Bahasa Indonesia yang terus mengalami kemajuan itu, perlu terus-menerus dibina dan dikembangkan sehingga bangsa Indonesia benar-benar akan me-

miliki alat komunikasi yang canggih sesuai dengan keperluan pemakainya. Dalam kaitan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa itu, tidak sedikit prestasi yang telah dihasilkan oleh Pusat Bahasa.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/0 Tahun 1975 yang diubah dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 0222g/0/1980 ini diberi tugas untuk menentukan dan merencanakan kebijakan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Tugas itu dilaksanakan oleh Pusat Bahasa melalui upaya pengembangan jaringan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan lain di dalam dan di luar negeri, baik pemerintah maupun swasta. Berkat kerja sama itu pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Nusantara mengalami kemajuan yang berarti.

Berdasarkan catatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sampai tahun 1993 telah diteliti 241 bahasa daerah, telah diolah lebih kurang 190.000 istilah berbagai bidang ilmu, telah disusun dan diterbitkan 4 seri kamus ilmu dasar, 5 judul kamus bahasa Indonesia, 54 kamus bahasa daerah, lebih kurang 75 judul kamus dan daftar istilah, 67 judul pedoman kebahasaan dan lebih dari 80 judul buku sastra. Selain itu, telah disusun dan diterbitkan pula *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Dalam hal peningkatan kemampuan penggunaan bahasa secara baik dan benar dan pembentukan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, Pusat Bahasa juga melaksanakan penataran dan penyuluhan bahasa Indonesia kepada berbagai lapisan masyarakat.

Di samping prestasi yang membanggakan di atas, Pusat Bahasa kini masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan tugas yang tidak ringan. Walaupun jumlah pemakai bahasa Indonesia terus meningkat dengan mengesankan, Sensus Penduduk 1990 masih mencatat adanya sekitar 17% dari jumlah penduduk yang belum paham bahasa Indonesia. Di antara mereka yang mengaku dapat berbahasa Indonesia itu, tidak sedikit jumlahnya yang belum mampu menggunakannya secara baik dan benar. Bahkan, pengalaman kita sehari-hari memperlihatkan masih banyak perilaku pemakai bahasa yang kurang mencerminkan sikap bangga dan setia terhadap bahasa Indonesia.

Ejaan, lafal, kosakata, istilah, dan tata bahasa bahasa Indonesia masih mengandung kelemahan sebagai bahasa baku dan bahasa modern. Inventarisasi, kodifikasi, dan penelitian bahasa daerah banyak yang belum terlaksana disebabkan oleh terbatasnya dana dan kurangnya tenaga terampil kebahasaan yang dimiliki. Di Indonesia bagian Timur saja, masih terdapat puluhan, bahkan ratusan bahasa daerah yang belum pernah ditangani, baik mengenai inven-

tarisasi dan kodifikasi strukturnya maupun dalam penelitian dimensi sosial budayanya.

Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia bertujuan menciptakan keadaan kebahasaan yang mantap, yang memungkinkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing masing-masing menjalankan fungsi sesuai dengan kedudukannya. Pemantapan fungsi bahasa tersebut dalam masyarakat Indonesia, yang mengalami perkembangan pesat dewasa ini, memerlukan perhatian yang besar dari kita semua. Perubahan cepat lingkungan kebahasaan, perkembangan teknologi komunikasi yang makin canggih, dan persaingan antarnegara dalam era kesejagatan membuat situasi kontak bahasa menjadi fenomena sehari-hari yang tak terelakkan. Kontak bahasa yang makin intensif itu mau tidak mau akan mempengaruhi ekologi setiap bahasa, yang pada gilirannya akan turut mempengaruhi pula sikap serta kebanggaan terhadap bahasanya masing-masing. Keadaan seperti itu dengan sendirinya menuntut adanya garis haluan kebahasaan yang jelas dan terarah. Itulah sebabnya, Pusat Bahasa perlu terus-menerus mengkaji dan menelaah garis haluan dan politik bahasa nasional yang ada untuk disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dalam memasuki abad ke-21, Pusat Bahasa diharapkan dapat makin meningkatkan kerja samanya dengan lembaga-lembaga pendidikan, badan, dan instansi pemerintah dan swasta, penerbit, dan media massa terutama untuk meneruskan program yang berkaitan dengan pemantapan kajian linguistik, tata bahasa, pembakuan aspek-aspek bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan penyebarluasan hasil-hasil kajian dan pembakuan tersebut ke seluruh lapisan masyarakat yang memerlukannya. Pusat Bahasa juga diharapkan terus melakukan pengkajian dan penilaian terhadap keadaan penggunaan bahasa di pelbagai bidang untuk mengetahui keadaan dan masalah penggunaan bahasa yang sebenarnya, mengkaji dan membentuk berbagai model laras bahasa yang sesuai dengan keperluan masyarakat modern untuk keperluan pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dirgahayu Pusat Bahasa dalam memasuki abad ke-21.

PUSAT BAHASA DI SELA-SELA BELANTARA MASALAH SASTRA INDONESIA

Taufik Ismail



Mungkin dari semak-semak persoalan dalam sastra Indonesia, tidak akan keliru bila dikatakan bahwa yang pahng banyak disebut orang adalah merosotnya minat masyarakat membaca karya sastra⁽¹⁾, dan per-tandanya sudah jelas, yaitu rendahnya tiras buku sastra⁽²⁾. Kuantifikasinya dapatlah dicari pada berbagai publikasi. Penyebabnya tentu dapat dilihat dari ber-bagai sudut pandang. Orang kurang terangsang, atau

tidak diajak tertarik membaca karena sepinya ulasan dan kritik sastra di surat kabar dan maialah⁽³⁾ serta tidak adanya acara sastra dan pembicaraan buku sastra di media elektronik⁽⁴⁾. Tapi tidak mustahil pula, atau juga sangat mung-kin, karena mutu karya sastra itu sendiri susut⁽⁵⁾ sehingga para pecinta lama, terutama yang menguasai bahasa asing, berpaling dari karya sastra bangsa sendiri. Sangat sedikitnya diadakan sayembara sastra⁽⁶⁾ dengan hadiah yang layak juga mengurangi kemungkinan sastrawan mempertinggi frekuensi penu-lisan yang akan memungkinkan dia mempertinggi kualitas karyanya pula.

Kemerosotan mutu ini barangkali makin anjlok karena anemisna ide atau tema berikut penggarapannya di dalam karya-karya sastra kita⁽⁷⁾, sunyi dan lesunya lalu-hntas pikiran di antara kalangan sastra, yaitu pengarang, kritikus, dosen, guru, penerbit, dan pembaca itu sendiri⁽⁸⁾ yang berupa seminar, sim-posium, diskusi panel, dan sejenisnya.

Kecurigaan besar orang adalah bahwa sastrawan itu sendiri kurang mem-baca. Memasuki kehidupan dan menghayati denyut nadi bangsa, ya, tetapi be-renang di danau khazanah literatur dunia, kurang. Penguasaan bahasa asing terbatas, bahkan untuk sastrawan yang lahir dan dibesarkan di ibukota, tidak pula menguasai satu pun bahasa daerah, yang semestinya akan memperkaya

perbendaharaan batin dan kosakatanya. Sastrawan kita kurang terdedah atau kurang *exposed* pada pergaulan sastra-tetangga, apalagi sastra-dunia, terutama dalam bacaan dan juga kontak serta pertemuan⁽⁹⁾. Dalam pergaulan luar itu terasa benar lemahnya sastrawan Indonesia dalam berorganisasi⁽¹⁰⁾.

Bepergian ke luar negeri masih tetap luks bagi mayoritas sastrawan Indonesia, apalagi di tahun 1998 ini dia dicekal dengan satu juta rupiah uang fiskal. Dari sisi pandang orang luar, maka sedikit sekali dikenal sastra Indonesia di mancanegara melalui terjemahan bahasa asing⁽¹¹⁾.

Sebuah ilustrasi kuantitatif yang sedih: institusi yang aktif menerjemah karya sastra pilihan untuk dibaca orang luar cuma satu, yaitu Yayasan Lontar. Di negara jiran kita, paling tidak ada empat buah. Jadi, ditarik dari perbandingan penduduk, mestinya Indonesia punya 40 institusi semacam Yayasan Lontar itu. Tetapi kita punya cuma satu. Sangat sedih.

Sekarang mari kita menoleh ke institusi pendidikan tinggi kita. Susah dan seret untuk menarik minat studi sastra Indonesia di perguruan tinggi⁽¹²⁾, yang juga terdapat di seluruh negara berkembang, belum bertanding sudah kalah 7-0 dengan minat studi ilmu eksakta/sains dan ekonomi/sosial. Jadi, tidak mengherankan bila tampak kurang pula perhatian pada karya sastra Melayu klasik, sastra daerah klasik, dan karya sastra daerah kontemporer⁽¹³⁾, yang padahal kesemuanya ini modal pokok kita dalam memperkaya wawasan sastra Indonesia mutakhir.

Anemi minat ini jadi penyebab utama kurang naiknya jumlah pengulas dan kritikus sastra⁽¹⁴⁾, dan juga seretnya pertambahan S-3 ilmu sastra dibandingkan dengan S-3 ilmu eksakta/sains dan ilmu ekonomi/sosial⁽¹⁵⁾. Ada sebuah universitas negeri yang sesudah lebih sedikit 30 tahun baru punya seorang dosen sastra dengan kualifikasi S-3.

Apabila di fakultas-fakultas eksakta tak sedikit S-3-nya berumur kepala 3, muda, segar dengan daya lenting yang tinggi, S-3 anyar humaniora banyak betul berumur sejengkal dari masa pensiun atau malah sudah lewat, tetap terhormat tapi ibarat mobil di zaman onderdil susah, di jalan tol ilmu pengetahuan biasanya tidak berani melesat kencang di jalur sebelah kanan. Mereka melaju di jalur kiri secara rutin dan *safe-safe* saja 35 kilometer satu jamnya.

Di masyarakat masih saja sastra mendapat salah-beban, yaitu dianggap bertugas mengubah ketimpangan sosial-politik⁽¹⁶⁾, mengambil-alih kerja pengambilan keputusan. Salah-beban ini berkelanjutan pula pada fenomena masih adanya pelarangan karya sastra⁽¹⁷⁾, tetapi barangkali ada harapan mulai akan berubah selepas prahara Mei 1998 ini.

Di kalangan calon pengarang, terutama di daerah, masih dirasakan lambatnya proses desentralisasi kegiatan sastra⁽¹⁸⁾ walaupun sebenarnya bila dibandingkan suasananya dengan 10 tahun yang lalu, sentralisasi itu sudah lebih mengendor. Frekuensi kegiatan sastra di luar Jakarta, juga penerbitan karya sastra, terutama puisi dalam tiras terbatas, meluas di berbagai kota.

Jarangnya penghargaan pada karya sastra dan sastrawannya⁽¹⁹⁾, masih dirasakan terus, terutama di zaman ketika prestasi olahraga jauh lebih dihargai karena memang dapat dijual pada penaja yang berkepentingan menjajakan produknya di media massa elektronik. Karya sastra, tidak beruntung dapat masuk ke dalam mekanisme ekonomi semacam ini. Dengan sendirinya sastrawan tak dapat pula disetarakan perolehan rezekinya dengan petenis, pebulutangkis, dan pengangkat besi yang memenangkan pertandingan di bidangnya. Di luar penajaan semacam di olahraga ini, karya sastra dan sastrawan tidak pula dihargai dengan layak oleh masyarakat dan pemerintah.

Fenomena berkelanjutan yang membandel adalah cuma satunya majalah bulanan sastra⁽²⁰⁾ di Indonesia, yaitu *Horison*, yang ketika karangan ini dituhs berusia 32 tahun. Sekitar dua dasawarsa di tahun 50-an dan 60-an, kita melihat publikasi majalah sastra dan seni sekitar 5--6 judulnya. Di Mesir hari ini, terdapat 12 majalah bulanan puisi, cerpen, drama, dan tinjauan buku. Ditarik dari perbandingan jumlah penduduk Mesir dan Indonesia, maka seharusnya Indonesia punya 42 majalah bulanan sastra semacam *Horison*. Empat puluh dua, sepantasnya. Tapi kita cuma punya satu. Betul-betul sedih.

Namun, ada juga hal yang membesarkan hati, yaitu bahwa *Horison* kini punya sisipan *Kakilangit*, untuk bacaan pelajar SMU, Pesantren, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Kejuruan. Dengan demikian, *Horison* melakukan penetrasi ke sekolah-sekolah itu di seluruh Indonesia, kini sudah memasuki tahun kedua. Fenomena ini belum pernah dialami oleh majalah *Kisah*, *Prosa*, *Cerpen*, dan *Sastra*.

Penyakit kronis yang kita idap sebagai bangsa adalah rabun membaca dan lumpuh menulis, dan epidemi ini etiologinya terdapat dalam tercecernya pengajaran sastra dan mengarang di sekolah⁽²¹⁾. Budaya membaca buku, yang di seluruh dunia dimulai melalui keharusan membaca karya sastra di sekolah, terabaikan di tingkat SLA kita sejak 1950.

Bila di negara-negara lain siswa membaca antara 6 sampai 30 buku sastra selama 3--4 tahun di SLA (membaca tamat, diuji, menulis ulasan), maka di negeri kita siswa kita membaca 0 (nol) buku. Di sini mereka menghafal ringkasan novel, dan membaca 2--3 puisi penyair terkemuka.

Bila di negara-negara lain mengarang bukan saja diwajibkan di kelas bahasa, tapi juga di kelas sejarah, geografi dan ekonomi, maka di Indonesia itu cuma urusan kelas bahasa. Di tempat-tempat lain di sekolah menu mengarang sekali seminggu, diberikan pada guru, diperiksa, diberi angka ditambah catatan guru, dikembalikan kepada murid dan yang bagus dibicarakan di kelas. Di negeri kita mengarang dilakukan sekali sebulan atau dua bulan atau tiga bulan atau empat bulan, diberikan pada guru, diberi angka, tidak dikembalikan kepada murid dan tidak dibicarakan di kelas. Ini sudah berlangsung 48 tahun lamanya. Sebagai bangsa kita lumpuh menulis.

Tamat perguruan tinggi bukan jaminan mampu menulis. Orang yang mampu menulis sedikit. Jumlah wartawan dan sastrawan makin sedikit lagi. Jumlah sastrawan seluruh Indonesia, pantasnyanya cuma untuk sebuah negeri seluas Jawa Timur, jumlahnya memalukan untuk bangsa sebesar 200 juta.

Di negeri kita, di dalam kurikulum dominasi pengaruh kelompok linguis sudah lama keterlalaian: sampai mau jadi mahasiswa murid masih dipaksa menghafal penggunaan awalan, sisipan, dan akhiran juga, yang seharusnya sudah cukup dibereskan di SD dan SMP. Di SLA negara-negara lain, di kelas 2 dan 3 tata bahasa tidak diajarkan lagi, bahkan ada yang mulai kelas 1. Mereka dilatih *membaca, membaca, membaca* dan *menulis, menulis, menulis*.

Kini adalah titik balik bagi kita untuk membuat langkah baru memperbaiki yang terlalaikan selama ini bagi siswa-siswa kita, yaitu membaca dan menulis, dua butir pertama dari delapan kompetensi dasar pendidikan dan kebudayaan itu.

Memasuki abad atau milenium baru yang sudah demikian menghampir di hadapan kita ini, di semak-semak belantara 21 butir masalah sastra yang dibentangkan di atas, Pusat Bahasa sebagai institusi terkemuka di bidang pengembangan bahasa dan sastra ikut bertanggung-jawab membereskannya. Tetapi ini kerja dan juga tanggung jawab bersama. Sastrawan, fakultas sastra, kritikus, guru, organisasi profesi, pencinta sastra, penerbit, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta media massa, semua terlibat di dalamnya.

Pada suatu saat kelak semak-semak ini, selepas dirambah dan dibudidayakan, apalagi kalau bukan bunga bermekaran dan buah ranum bergelantungan yang sama kita harapkan.***



